e-ISSN: 2597-7326
p-ISSN: 2598-1048

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

Volume 1, No 2, Maret 2019

JURNAL KAJIAN Ruang Sosial-Budaya

- Resolving Health Communication Problem On Disaster Risk Through Community Relationships
  Isma Adila, Wayan Weda Asmara Dewi, Dian Tamitiadini
- Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila
  Hastangka
- Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik
  Rabiatul Adawiyah, Titi Fitrianita, Siti Kholifah
- Strategi Paguyuban Pencak Silat Tradisional Bintang Timur Dalam Melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk
  Gandi Indika Affandi , Anif Fatma Chawa , & Astrida Fitri Nuryani
- Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya
  Yopinovali Fherastama S , Titi Fitrianita , Arief Budi Nugroho
- Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse
  Handrianus Nino
- Mengenang Kembali Riwayat Hongkong dan Jepang dalam Kapitalisme Asia abad ke-19 dan ke-20
  Saiful Hakam
- Army Wives Serve, Too (A Novelistic Sense In Sociological Imagination)
  Wida Ayu Puspitosari

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

EDITORIAL

Editorial

Slamet Thohari[1]

Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya (JKRSB) Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 kali terdiri dari tujuh artikel dengan berbagai tema, yaitu tentang konflik, bencana, kesenian, gender, gerakan keagamaan, dan ekonomi. Tujuh artikel ini mengurai banyak isu terkini di Indonesia secara umum.

Isma menulis tentang bagaimana komunitas dan komunikasi disinerginkan untuk mengatasi persoalan kesehatan pasca bencana. Ia menggunakan pendekatan Participatory Action Research untuk melihat mitigasi bencana di daerah Lereng Pegunungan Kelud, Area-Pujon Kediri. Mengacu pada kerangka besar Sustainable Development Goals (SDG's), ia dan rekan-rekan penelitinya menyusun rencana aksi untuk mitigasi yang tercakup dalam media komunikasi baik teknologi komunikasi atau media komunitas masyarakat setempat. Penakanan pada aspek komunitas ini menjadi sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana.

Artikel Adawiyah melihat perubahan yang terjadi pada *merarik* atau kawin lari di Suku Sasak, Lombok Barat. Dengan kerangka feminisme, tulisan tersebut memperjelas status *merarik* dewasa ini sebagai praktik kekerasan kultural pada perempuan. Dengan latar legitimasi sebagai upaya menyelematkan perempuan dari kejahatan Raja Anak Agung Made Karangasem, *merarik* memiliki posisi yang kuat sebagai tradisi leluhur. Padahal faktanya,

[1] Slamet Thohari, editor *Jurnal Kajian Ruang Soaial-Budaya*. Email: sthohari@ub.ac.id

© Slamet Thohari, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol 1, No 2, 2019. Hal 1-2.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung *American Sociological Association (ASA)*:
Thohari, Slamet. 2019."Editorial," Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2):1-2.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.01

menurut Adawiyah, *merarik* kini menjadi ajang bagi banyak pengambil celah manfaatnya yang kurang bertanggung jawab terhadap mandat budaya leluhur Suku Sasak.

Dari Lombok Barat beralih ke Jember, Gandi, et al. menulis tentang strategi pelestarian yang dilakukan oleh paguyuban silat tradisional terhadap kesenian *can macanan kadduk*. Kesenian ini merupakan versi *pendhalungan* atau Madura dari barongsai dalam kebudayaan Cina. Melalui reproduksi dan rekonversi, PPST Bintang Timur sebagai pengelola kesenian mengadakan latihan rutin berupa arisan dan padang bulan. Dengan cara pandang Bourdieu, artikel ini mengurai strategi tersebut dengan konsep habitus, modal dan ranah.

Dengan cara pandang yang sama, Yopinovali Fherastama S, et al. juga menggunakan Bourdieu untuk melihat bagaimana organisasi ekstrakampus berkontestasi di intra-kampus untuk mengambil posisi strategis dan pengaruh dalam kelembagaan lembaga dakwah kampus. Dengan demikian ia dapat melihat bagaimana masing-masing modal organisasi mahasiswa tersebut berkontestasi dalam ranah yang pada kenyataannya telah lama didominasi oleh salah satu organisasi saja.

Melalui studi kasus di areal perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, Handrianus Nino mengurai ruang konflik di mana anka ragam konflik sosial kerap terjadi. Melalui Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser, ia melihat bahwa konflik tersebut bersifat struktural dan fungsional sekaligus. Runcingnya konflik ini, dalam temuan Nino, berasal dari ketidakterlibatan masyarakat dalam penentuan tapal batas wilayah negara antara Republik Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste.

Dari soal-soal yang berada di dalam negeri, artikel terakhir adalah tentang kapitalisme Asia abad ke-19 dan ke-20 yang diwarnai oleh China Hongkong dan Jepang. Kapitalisme Asia ini, menurut Hakam, dimulai sejak Asia Timur membuka diri pada ekonomi global. Dalam pandangan Hakam pula, dua model ini, antara kapitalisme Jepang yang merupakan praktik ekonomi politik korporasi dan kapitalisme China yang terbentuk melalui kemandirian kaum pengusaha, berkembang dan melintasi rangkai sejarah yang tak sama.

Dengan demikian, perbedaan jangkauan antartema dalam nomor ini dapat dibaca secara terpisah dengan pendekatan dan cara pandangannya masing-masing.

Selamat membaca.

Daftar Isi

Resolving Health Communication Problem On Disaster Risk Through Community Relationships 5

Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila 24

Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik 35

Strategi Paguyuban Pencak Silat Tradisional Bintang Timur Dalam Melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* 59

Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya 70

Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse 92

Mengenang Kembali Riwayat Hongkong dan Jepang dalam Kapitalisme Asia abad ke-19 dan ke-20 101

Army Wives Serve, Too (A Novelistic Sense In Sociological Imagination) 123

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Resolving Health Communication Problem On Disaster Risk Through Community Relationships

Isma Adila[1], Wayan Weda Asmara Dewi, Dian Tamitiadini

Studi ini fokus pada bagaimana ilmu komunikasi diterapkan pada Mitigasi Bencana berdasarkan pada bagaimana Komunitas dan Komunikasi disinergikan untuk menyelesaikan Masalah Kesehatan pasca Bencana. Pada studi ini, media komunitas merupakan salah satu bentuk *community empowerment* yang dapat menjadi potensi dalam penanggulangan bencana, berbasis swadaya masyarakat. Secara umum, kajian mengenai bagaimana posisi ilmu sosial dalam kajian mitigasi bencana masih sangat kurang di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus yang terjadi di Indonesia, seperti yang kita ketahui Indonesia berada pada gugus gunung api aktif, juga pada posisi kepulauan. Selain bertujuan mengisi kesenjangan kajian terkait, hasil dari penelitian ini dapat menjadi proyek percontohan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Indonesia dan Dinas Kesehatan dalam menentukan sikap pemerintah untuk langkah-langkah selanjutnya dalam melindungi masyarakat yang tinggal di daerah bahaya bencana alam di Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah Action Research. Jenis Action Research yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipatory action research. Hasil dari mapping unit unit daerah terdampak bencana, akan menghasilkan level prioritas pengelolaan Mitigasi Bencana daerah Lereng Pegunungan Kelud, Area Pujon-Kediri. Rencana aksi untuk mitigasi bencana akan tercakup dalam media komunikasi yang terbentuk secara organik, baik berbasis teknologi komunikasi atau media komunitas masyarakat lokal setempat. Program ini mengacu kepada Kerangka besar dari Sustainable Development Goals (SDG's) yakni Pencegahan Bencana di Lempeng Asia Pasifik. BNPB Nasional juga berusaha untuk mengimplementasi Sendai Framework 2015-2030 tentang Mitigasi Bencana di Asia, khususnya Indonesia yang memiliki Disaster Risk Tinggi di Negara Asia Tenggara. Mengingat pentingnya program ini, seluruh wilayah Indonesia yang rawan bencana harus menerapkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.
Kata kunci: *Mitigasi Bencana, Masalah Kesehatan, Pengurangan Resiku Bencana.*

This study focuses on how communication science is applied to Disaster Mitigation based on how Community and Communications synergized to in term of Resolving Health Problem after Disaster. In this study, community media is one form of community empowerment that can be a potential in disaster management, based on community self-reliance. In general, studies on how social science positions in disaster mitigation studies are still lacking in Indonesia. It is inversely proportional to the case

in Indonesia, as we know Indonesia is located on the cluster active volcano, also on the position of the islands. Besides aiming to fill the related studies gaps, the results of this study can be a pilot project for BNBP Indonesia and Public Health Office in determining the government's attitude for the next steps in protecting people stay in the hazard region to natural disasters in Indonesia. To achieve research objectives, the research type is Action Research, particularly the type of participatory action research. The result of mapping unit of the affected area will categorize the priority level of the management of the Kelud Slope Area, Pujon-Kediri Area. An action plan for disaster mitigation will be covered in an organically-formed communication tools, whether based on communications technology or local community media. This Resolving Health program refers to the major Framework of SDG's Disaster Prevention on the Asia Pacific Plate. National BNPB also seeks to implement the Sendai Framework 2015-2030 on Disaster Mitigation in Asia, especially Indonesia which has a High Disaster Risk in Southeast Asian Countries. Given the importance of this program, all disaster-hazard regions of Indonesia should implement community-based disaster risk reduction programs.
Keywords: *Disaster Mitigation; Health Problem; Reducing Disaster Risk*

INTRODUCTION[3*]

In the discussion of the National Medium Term Development Plan (RPJMN/*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*) for 2014-2019 disaster management programs become government priorities since Indonesia is a country that prone to disasters. This statement is supported by data from the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR 2010) showed that Indonesia ranks 12th out of 35 countries with the highest risk of death for hazard threats. Based on data from National Board for Disaster Management (BNPB 2011), Indonesia was ranked first for tsunami and landslide with the highest number of victims worldwide. This disaster can not be separated from the factors of geography, geological, and demographic of Indonesia.

[1]Isma Adila, Department of Communication, Faculty of Social and Political Science, University of Brawijaya, Email: isma.adila@gmail.com

© Isma Adila[1], Wayan Weda Asmara Dewi, Dian Tamitiadini, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 5-33.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):
Adila, Isma., Dewi, WW Asmara & Tamitiadini, Dian. 2018. "Resolving Health Communication Problem On Disaster Risk Through Community Relationships," Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 5-33.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.02

Kelud Mount is one of active volcanoes in Indonesia. The area includes three region, namely Kediri, Blitar, and Malang. When Kelud Mount erupted in 2014, the ash was covering the area of Pujon-Kediri. Therefore, these two areas experienced a massive impact from this eruption. Several river lanes can not be used by local residents because it was covered by cold lava.

According to the Preliminary Research conducted in 2015, it is known that the people affected by Kelud volcano already have communities for Disaster Response. Unfortunately, they only focus on post-disaster rescue and recovery activities. They have no pre-disaster or mitigation education, either by local people or Regional Disaster Management Agency (BPBD/*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*).



Figure 1 Kelud eruption of 2014

Source: BPBD Kabupaten Kediri

Community-based disaster risk reduction (PRBBK/ *Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas*) is an effort made by community members in an organized manner, especially before a disaster occurs, using the available resources they have as many as possible. In this study, community-based disaster risk reduction is conducted through health communication approaches. This is due to the dissemination of health-based disaster impacts utilizing information technology as an important part of disaster mitigation in accordance with Kepmenkes. 064 / MENKES / SK / II / 2006 about the delivery of Data / Information and reporting using Health Crisis Response Information System for post disaster. Additionally, given the importance of this program, the entire disaster-hazard regions of Indonesia are expected to use health-communication approach as an effort to implement a community-based disaster risk reduction program.

MATERIAL AND METHOD

Qualitative method was conducted in this study. Denzin and Lincoln cited in Moleong (2007) stated that qualitative research is a study that uses a natural setting with the intent to interpret the phenomenon that occurs by involving various existed methods. The study focus according to Moleong (2004) has two intentions, namely 1) to limit the study, and 2) to meet the criteria of a newly acquired information's flow in the field. Thus, the study focus will show the needed data that should be collected.

This study aims at identifying the programs that have been done regarding disaster mitigation and its evaluation. Later, it will be explained how the disaster risk reduction based on health and community communication in Pandansari Village in the slopes of Kelud Mount, East Java.

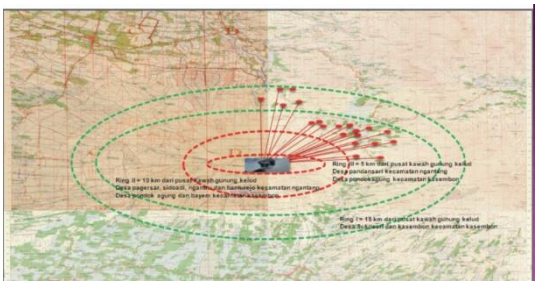


Figure 2 Maps of the area prone to Kelud eruption in East Java

Source: BPBD Kabupaten Kediri

Besides, researchers will cooperate with disaster prepared community groups. This cooperation aims to build community development programs involving people. By doing so, researcher builds post-disaster health information communication system to embody accountability that includes audience focus (consisting of disaster preparedness group, community, and volunteer), leader commitment (covering the role of regional leader, community leader, public figure, and others), situational awareness (understanding the condition of the area at risk of being affected by the eruption of Mount Kelud in order to know the possibilities of evacuation, regional character, and others), and media partnership (the role of researchers in term of providing alternative socialization media to the community such as disaster response application).

By having the dissemination of information related to the impact of the Kelud eruption on public health through health communication approach, it is expected that the community can

gain an understanding and able to encourage others to conduct disaster mitigation independently.

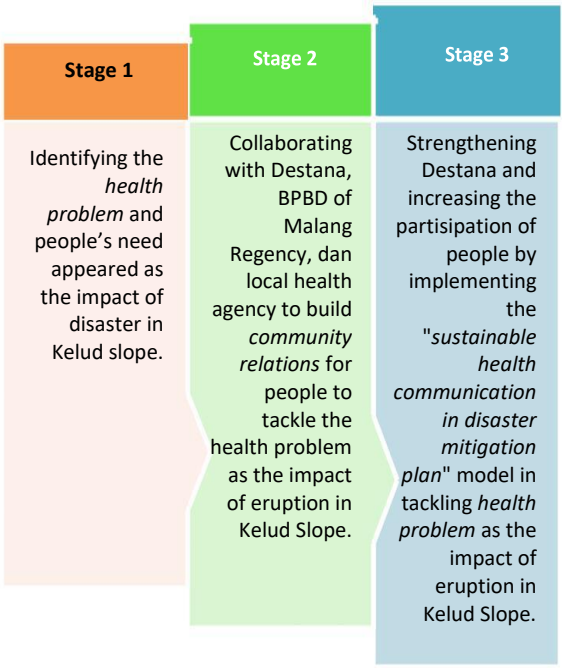
The magnitude impact of Kelud eruption shows the necessity to collaborate with Disaster Responsing Village or Destana (*Desa Tanggap Bencana*) to provide understanding and knowledge that can be accepted continuesly across generation in the local area, which can be spreaded to the surrounding area. Destana itself was formed in 2008 as an real attempt to response Kelud eruption both in 2007 and before 1990. The word of Destana comes from the phrase "Jangkare Kawulo Redi", which essencially means to train the community to be able to live side by side with Kelud. In order to equip people to have an early prevention for disaster, Destana has conducted simulation to all villages around Kelud.

Until now, Destana's early prevention is attempted through a radio communication network owned in 67 Villages around Kelud, including 11 villages in Malang District from about 300 villages at risk of being affected (jatim.bps.go.id). The role of East Java BPBD is providing direction as a moral support to all heads of BPBD for districts/ cities in East Java. Therefore, stakeholders who are in charge in the rural area to be able to optimally train a resilient community to face a disaster so that disaster risk can be reduced to zero accident. In this program, people are trained to have the ability to avoid harm. Having an understanding that their environment is a disaster-risk area, they are expected to prepare a plan to avoid the disaster. This program has goals such as actualizng the disaster risk reduction and preparing people's self-sufficient to deal with disaster situations and post-disaster conditions. The people is nurtured to grow an awareness of the disaster mitigation that is generated through understanding the impact of natural disasters for health in disaster communication model, which means people can face appropriately when the disaster strikes.

To achieve the research objectives, Action Research is conducted. In its application, Kurt Lewin cited by Pickard (2013) who pioneered the use of it proposed the principle of "cyclic step" consisting of identifying problems, action planning, implementation, evaluation, and reflection. The type of Action Research used in this study is partisipatory action research. Gonsalves et al cited by Iqbal, Basuno, and Budhi (2007) explained that participatory action research is a combination of research and action in a participatory way to improve aspects of people's lives.

The affected location is quiet large, which consists of 3 districts, namely Kediri, Blitar and Malang. When Kelud Volcano erupted in 2014, the ash was covering the area of Pujon-Kediri where these two areas that belong to Malang District experienced the massive impact from the eruption. Therefore, this research is conducted in Malang District, and thus, it is expected to help the community in Kelud area to conduct community-based disaster mitigation through proper health communication. To do so, the categorization of informants has been done. This categorization was based on the proximity of informants in accessing the relevant information. First, a group of people who are agents of change including the Village Head and the relevant head of government agencies in Malang District, and the members of the disaster awareness group in Kelud area. Second, supported groups including people who have lived in the Kelud area for 5 years who are members of the aforementioned group. The scheme of stages followed in this study is provided in Table 1.

Table 1. The scheme of this research



Source: compiled by authors

The data analysis done in this study is epiphani analysis that is defined as "analysis done by collecting and reducing information so that significant information and key element are found" (Nawangsari 2004). Thus, there are several purposes of this analysis, such as 1) to reduce, filter, or crystallize the large data, 2) to strengthen and clarify the understanding of

planning and implementation as well as to find the supporting and inhibiting factors in building the community libraries with community participation.

EXPECTED RESULT AND DISCUSSION

1. The role of BPBD in performing the disaster mitigation of Kelud.

BPBD is a government institution that served as the main actor in conducting disaster mitigation program. They perform different approaches based on the types of activities in each of the disaster risk areas. In the Kelud disaster, BPBD has a Destana program (Desa Tanggap Bencana or Disaster Responsing Village). This program is implemented in Pandansari village in 2014 after the eruption of Mount Kelud which was inaugurated in 2015.

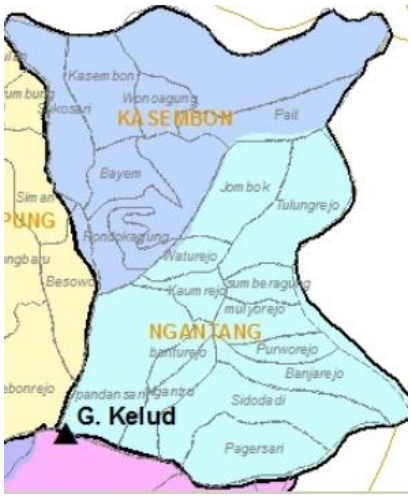


Figure 3 Map of Destana Working Area based on disaster risk

Source: BPBD Kabupaten Kediri

Pandansari village is the largest and most risky affected village among others such as Banturejo Village, Sidodadi Village, and Kasembon. Pandansari Village itself has a Village Information System (SID) that collects all data about the population of Pandansari Village and other needs in digital form related to disaster. Therefore, SID is very important and necessary in tackling the disaster. SID has several functions since in every disaster, data preparednes is necessary, such as: 1) accelerate the making of letters / documents 2) assisting data collection during disaster evacuation such as the number of elderly, pregnant women, livestock, and

others. 3) digital data can be accessed anywhere, as well as serving as a duplicate of physical documents. Data available in SID is updated monthly through data collected by the head of a number of people who live in the same neighborhood (RT/Rukun Tetangga).

The activity in this village was initiated by Mr. Suparno, as a local community leader with the help of local community. Currently, there are 65 members consisting of 30 volunteers and 35 members of the Protection of Society (LINMAS). Besides, Destana initiated activities based on the situation, such as providing emergency corner in the village office when there is an emergency situation due to rainy season. These are the types of catastrophic impacts that should be considered (Table 2).

Table 2. the types of catastrophic impacts

No.	Form of disaster	Information
1.	Volcanic Gas	Gases released during volcanic eruptions, such as carbon monoxide (CO), Carbondioxide (Co2), Hydrogen Sulfide (H2S), sulfur dioxide (SO2) and nitrogen (NO2), which harm people.
2.	Lava	A high-temperature magma fluid that flows to the surface through the volcano's crater. Dilute Lava is able to flow away from the source following the existing river or valley, whereas thick lava flows not far from the source.
3.	Volcanic mudflow	The eruption of volcanic mudflow occurs when a volcano that has a crater lake erupts so that the hot lake water mixed with eruption material of Kelud in 2014. On the other hand, rain lava occurs due to mixing eruption material with rain water around the top.
4.	Ash volcano eruption	The impact of eruption ash caused the breathing problems, vision difficulties, water source pollution, electrical storms, disrupt the work of machines and motor vehicles, damages of the roof, fields, organs of the body.

5.	Hot clouds	Hot clouds can cause burns to the body's open areas such as head, arms, neck or legs and also cause out of breath until not breathing.

Source: compiled by authors

Kelud Disaster Management by BPBD and the involved communities are considered as successful by Japan in educating its citizens before the eruption occurs. The education has been started by Destana (Desa Tanggap Bencana) in 2008. It essentially aims to grow people's awareness that they live in the disaster-prone areas and they have the capacity to do relevant prevention. Besides, they should independently do the action since BPBD office is relatively far and people there should understand better the characteristics of the region. Generally, people were aware of their condition and have the ability and independence to do self-evacuation when disaster occurs. By doing so, people have finally realized its importance such that when the disaster occurred they can implement it in order to prevent victims.

2. The types of activities by Health Agency of Government as the attempt of disaster mitigation.

Related to health problems, there are two village midwives assigned in Pandansari Village. Based on the results of in-depth interviews conducted with Dwi Ratna as an active disaster preparedness team in Ngantang sub-district, disaster mitigation activities from the health sector have been done in collaboration with BPBD, Destana, PMI, KSR also supported by participation from village apparatus. So far, the form of the activity is still a simulated disaster preparedness routinely implemented at least once a year. This simulation is routinely done since the eruption of Mount Kelud occured in 1991.

On the other hand, the health office is usually seen from vulnerable groups first either the elderly or babies. Potential health problems during kelud disaster are because the volcanic ash that can harm humans and animals (e.g animal digestion, such as the volcanic ash in between the grass can damage the stomach of animals if they consume it). As for humans, it can disturb their breathing, especially in vulnerable groups such as the elderly. When Kelud erupted last time, many elderly were difficult to be evacuated and chose to return to their homes on foot. It happens since they belief that the eruption of Kelud will not reach

Pandansari Village. Cases like this tend to occur in the areas prone to volcanic eruptions. Due to the closeness of the community to their living environment, many of them are difficult to be evacuated. The Health Office itself is still having difficulties to approach the community groups to participate in the evacuation process. Eventhough their environmental conditions shows the high risk for respiratory health and environmental health. Therefore, those people have already understand what to do when disasters occurs, for example, they can hide under the table even if their house collapses, but not the afterward. After the catastrophic eruption occurs, it is usually followed by other disease outbreaks such as respiratory tract infections and acrobatic diarrhea from unhealthy environment and surrounding resources (for example, the feasibility of clean water and plants for consumption).

Health communication activities conducted by health office are more likely to be done during pre-disaster (for example, through integrated simulations with other agencies) and during disasters. Health communication during disasters is done in aid posts. The Health Office through smaller health offices (puskesmas) usually conduct counseling session collaborated with Destana. These attractive health communication activities were initiated by Destana community, not the Health Office. Unlike the regular action that use LCD (Liquid Crystal Display) monitor or media to explain disaster mitigation steps, but this one is still relatively rare, because most steps have been explained during the simulations. Those activities were conducted by the "Promkes" division or health promotion in collaboration with Destana, as Destana is the main driver of disaster mitigation in the Pandansari region.

Technically, the obstacles possessed by the health office are supporting facilities that have not owned yet by the local health center, such as tents and drug limitations. While in terms of socialization of health impacts, the health department team acknowledged the constraints of information absorption by local people. According to the researchers, this can be anticipated by the existence of a consistent form of health communication such as the information submitted through communication media in the form of banners and leaflets that can be obtained at the nearest health center (Polindes). Additionally, based on the descriptions of interview results, communication activities have inclination to be conducted only to directly experienced the impact of natural disasters, such as information in health education related to respiratory health. In fact, health communication messages delivered not only in the context of breathing but also related to environmental health. Health communication was rarely

disseminated the information related to environmental health. Previously, the environmental health team directly conducts environmental health tests (for example, on clean water, crops, and livestock) to be communicated to the public whether it is edible or not. However, this is not communicated evenly, so that it impacted on the high status of outbreaks of Diarrhea in the community that exist in aid posts. Researchers think that it would be better if basic information related to environmental health communication is also communicated to the community intensively so that the community can independently classify how the most basic environmental health criteria. For example, the information about how to identify clean water and proper consumption, how to cook or process food in the neighborhood post, and others.

Table 3. the form of communication

No.	Form	Aims	Targets	Action time
1.	Banner	Explaining that the impact of natural disasters can harm health conditions as an important issue	Communities who seek for treatment at village health centers	Consistently, pre-disaster
2.	leaflet	Communities can bring personalized information media to their homes to be shared with other family members.	People who seek for treatment at village health centers and family members at home	Pre-disaster
3.	Counseling	It can reach the community groups that	Group of PKK	Pre-disaster

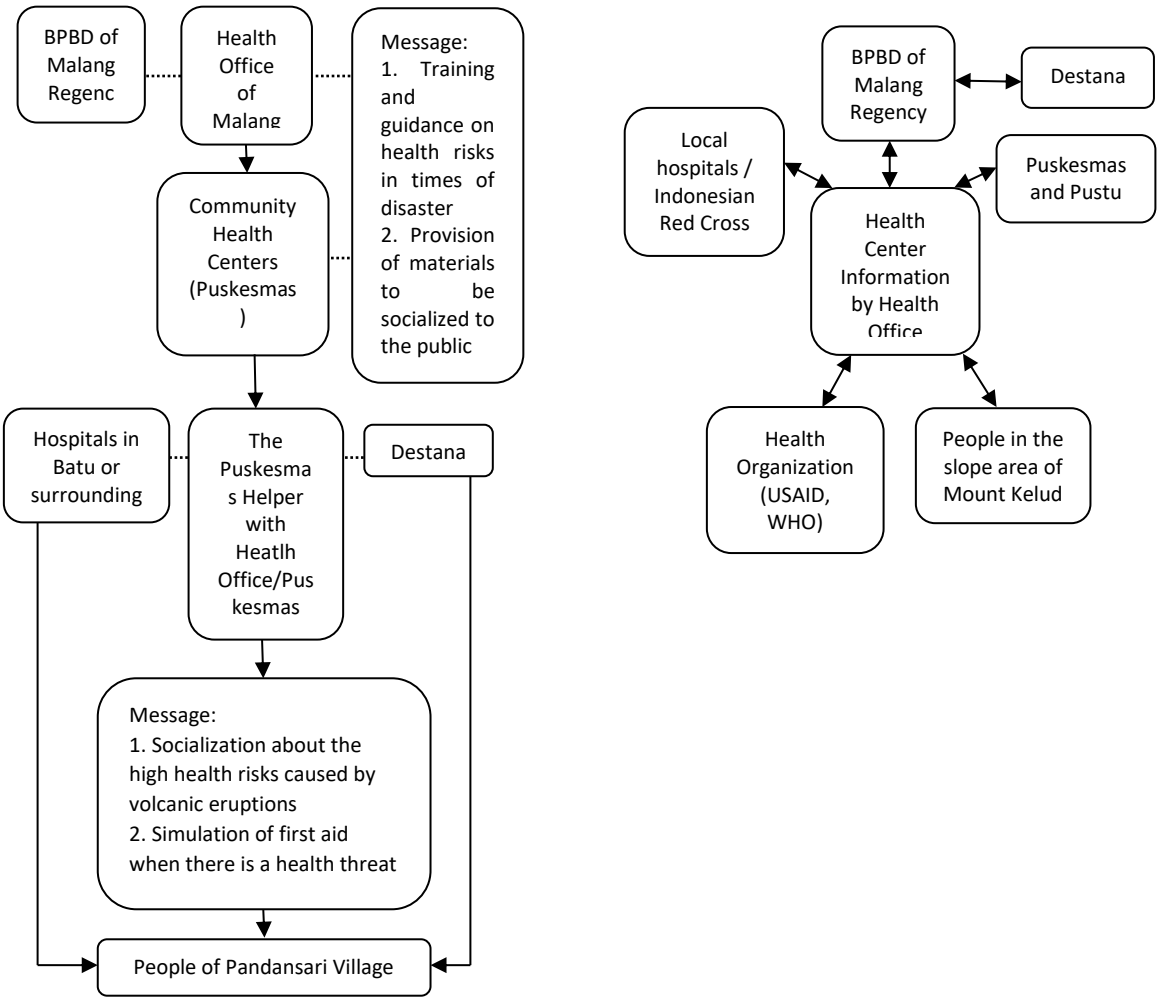
		play an important role in the social system		
4.	Routine simulation	Performed once in a year. Increasing community awareness by knowing the location of the evacuation route.	The entire community	Pre-disaster
5.	Briefing on environmental health	Socializing the criteria of a healthy environment condition and differentiate decent resources for consumption to the community	The entire community	During disaster
6.	Communication in the form of verbal announcement	Delivering the information regarding the location of aid posts	The entire community	During disaster
7.	Establishment of working groups of citizens / communities	Strengthening community groups for site rehabilitation	The entire community	Post-disaster

Source: compiled by authors

As a health service center for communities located in hazard-prone areas, Puskesmas and other health institutions should promote health communication promotion related to the impacts of disaster risk around them through the internal communication media that can be

obtained when the community visits to have health check-ups at the Puskesmas or Other institutions despite the occurrence of symptoms of natural disasters. So that the information they get can be vigilant and aware of the importance of their health individually. Realizing its importance, they are able to persuade other communities to participate in evacuation if a natural disaster strikes.

In the perspective of health communication, communicators are assumed to build the perceptions of communicator (community) about new ideas to change behavior that aims to increase the value of health understanding by selecting information and presenting it both gradually and continuously in order to become a priority of information understood by Community. Activities undertaken by Health Office through Puskesmas and Polindes were currently still prioritizing nationally prioritized health issues. In fact, especially for areas with high disaster risk, health communication issues are not only related to major issues nationally but also on the immediate priority issue of how to respond to disaster risks that impact on public health. By showing how to perform the health responses for pre- and post-disaster through the internal media of Puskesmas and Polindes while they are waiting to obtain health services, communicators can take advantage of these conditions in order to build a perception on society that the idea is very important to them. People who are examining their health, can be well educated without having to go through a more specific counseling. Their understanding of the information they can convey to others who are around them. This is in accordance with the characteristics of local communities whose collectivities are high. Health information disclosure will be more effective and the purpose of health communication in disaster mitigation can be more optimal thanks to the role of the community, whether already incorporated in the disaster preparedness community, or who are not incorporated therein.



nfo:

: The flow of communication and information

: collaboration

Figure 4 The Model of Health Crisis Risk Reduction during Disaster based on the culture and Community for pre- (first picture) and post-disaster (second picture).

Source: compiled by authors

The creation of independent community in disaster management is part of the Sustainable Development Objective Concept that was born at the UN Sustainable Development Conference, Rio + 20, by 2012 by setting a set of targets that can be applied universally and measurable in balancing three dimensions of sustainable development; (1) environment, (2) social, and (3) economy. Through health communication approach, two main aspects of

sustainable developing goals that can be found are environmental health aspect and development of social system of self-reliance of disaster response.

This research supports the ideas presented in the Sendai Framework as a global reference in disaster management. The framework explains that each country has the primary responsibility for preventing and reducing disaster risks, through international, regional, subregional, cross-border and bilateral cooperation. Disaster risk reduction is a common problem for all countries and the extent to which developing countries can effectively improve and implement disaster risk reduction policies and context-related measures in their respective countries and further enhance their capacity through sustainable international cooperation. Managing disaster risks aims to protect people and their property, health, livelihoods and production assets, as well as cultural and environmental assets as well as promote and protect all human rights, including the right to build, for which community engagement and partnership is required. It also requires empowerment and inclusive, accessible and non-discriminatory participation, paying special attention to people affected by disasters disproportionately, especially the poorest.

CONCLUSION

In the case of Mount Kelud eruption disaster alert, the community has an active role in disaster mitigation activities. Activities undertaken by Destana community is supported by the government through BPBD and Health Office. However, there are many obstacles in the process of delivering messages related to health issues as the impact of these natural disasters. The health approach should be one of the main ideas in supporting effective disaster mitigation programs to the community, especially in Pandansari Village which has the highest risk of impact.

Based on the data obtained, disaster mitigation activities through health communication approaches can be done individually or in groups, with health messages covering disaster response activities in three conditions: pre-disaster, during disaster, and post-disaster. Public health messages submitted to Puskesmas and Polindes through internal communication media consist of how the impact of Mount Kelud eruption disaster for health and how communication related to environmental health post disaster. Such information or ideas can be accessed by the wider community when they visit a local health service center. Thus, the

message is disseminated to the family members of the community so that the community acts as an individual or personal actor.

In contrast to activities that have previously been routinely performed by community-based Destana, people whose level of understanding and information is high enough, Destana-based disaster mitigation activities are very effective because Destana approaches community to community (community groups are gathered to receive counseling and simulation). While the personal health communication approach supported by health office partisipation can help to reduce difficulties especially in conducting dissemination of disaster mitigation to the elderly or community groups that are difficult / do not want to be evacuated.

As a conclusion, this research provide an aprroach solution in disaster risk reduction efforts based on Sendai's framework regarding the criteria of society: 1. Understanding disaster risks; 2. Strengthen disaster risk management and disaster risk management; 3. Investment in disaster risk reduction for toughness; 4. Increase disaster preparedness for effective response, and to "rebuild in a better condition" as a recovery, rehabilitation and reconstruction. It can be formulated through the following model.

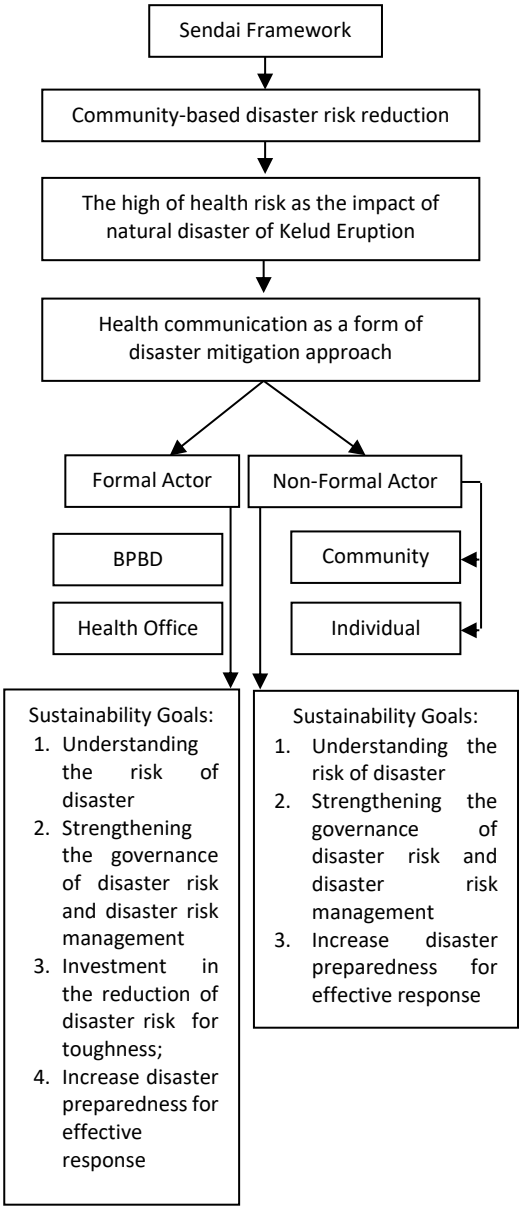


Figure 5 Health Communication Based-Disaster Mitigation Plan

Source: compiled by authors

ACKNOWLEDGEMENT

Authors would like to thanks to all informants in Pandansari Village. Authors also would like to thanks to Malang Health Office Department which gives profound and helpful discussion. Lastly, a big appreciation for LPPM UB (Competitive Grant) for funded our multiyear research.

REFERENCES

UNISDR, 2010

BNPB, 2011

jatim.bps.go.id

Danley, KS and ML Ellison. 1991. *A Handbook for Participatory Action Researchers*. Boston: Center for Psychiatric Rehabilitation, Trustees of Boston University. Retrieved June 26, 2018 (http://escholarship.umassmed.edu/psych_cmhsr/470/).

Iqbal, Muhammad, Edi Basuno, and Gelar Satya Budhi. 2007. "Esensi Dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian." *Forum Penelitian Argo Ekonomi.* 25(2):73–88. Retrieved June 26, 2018 (https://media.neliti.com/media/publications/61907-ID-esensi-dan-urgensi-kaji-tindak-partisipa.pdf).

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya . Retrieved May 12, 2018 (http://library.um.ac.id/free-contents/printbook1.php/koleksi-digital-perpustakaan-29154.html).

Moleong, LJ. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawangsari, AS. 2004. "Permasyarakatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak Melalui Pemasaran Sosial Sebagai Upaya Melakukan Perubahan Perilaku Kesehatan Ibu Dan Anak (Penelitian Terapan/Action Research Di RW 11 Dan 14 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok)." Universitas Indonesia.

Pickard, AJ. 2013. *Research Methods in Information*. london: facet publishing.

Danley, K & Ellison. 1991. *A Handbook for Participatory Action Researchers*. Boston : Center for Psychiatric Rehabilitation, Trustees of Boston University.

Edi Basuno, et al. 2008. Kaji Tindak (*Action Research*) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Daerah Tertinggal (Tahap II). Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Keijakan Pertanian.

Carter, W. Nick, 2008, Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook, Asian Development Bank, Philippines: Mandaluyong.

Coburn, A. W, R.J.S. Spence dan A. Pomonis, 1994. Mitigasi Bencana. Cambridge Architectural Research Limited. Modul Diklat Pelatihan Manajemen Bencana, UNDP-DHA, http://www.undmt.p.org/Indonesian/Disaster_Mitigation/Mitigasi.

Haddow, G. D, dan Kims. 2008. Disaster Communications, In A Changing Media World. London. Elsevier Mukti, A. G. dan A. Winarna. 2012. Manajemen Resiko Bencana dalam Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana". Yokyakarta: Mizan.

Muhammad, B. 2008. Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Nicholls, S, dan C. Healy. Communication with Disaster Survivor: Toward Best Practice. The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 23 No. 3, August 2008 14-20.

Notoatmodjo,S 2010, *Metodologi penelitian kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pristiyanto, Djuni. 2016. Perka BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. https://www.bnpb.go.id/home/detail/2929/Perka-BNPB-No.-1/2012-tentang-Pedoman-Umum-Desa/Kelurahan-Tangguh-Bencana.

Randolph Kent, 1994. Disaster Preparadness. 2nd Edition. UNDP, Disaster Management Training Programme, http://www.drlatulane.org/leadershipcorner/interviewes/randolph-kent-interview.

Setio, H. H. B (ed). 2011. Komunikasi Bencana. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.

Stringer, E.T. 1996. *Action Research : A Handbook for Practitioners*. London : Sage Publication.

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila

Hastangka[1]

Kajian ini membahas tentang kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus perhatian dari kebijakan pariwisata yang hendak dianalisis meletakkan pada konsistensi dan komitmen, serta filsafat tersembunyi dari kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik *(good gvernance)* dan daya saing pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 tahun terakhir. Secara khusus, kajian ini akan melihat kebijakan pariwisata dalam perspektif Pancasila. Metode kajian ini merupakan metode kualitatif. Data kajian ini diperoleh dari dokumen, laporan kinerja Dinas Pariwisata, peraturan perundang-undangan, data statistik pariwisata di Yogyakarta, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan laporan hasil penelitian terkait dengan topik pembahasan. Analisis data menggunakan interpretasi, heuristik, dan analisis kebijakan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pariwisata DIY menunjukkan konsistensi, komitmen, dan aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima yaitu mendorong kesejahteraan masyarakat.

This study is aiming to elaborate the tourism policies implemented in Special Region of Yogyakarta related to consistence, commitment and hidden philosophy in term of strengthening city management toward good governance during five years. It used qualitative methode and using Pancasila as a prespective. Using the heuristic interpretation, the results of this research found that toursime polices done by government showed their consistency, commitment, and expression to principle of Pancasila, particularly the last principle.
Kata kunci: kebijakan, pariwisata, DIY, tata kelola, Pancasila.

[1] Dosen MKU (Pancasila) STIPRAM Yogyakarta dan Peneliti Independen. Email: hastangka@gmail.com

© Hastangka, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.24-34.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):
Hastangka. 2019. "Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila" Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 24-34.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.03

Pendahuluan

Pariwisata menjadi sektor penting dalam percepatan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat (Arliman,2018:274). Pariwisata menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan berbagai upaya untuk mendorong inovasi di bidang pariwisata semakin gencar dilakukan. Pariwisata dinilai menjadi sektor yang strategis dan sentral dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Wiratama, 2017:1). Kebijakan pariwisata di Indonesia mulai ada pada masa kolonialisme Belanda. Pada tahun 1910 sampai dengan 1920, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah mengeluarkan keputusan tentang pembentukan *Vereneiging Touristen Verker* (VTV) suatu Badan *(official tourist bureeau)*. Kedudukan VTV ini, selain sebagai *tourist government office* juga bertindak sebagai *tour operator/travel agent* (Simanjuntak, Tanjung, dan Nasution,2017:14). Sejarah kebijakan pariwisata lahir dari konteks ekonomi dan sosial yang membawa konsep dan kebijakan pariwisata menjadi sektor penting pada masa penjajahan Belanda. Berbagai infrastruktur dan fasilitas juga dibangun seperti sarana transportasi, akomodasi, hotel, restauran, serta berbagai destinasi pariwisata diciptakan bagi orang-orang Eropa yang datang ke daerah jajahan. Sejak itu, pariwisata menjadi bagian penting dalam proses kolonialisasi karena memberikan ruang baru bagi para pedagang dari Eropa, Asia, India, dan Cina agar dapat tinggal lebih lama karena berbagai sarana hiburan disediakan. Dalam perkembangannya, Pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan kebijakan pariwisata mendapatkan perhatian seperti terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan arti penting dalam proses membangun kebijakan pariwisata di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Pada konsideran menimbang poin c UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa:

> "Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional".

Pariwisata menjadi sektor yang vital dan penting bagi pembangunan nasional karena bidang ini mulai menjadi perhatian pemerintah secara serius dengan diundangkannya isu pariwisata, setidaknya sektor ini mendapatkan posisi strategis dalam kebijakan nasional karena tidak semua isu kehidupan sosial dan politik bisa diundangkan dan dapatkan disahkan menjadi Undang-Undang jika hal tersebut bukan menjadi skala prioritas nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui Deputi Ekonomi juga pernah merumuskan Pembangunan Pariwisata 2015-2019, yang diletakkan pada ada dua sasaran penting yaitu:sasaran pertumbuhan dan sasaran pembangunan inklusif. Sasaran pertumbuhan difokuskan pada peningkatan daya saing dan kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional. Sedangkan sasaran inklusif difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga lokal di bidang pariwisata agar memiliki daya saing melalui sertifikasi. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diterapkan menyangkut 4 aspek yaitu:1). Pemasaran pariwisata nasional,2). Pembangunan destinasi pariwisata,3).pembangunan industri pariwisata,4). Pembangunan kelembagaan pariwisata (Deputi Ekonomi, 2014, naskah presentasi BAPPENAS). [5]Pada tahun 2018, Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dalam siaran persnya juga menyepakati upaya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat koordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan[6].

Secara nasional, kebijakan Pariwisata telah diarahkan untuk mendorong pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan. Kajian ini akan memotret kebijakan pariwisata yang dikembangkan di daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yogyakarta dikenal memiliki "sejuta julukan". Istilah "sejuta julukan" menjadi bagian dari sejarah dan narasi keberadaan Yogyakarta dengan berbagai label seperti kota pendidikan, kota pelajar, kota kuliner, kota gudeg, kota kenangan, kota budaya, kota batik, kota wisata, kota seni, *city of Philososphy*, dan berbagai julukan lainnya. Yogyakarta secara khusus juga memiliki berbagai macam pilihan destinasi pariwisata mulai dari kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Kota. Saat ini, Yogyakarta menjadi sorotan penting pariwisata nasional

[5] https://tourism.binus.ac.id/2017/04/20/4-pilar-pembangunan-kepariwisataan-indonesia/, diakses 30 Januari 2019, 21:00.
[6] https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_290818.aspx, diakses 30 Januari 2019, 20:57.

dan internasional. Dibangunnya bandara internasional Yogyakarta di Kulon Progo, dinamika dan perkembangan pariwisata di Yogyakarta semakin bergeliat. Berbagai bentuk destinasi pariwisata baru bermunculan sepanjang 19 tahun terakhir ini. Kajian ini akan membahas tentang kebijakan Pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak paska reformasi dalam perspektif Pancasila. Pariwisata lahir dan berkembang sebagai upaya untuk memberikan keseimbangan hidup bagi manusia antara kebutuhan jasmani dan rohani. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani manusia dapat dilakukan melalui hiburan atau liburan. Narasi hiburan dan liburan menjadi bagian penting berkembangnya pariwisata sebagai industri. Kemudian, wujud dari kebutuhan rohani ialah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kenyaman. Pariwisata menjadi titik pijak dalam proses mewujudkan pembangunan nasional dari aspek kesejahteraan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan keadilan sosial yang merata baik dari segi jasmani maupun rohani. *United Nation World Tourism Organizations (UNWTO)* menyebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi sektor unggulan *(tourism is a leading sector)*[7]. Hasil kajian dari UNWTO terkait dengan pergerakan turis internasional yang datang di kawasan Asia Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada periode per 5 tahun terakhir sejak 1995 sampai dengan 2017. UNWTO mengamati pergerakan turis international yang berkunjung ke kawasan Asia Tenggara sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Pergerakan turis internasional berkunjung ke kawasan Asia Tenggara

No	Tahun	Jumlah Turis (dalam jiwa)
1.	1995	28.500.000
2.	2000	36.300.000
3.	2005	49.000.000
4.	2010	70.500.000
5.	2015	104.200.000

[7] Dinas Pariwisata DIY. 2016. *Executive Summary Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan DIY dan Sekitarnya,* Yogyakarta: PT. Kertagana. Hal.5.

6.	2016	110.800.000
7.	2017	120.400.000

Sumber: *UNWTO Tourism Highlights 2018 edition.*

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pergerakan turis internasional berkunjung di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan dalam periode 5 tahun terakhir dan meningkat pada tahun 2017. UNWTO mencatat dalam survey yang dilakukan tahun 2017 secara global bahwa tujuan dari kunjungan para wisatawan dikategorikan menjadi 4 kategori umum yaitu: 1). Liburan/rekreasi.2). mengunjungi saudara/sahabat/, kesehatan, dan agama. 3). Bisnis dan kegiatan profesional. 4). Tidak disebutkan secara khusus *(not specified).* Dari keempat kategori tersebut urutan yang paling tinggi terkait dengan tujuan berwisata ialah 55% (rekreasi dan liburan), 27% mengunjungi teman,saudara, urusan agama, dan kesehatan,13% urusan bisnis dan kegiatan profesional, dan 6 % tidak menyebutkan secara khusus (*UNWTO Tourism Highlights* 2018 *edition*,hal.3).

Peta pergerakan wisatawan dalam konteks internasional telah memberikan gambaran bahwa perilaku berwisata masyarakat atau seseorang ditentukan oleh motif dan tujuan tertentu. Motif utama ialah mendapatkan hiburan dan pengalaman baru ketika berkunjung ke suatu tempat tertentu. Kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas 11 negara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura,Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste) memiliki potensi pariwasata yang beragam dan secara umum hampir memiliki pola tawaran pariwisata yang sama. Misalnya, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata kuliner hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki jenis pariwisata tersebut. Konsistensi dan komitmen pemerintah dalam merumuskan kebijakan Pariwisata menjadi penting untuk melihat tata kelola pariwisata yang baik dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Lembaga Survey Nielsen pada tahun 2016 juga merilis 100 perusahaan/industri pariwisata yang terbaik. Survey ini memfokuskan perusahaan maskapai penerbangan, hotel, tour operator, dan travel agent. Garuda Indonesia dalam survey tersebut menduduki peringkat ke-48 dari 100 perusahaan industri penerbangan.

Kajian ini akan memfokuskan tentang kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaan kajian ini adalah:1). Bagaimana

kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata DIY?, 2). Sampai sejauh mana kebijakan pariwisata dapat dinilai konsisten dan berkomitmen dalam membentuk tata kelola pemerintah yang baik *(good governance)* dan berdaya saing di bidang pariwisata dalam kerangka mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari kajian ini adalah pertama, untuk mendapatkan gambaran umum tentang model dan praktek kebijakan pariwisata yang telah diterapkan oleh Dinas pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kedua, untuk melihat konsistensi dan komitme kebijakan Pariwisata DIY dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di bagian selatan pulau Jawa memiliki luas wilayah 3.185,80 kilometer persegi. Secara Administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten,78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa (Dinas Pariwisata DIY, 2017:iii). Dalam catatan dokumen Dinas Pariwisata DIY menjelaskan bahwa sejarah berdirinya DIY menjadi fase penting dalam proses perjalanan Yogyakarta mendapatkan berbagai julukan sebagai kota perjuangan, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Sebagai kota perjuangan dapat ditinjau dari aspek sejarah bahwa sejak berdirinya Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki cerita dan perjalanan penting dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika masa kepemimpinan Sultan HB IX menyatakan komitmen akan pembentukan negara Indonesia yang berdaulat dan berdikari. Kemudian pada masa perjuangan revolusi fisik, Yogyakarta memiliki komitmen untuk melawan penjajah Belanda. Sebagai pusat pendidikan, berdasarkan dari data statistik menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki lembaga pendidikan terbanyak di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat ada 141 Pendidikan Tinggi yang berada di Yogyakarta yang terdiri atas: 26 Universitas, 57 Sekolah Tinggi, 7 Institut, 9 Politeknik, dan 42 Akademi. Sebagai pusat kebudayaan menunjukkan bahwa keberadaan keraton Yogyakarta sebagai ikon kebudayaan membawa imajinasi dan gambaran tentang Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta, kebudayaan menjadi ruang dan ekspresi sehari-hari. Seni dan kebudayaan melekat dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Selain itu, Undang-

Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pengikat secara yuridis bahwa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam beberapa aspek penting mulai dari tata kelola pemerintahan, budaya, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan (Dinas Pariwisata DIY, 2017:vii-xiii).

Pada aspek destinasi pariwisata, Yogyakarta dikenal memiliki banyak variasi dan inovasi destinasi pariwisata yang ada. Wisata di kawasan Yogyakarta telah berkembang dan bertumbuh mengikuti trend zaman. Selama 5 tahun terakhir ini, destinasi pariwisata di Yogyakarta berkembang pesat. Destinasi wisata yang sudah terkenal di Mancanegara antara lain candi Prambanan, Ratu Boko, Keraton, Kota Gedhe, Makam Raja-raja, kawasan Kaliurang, pantai parangtritis, dan pantai di kawasan Gunung Kidul. Destinasi yang bersifat kontemporer ialah kawasan pasar Beringharjo, Tugu pal putih, Museum, Titik Nol Malioboro, dan wisata seni budaya, serta wisata kuliner. Sarana dan prasarana yang berada di Yogyakarta juga mengalami perkembangan yang pesat berdasarkan dari data statistik tempat penginapan di Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Jumlah Penginapan di Yogyakarta

No	Kategori	Jumlah
1.	Hotel Bintang	96
2.	Hotel Non Bintang	589

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017.

Secara umum, rata-rata lama tinggal tamu yang menginap di Yogyakarta adalah 2.08 hari (Dinas Pariwisata DIY, 2017:xviii). Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tempat penginapan sampai tahun 2019 terus menerus dilakukan dengan berdirinya berbagai hotel dan penginapan di wilayah Yogyakarta. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 308.485 dan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 3.813.720. Sedangkan karakteristik wisatawan nusantara secara usia didominasi usia di bawah 25 tahun, secara pekerjaan ialah karyawan. Adapun lokasi kunjungan yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan nusantara ialah kota Yogyakarta sebesar 48%, kemudian lokasi kunjungan wisatawan terbesar kedua adalah Kabupaten Sleman yaitu sebesar 20%, Kabupaten Bantul

sebesar 14 %, Kabupaten Gunungkidul sebesar 11% dan kunjungan wisatawan paling sedikit di Kabupaten Kulon Progo sebesar 7%. Kajian Sulistya menunjukkan bahwa trend perkembangan pariwisata di DIY pada periode 2006-2014 memberikan indikasi yang positif bahwa trend jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke DIY mengalami kenaikan rata-rata 15,72% dan wisatawan domestik mengalami kenaikan sekitar 20,29% (Sulistya, 2016). Hasil penelitian Hasibuan menunjukkan bahwa fenomena pariwisata yang terjadi di DIY adalah *booming* wisata *weekend* (akhir pekan). Fenomena tersebut dapat dilihat dari pergerakan wisatawan nusantara yang tinggi menuju Yogyakarta pada hari Jumat dan/atau Sabtu dari arah Semarang dan Solo serta pergerakan wisatawan nusantara kembali ke daerah asal pada hari Minggu (Hasibuan, 2005:2).

2. Kebijakan Pariwisata DIY

Kebijakan Pariwisata DIY yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merujuk ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: a).destinasi Pariwisata, b). Pemasaran Pariwisata;c). Industri Pariwisata;d). Kelembagaan Kepariwisataan. Dalam meresponse Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi DIY menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025. Pada pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa *Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.* Pasal ini memberikan penegasan bahwa Pembangunan Kepariwisataan daerah adalah mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Istilah kesejahteraan masyarakat yang dimunculkan dalam Rencana Induk tersebut sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila pada sila kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Konteks keadilan sosial dapat dicapai melalui kesejahteraan sosial yang adil, makmur, dan merata.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan Pariwisata Daerah meliputi: perwilayahan destinasi pariwisata daerah, pembangunan daya tarik wisata, pembanguna

fasilitas umum dan pariwisata, pembangunan aksesibilitas, dan/atau transportasi, pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan, dan pembangunan investasi di bidang Pariwisata (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, pasal 8). Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata tahun 2016 juga menjelaskan bahwa Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep yang sebaiknya dipakai sebagai landasan adalah: Pariwisata yang berbasis masyarakat *(community based tourism)* dan Pariwisata berkelanjutan (Dinas Pariwisata DIY, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2016:12).

Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata yang ada di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY. Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata pada pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata memiliki fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata; b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata; c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata; d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata; e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata; f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota; g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata; h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata; i. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata; j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peraturan Gubernur ini telah membawa arah dan strategi kebijakan pariwisata di Yogyakarta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian terkait kebijakan Pariwisata di DIY menunjukkan bahwa kebijakan Pariwisata di DIY memiliki konsistensi, komitmen dan aktualisasi terhadap nilai-

nilai Pancasila khususnya sila kelima. Konsistensi kebijakan Pariwisata DIY dapat ditunjukkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat merujuk dari Undang-Undang yang lebih tinggi. Komitmen kebijakan Pariwisata DIY menunjukkan orientasi dan mengarahkan pada kesejahteraan rakyat dan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Arliman S, Laurensius. 2018. "Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018),* pp. 273-294.

Dinas Pariwisata DIY. 2016. *Executive Summary Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan DIY dan Sekitarnya,* Yogyakarta: PT. Kertagana. Hal.5.

Dinas Pariwisata DIY.2016. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.* Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.

Dinas Pariwisata DIY. 2017. *Statistik Kepariwisataan DIY*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.

Dinas Pariwisata DIY. *Executive Summary, Pembelanjaan Wisatawan*. Yogyakarta: CV. Saka Konsultan.

Hasibuan,Frida. H. 2005. Optimalisasi Pelayanan Pariwisata Propinsi Di Yogyakarta Saat Weekend-Weekdays Berdasarkan Segmentasi Wisatawan Nusantara. *Tugas Akhir*. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.

Nielsen.2016. *2016 Industry Report.*World Tourism Forum and The Neilsen Company.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata.

Sulistya, Albertus.B.2016. Trend Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2014. *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Simanjutak, B.A., Tanjung.F., Nasution, R. 2017. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Obor.

UNWTO. 2018. UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition. Sumber: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876, akses, 20 Januari 2019, 11:50.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Wiratama,Adhi.C. 2017. "Studi Deskriptif Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Tulungagung", *Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2017. Pp.1-10.*

Internet:

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_290818.aspx, diakses 30 Januari 2019, 20:57.

https://tourism.binus.ac.id/2017/04/20/4-pilar-pembangunan-kepariwisataan-indonesia/, diakses 30 Januari 2019, 21:00.

http://www.worldtourismforum.net/reports/, diakses 30 Januari 2019, 21:16.

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik

Rabiatul Adawiyah[1], Titi Fitrianita[2], Siti Kholifah[3]

Merarik (kawin lari) merupakan tradisi yang dipertahankan sebagian besar Suku Sasak. Awalnya, tradisi ini merupakan upaya menyelamatkan perempuan dari kejahatan Raja Anak Agung Made Karangasem. Namun, seiring waktu tradisi itu berubah. Tulisan ini berupaya untuk melihat perubahan merarik yang terjadi di Dusun Nyurlembang Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka feminis, terlihat bahwa merarik menyebabkan kekerasan kultural pada perempuan.. Pihak perempuan seringkali tidak mampu melakukan penolakan pada laki-laki yang mengajak merarik. Merarik menjadi jalan keluar bagi laki-laki yang tidak siap secara ekonomi sehingga posisi perempuan menjadi lebih rentan. Merarik memunculkan konflik karena *pertama*, keluarga perempuan tidak menyetujui calon menantunya namun terpaksa menerima demi menghindari aib. *Kedua*, negosisasi *pesuke* (uang pemberian keluarga laki-laki kepada perempuan) melemahkan pihak keluarga perempuan karena harus menerima berapapun *pesuke* dari keluarga laki-laki. Merarik menjadi pernikahan yang sah secara agama dan adat sehingga membuat Suku Sasak seringkali tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Kondisi ini menjadi salah satu sebab yang memudahkan laki-laki melakukan poligami karena tidak ada hukum legal formal yang mengatur. Di tengah permasalahan itu, muncul alternatif yakni dengan melamar yang menjanjikan cara yang lebih baik namun cara ini belum diterima sepenuhnya karena merarik dianggap budaya leluhur Suku Sasak.

Kata kunci : merarik, women, Sasak

[1] Email penulis : aladawiyahrabiatul45@gmail.com

[2] Email penulis : ifah_18@yahoo.com

[3] Email penulis : titifitrianita@gmail.com

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya. Email:

© Rabiatul Adawiyah, Titi Fitrianita, Siti Kholifah, 2019

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.35-58.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):

Adawiyah, Rabiatul., Fitrianita, Titi & Kholifah, Siti. 2019. "Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik" Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 35-58.

DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.04

Merarik is a tradition which has been maintained by Sasak since a long time. In the beginning, this tradition was an effort to save women from immorality of Anak Agung Made Karangasem, the king of Lombok. But the aim of this tradition started to change. This paper tries to analyze the change of merarik in Nyurlembang Village, Narmada, West Lombok. Using qualitative descriptive and feminist approach, this paper found that merarik causes cultural violence for women. Sasak women finds themselves hard to refuse merarik. Merarik becomes the best way for men to overcome financial problem due to their lack of economic ability and makes women become vulnerable after married. Merarik also raises conflict because of two factors. First, the Sasak women's family has to accept their son in law even if they don't like him to avoid disgrace. Second, Sasak women's family has to accept *pesuke* (money given by men's family) whatever they have. Sasak often not register their marriage in KUA because merarik becomes legal marriage in religion and custom. This situation enables men do poligamy. In the middle of the merarik problem, proposal becomes a better alternative for women, but proposal not fully received because it is not their own culture.

Keywords : women, Sasak, merarik

Pendahuluan

Pada banyak budaya, pernikahan menjadi satu proses kehidupan yang berarti karena lewat pernikahanlah kehidupan baru ditandai dan kedewasaan penuh diperoleh laki-laki dan perempuan. Sebelum pernikahan itu sendiri terdapat prosesi atau ritual yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Sudiyat (Parlindungan, 2004 : 20-22) mencatat 3 proses menuju pernikahan yang biasa terjadi yaitu lamaran, perkawinan lari bersama, dan kawin lari. Lamaran dan kawin lari adalah dua proses menuju pernikahan yang lebih banyak dikenal di Indonesia.

Suku di Indonesia lebih banyak menggunakan lamaran sebelum pernikahan. Namun kawin lari sebelum pernikahan sesungguhnya dilangsungkan juga mendapatkan tempat di Indonesia. Masyarakat Suku Lampung Pepadun misalnya melakukan kawin lari *semambang* sebagai alternatif untuk menghindari proses lamaran yang memakan banyak biaya terkait dengan syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta oleh pihak

perempuan. Meskipun kawin lari ini sah secara adat namun cara ini tidak dibenarkan oleh adat (Parlindungan, 2004 : 47).

Berbeda dengan Suku Lampung Pepadun, kawin lari justru adalah bagian adat yang sah dan harus untuk dilakukan oleh Suku Sasak dan dalam budaya Sasak sendiri secara adat tidak mengenal konsep lamaran. Jika kawin lari di Suku Lampung Pepadun adalah upaya yang dilakukan oleh laki-laki karena tidak mampu memenuhi syarat adat yang ditentukan (Parlindungan, 2004 : 67) kawin lari Suku Sasak justru dianggap sebagai ajang pembuktian kualitas laki-laki – keberanian, kehebatan, dan kejantanan (Adnan, 2004 : 59).

Kawin lari disebut *merarik* oleh Suku Sasak. *Merarik* diawali dengan membawa lari calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki pada waktu malam hari berlangsung setelah magrib, secara diam-diam keluar dari rumahnya, tanpa sepengetahuan kedua orang tua calon mempelai perempuan. Pemuda-pemudi Sasak biasanya memanfaatkan momen wisata dan rekreasi setelah lebaran untuk pergi *merarik*, karena cara ini lebih mudah daripada harus melarikan anak gadis dari rumahnya (Anonim, 2013).

Tidak jarang perempuan yang dibawa *merarik* masih belia, baru lulus SMA, atau di usia kurang dari 18 tahun dimana mereka belum memiliki persiapan untuk melangsungkan pernikahan. Akibatnya banyak terjadi pernikahan dini pada perempuan sehingga berpengaruh pada ketidaksiapan psikologis pasangan terutama bagi perempuan untuk membina sebuah keluarga hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya banyak perceraian pada masyarakat Suku Sasak[2]

Merarik yang dilaksanakan mendadak dan tanpa perencanaan yang matang menyebabkan keluarga kedua calon mempelai harus mempersiapkan acara pernikahan dalam waktu yang singkat segera setelah *merarik* dilakukan sehingga tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga. Meskipun *merarik* meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat (Aniq, 2013 : 2322) namun *merarik* tetap dipertahankan karena konsep kesetiaan terhadap tradisi Suku Sasak (Adnan, 2004 : 64).

Tulisan ini berusaha untuk menganalisis praktik *merarik* yang terjadi di Desa Nyurlembang, Narmada, Lombok Barat dimana hampir keseluruhan warga melakukan *merarik*. Penelitian mengenai praktik *merarik* sebenarnya telah dilakukan oleh Adnan. Adnan (2004 : 4) melacak praktik *merarik* di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kecamatan Ampenan secara kultural adalah sebuah kota provinsi yang terbuka dengan banyak

perubahan. Suku Sasak yang tinggal di kota ini sudah mulai menerima lamaran dan meninggalkan tradisi *merarik*. Sedangkan Suku Sasak di pedesaan masih menganggap tabu istilah lamaran dan cenderung lambat menanggapi perubahan.

Penelitian ini melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Adnan. Jika Adnan lebih banyak menggali data praktik *merarik* di kota, penelitian ini lebih banyak berfokus pada praktik *merarik* yang ada di pedesaan jauh dari pusat kota dimana masyarakat di Dusun Nyurlembang masih begitu kuat memegang tradisi termasuk melakukan *merarik.*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diambil dengan menggunakan wawancara secara mendalam kepada 7 orang informan dengan kriteria warga Desa Nyurlembang, baik perempuan maupun laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan baik dengan melalui proses merarik ataupun lamaran., observasi non partisipan, dan data sekunder berupa dokumentasi, buku, artikel, dll. yang mendukung penelitian. Analisis data menggunakan analisis induktif dan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Merarik Dalam Tradisi Sasak

Secara etimologis, *merarik* berasal dari kata lari dalam bahasa Suku Sasak. *Merarinang* berarti *melaiang* atau dalam bahasa Indonesia melarikan, yaitu laki-laki melarikan perempuan untuk dijadikan isteri (Saladin, 2013 : 23). Istilah *merarik* yang diartikan sebagai kawin lari menyebar di seluruh Pulau Lombok meskipun di beberapa tempat istilah tersebut berbeda karena perbedaan logat setiap desa yang memiliki keragaman jenis pengucapan.

Merarik merupakan budaya khas Suku Sasak dalam memulai memilih pasangan untuk dinikahi dan awal membangun keluarga. Praktik ini tersebar di seluruh Pulau Lombok namun di beberapa tempat terdapat penyebutan berbeda atas istilah *merarik* ini. Di Kecamatan Ampenan, Suku Sasak memberikan istilah *marari* (Adnan, 2004 : 2). Ada pula yang menyebutnya *kerarikan*. Sedangkan Suku Sasak di Desa Nyurlembang mayoritas menyebut *merarik*. Aniq (2013 : 2324) menjelaskan *merarik* berikut ini

> Kawin lari biasanya diartikan sebagai bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kedua belah pihak dari sepasang pemuda dan pemudi sebagai

> jalan keluar bagi mereka untuk menikah. Namun dalam tradisi masyarakat Sasak dimana tradisi kawin lari dikenal dengan *merarik*, kawin lari memiliki pemaknaan yang khas. Masyarakat Sasak mengartikan *merarik* sebagai proses pernikahan yang didahului dengan membawa lari atau "menculik" seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan. Istilah *merarik* sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata merarik, di antaranya; "berari" yang berarti berlari. Yaitu seorang lelaki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah *merarik* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Merarik awalnya adalah istilah Suku Sasak yang digunakan untuk menyebut tindakan membawa lari gadis dengan maksud untuk dinikahi. Dalam perkembangan selanjutnya *merarik* mengalami perluasan makna dan digunakan untuk menyebutkan seluruh rangkaian pernikahan dalam Suku Sasak. Hal tersebut terlihat misalnya dalam percakapan sehari-hari Suku Sasak untuk menanyakan seseorang sudah menikah ataukah belum dengan cukup bertanya apakah yang bersangkutan sudah *merarik* ataukah belum (Aniq, 2013 : 2325).

Tradisi kawin lari atau *merarik* merupakan tradisi Suku Sasak yang didapatkan secara turun temurun yang menjadi awal proses pernikahan. Dalam tradisi ini seorang pemuda melarikan atau menculik anak gadis yang akan dijadikan calon istri. *Merarik* merupakan pertanda awal ritual perkawinan yang dilakukan hanya pada malam hari dan biasanya dilakukan setelah magrib. Tidak diperbolehkan secara adat melakukan *merarik* pada siang hari. Jika *merarik* dilangsungkan pada siang hari, sanksi adat akan diberikan. Selain itu, pasangan yang melakukan *merarik* pada siang hari dianggap tidak memiliki nyali besar sehingga pasangan yang melakukan *merarik* mendapatkan bukan hanya sanksi adat namun juga sanksi sosial berupa gunjingan atau sindiran.

Sebelum *merarik* dilangsungkan biasanya sepasang muda mudi telah lebih dahulu bersepakat jam dan hari melakukan *merarik*. Dengan demikian, *merarik* menjadi rahasia yang hanya pasangan yang bersepakat itulah yang mengetahuinya. Proses ini dirahasiakan dari kedua orang tua calon mempelai untuk mencegah pembatalan *merarik.* Sang gadis lantas

dilarikan ke tempat keluarga calon suami yang jauh dari desa atau dusun si gadis dan atau dusun calon suaminya (Daliem, 1981 : 27).

Dalam tradisi *merarik* ada beberapa tahap adat yang harus dilakukan. *Pertama, midang* merupakan proses pendekatan dimana seorang pemuda datang ke rumah perempuan. Biasanya kunjungan ini dilakukan pada malam Kamis dan malam Minggu. *Kedua, merarik* yaitu proses dimana laki-laki dan perempuan mengadakan perjanjian untuk bertemu kemudian bersembunyi di *penyeboan* (tempat persembunyian yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat dekat pihak laki-laki). *Ketiga, selabar* dan *majetik* merupakan proses dimana keluarga pihak laki-laki melaporkan kepada kepada dusun asal calon pengantin perempuan dan pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak laki-laki mereka telah melakukan *merarik* dengan anak perempuan mereka. Dalam proses ini terjadi perundingan untuk membuat kesepakatan menentukan proses adat selanjutnya yaitu *ijab kabul, sorong serah,* dan *nyongkolan.*

Keempat, mbait wali yaitu proses menjemput wali untuk menikahan perempuan pada saat pelaksanaan *ijab kabul*. *Kelima, aji karma* atau *sorong serah* yaitu prosesi simbol untuk memberi dan menerima pengantin di dalam perkawinan. *Keenam, nyongkolan* yaitu iring-iringan keluarga laki-laki menuju keluarga perempuan yang diiringi dengan alunan musik tradisional Suku Sasak yang disebut *gendang beleq*. Prosesi keenam ini adalah prosesi terakhir dari keseluruhan ritual adat *merarik.*

Sejarah Merarik

Ada 2 pendapat mengenai asal asul *merarik*. Pendapat pertama menyatakan *merarik* merupakan tradisi asli Suku Sasak jauh sebelum Bali melakukan invansi dan penguasaan Lombok pada tahun 1740 dan melakukan penguasaan selama 100 tahun. Pendapat kedua menyatakan bahwa *merarik* merupakan tradisi hasil pengaruh Bali karena Suku Sasak pernah dijajah dalam waktu yang cukup lama (Aniq, 2012 : 2325). Pendapat pertama terangkum dalam cerita berikut.

Bali pernah menjajah Lombok khususnya Lombok bagian barat. Narmada sebagai salah satu kecamatan yang ada di daerah Lombok Barat merupakan salah satu pusat kekuasaan Bali pada masa itu. Kolonial Bali (Anak Agung) yang datang ke Lombok pada masa itu juga mempraktikan budaya kawin lari bahkan merupakan adat yang sudah

dijalankan oleh para leluhur mereka beserta dengan masyarakatnya (Saladin, 2013 : 27). Berdasarkan cerita dari masyarakat Desa Nyurlembang, mengenai masa kekuasaan Anak Agung. Anak Agung banyak melakukan penindasan terhadap masyarakat Sasak.

Salah satu bentuk penindasan Anak Agung ialah ia mengutus para prajuritnya untuk mengumpulkan para gadis yang masih lajang atau belum menikah untuk dikumpulkan di Telage Beleq (sebuah telaga yang berada di dalam Taman Narmada). Semua gadis dikumpulkan setelah itu para gadis diharuskan untuk mandi di Telaga Belek dalam keadaan telanjang. Anak Agung Made Karangasem selanjutnya tinggal menunjuk gadis mana yang ingin ditidurinya.

Anak Agung Made Karangasem tidak segan-segan mengutus prajuritnya untuk membunuh gadis tersebut apabila melakukan penolakan. Kesewenang-wenangan Anak Agung Made Karangasem mendorong orang tua Suku Sasak pada masa itu untuk meminta anaknya menikah dengan pasangan yang dicintainya dengan cara melarikan diri karena tidak ingin anaknya menjadi korban kesewenang-wenangan Anak Agung.

Suku Bali yang beragama Hindu dipercaya memberikan pengaruh yang besar pada Suku Sasak selama periode penguasaannya tersebut. Unsur kebudayaan Bali dalam bentuk kebiasaan, bahasa, kesenian, dan kerajinan melebur dengan budaya Suku Sasak. Pendatang dari Pulau Bali yang sudah tinggal, dan menetap di Lombok selama ratusan tahun menempati daerah-daerah di sekitar Mataram, Cakranegara, Ampenan dan Narmada. Peleburan budaya lebih terlihat di Lombok Barat karena Suku Bali yang tinggal di Lombok Barat lebih kuat memegang adat istiadat asalnya dibandingkan Suku Bali yang tinggal di Pulau Bali (Amin, 1997 : 35).

Tradisi kawin lari yang dilakukan oleh Suku Sasak dipercaya berasal dari adopsi tradisi kawin lari Suku Bali yang datang ke Lombok pada masa itu. Tekanan pemerintahan Anak Agung membuat adopsi tradisi kawin lari tersebut semakin mengkristal. Pendapat lain terkait asal usul tradisi kawin lari menyebutkan bahwa kawin lari merupakan tradisi milik asli Suku Sasak yang telah dipraktekkan jauh sebelum Bali datang ke Lombok. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi kawin lari yang disebut sebagai tradisi asli Suku Sasak mengalami peleburan dengan agama Islam yang masuk ke Pulau Lombok di kemudian hari.

Pendapat lain terkait asal usul tradisi kawin lari menyebutkan bahwa kawin lari merupakan tradisi milik asli Suku Sasak yang telah dipraktekkan jauh sebelum Bali datang

ke Lombok. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi kawin lari yang disebut sebagai tradisi asli Suku Sasak mengalami akulturasi dengan agama Islam yang masuk ke Pulau Lombok di kemudian hari. Suku Sasak yang beragama Islam, diharuskan untuk mengucapkan *ijab kabul* terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat Islam barulah pasangan diperbolehkan untuk tinggal bersama. Selama pasangan belum menikah menurut ketentuan agama, mereka tidak diperbolehkan tinggal bersama untuk menghindari hubungan seksual di luar pernikahan yang sering disebut zina.

Praktik Merarik Setelah Berakhirnya Okupasi Bali

Setelah kekuasaan Raja Bali runtuh Lombok dijajah oleh Belanda pada abad 19 (1984). Penjajahan Belanda tidak menyebabkan perubahan praktik kawin lari. Kawin lari tetap berlangsung di Lombok bahkan praktik kawin lari menyebabkan perempuan Suku Sasak jauh lebih terdominasi dibandingkan masa sebelumnya. Kawin lari banyak dilakukan tanpa kesepakatan si perempuan. Banyak pernikahan terjadi karena perempuan dibawa lari begitu saja dan hanya berdasarkan keinginan laki-laki. Cara yang dilakukanpun sangat memaksa perempuan. Perempuan dipaksa untuk dibawa lari dan mendapatkan kekerasan ketika *merarik* dilangsungkan. Pada masa itu laki-laki bekerja sama untuk membantu temannya membawa lari perempuan yang ingin dinikahinya. Praktik kawin lari semacam ini tidak jelas kapan awal mulanya namun di Desa Nyurlembang praktik ini berakhir hingga sekitar tahun 1980-an. Muncul kesadaran di antara laki-laki dan perempuan Suku Sasak bahwa menkah harus didasarkan atas keinginan diri sendiri, bukan karena paksaan. Hak individu atas pemilihan pasangan menjadi lebih kuat dibandingkan sebelum tahun 1980-an.

> *Ye tetep jari dakak ne ngamok, missal lek pesebokan, arak dateng dukun misalne, adekne ngakah ngamok, laek secare adat amun nengke kan ngkah ne berlaku sengenono.Mun nengke ye lekakan dirik doang nengke* (Pernikahan pasti akan tetap terjadi, misalkan pada saat berada di tempat persembunyian, akan didatangkan dukun agar calon pengantin perempuan tidak mengamuk, tapi itu dulu, untuk sekarang cara seperti itu sudah tidak berlaku. Untuk saat ini mereka tidak dipaksakan tetapi berdasarkan keinginan sendiri) (wawancara dengan Sudarman, 23 Agustus 2015).

Merarik merupakan sebuah proses mengawali perkawinan yang berprinsip pada kebebasan bagi laki-laki atau perempuan Suku Sasak dalam memilih pasangan mereka terutama setelah tahun 1980-an. M*idang* memungkinkan orang tua perempuan untuk mengetahui laki-laki mana saja yang sedang mendekati anak perempuannya yang berpotensi menjadi menantu mereka. Dari *midang* inilah biasanya perempuan Suku Sasak memilih laki-laki yang ia inginkan untuk menjadi calon suaminya dan merencakan *merarik* tanpa sepengetahuan orang tua perempuan karena demikianlah yang diharuskan di dalam adat. Adnan (2004 : 50) menyebutkan bahwa *midang* merupakan bentuk kebebasan perempuan karena di tangannyalah pilihan *merarik* dengan laki-laki yang ia inginkan ditetapkan.

Merarik merupakan proses pembuktian bahwa sebagai laki-laki Sasak bahwa ia memperjuangkan perempuan yang mereka cintai dengan sepenuh hati karena dia harus menantang bahaya melarikan anak perempuan tanpa pengetahuan orang tua. Sementara bagi perempuan Suku Sasak *merarik* adalah proses dimana dirinya merasa tersanjung karena telah diperjuangkan oleh laki-laki yang menginginkannya dan menandakan kekuatan dirinya sendiri dalam memilih pasangan yang ia inginkan lepas dari keinginan orang tua.

Sekilas perempuan Sasak terlihat memiliki kekuasaan yang berimbang dengan laki-laki Sasak dalam proses *midang* apalagi jika *merarik* adalah kesepakatan kedua belah pihak. Namun, segera setelah *merarik* berlangsung, superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan menjadi sangat nyata. Hal ini terlihat dalam keseluruhan praktik *merarik* dari *merarik* itu sendiri hingga *nyongkolan* hingga berujung ketika kehidupan rumah tangga yang sebenarnya dimulai. Patriarki adalah logika budaya yang tidak hanya dianut oleh laki-laki Suku Sasak namun juga dipertahankan oleh perempuan Suku Sasak itu sendiri lewat *merarik*. Demikianlah yang terjadi di Desa Nyurlembang.

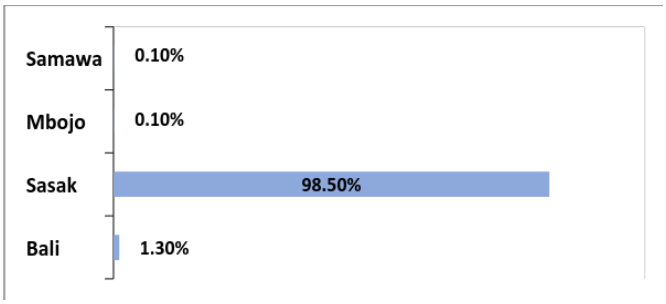
Desa Nyurlembang

Desa Nyurlembang secara administratif berada di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini terdiri dari 4 dusun yaitu Nyurlembang Daye, Nyurlembang Barat, Telaga Ngembeng, dan Tatar. Total pendatang di Desa Nyurlembang sebanyak 1,4% dari jumlah total keseluruhan penduduk sebanyak 3.588 jiwa. Pendatang terbesar dari Bali yaitu sebanyak 1,3%, sementara sisanya masing-masing 1% pendatang dari Suku Mbojo, dan Samawa. Penduduk terbesar adalah Suku Sasak yaitu

sebanyak 98,4% dari total jumlah penduduk di Desa Nyurlembang. Berikut adalah tabel etnis penduduk Desa Nyurlembang, Berdasarkan profil Desa Nyurlembang tahun 2014.

Grafik 1 Penduduk Desa Nyurlembang Berdasarkan Etnis

N = 3,588



Sumber: Profil Desa Nyurlembang, 2014

Terdapat 3 agama yang dianut oleh masyarakat Suku Sasak yang tinggal di Desa Nyurlembang, yaitu Agama Islam, Agama Hindu, dan Agama Kristen. Penganut Agama Islam adalah yang terbanyak di Desa Nyurlembang yaitu sebanyak 98,5%, Kristen 0,2%, dan Hindu sebanyak 1,3%. Masyarakat yang beragama Hindu sekaligus merupakan pendatang dari Bali.

Komposisi penduduk Desa Nyurlembang dimana mayoritas adalah Suku Sasak dan beragama Islam menjadi faktor yang sangat menentukan dalam bertahannya praktik *merarik. Merarik* adalah budaya yang tidak bisa dipisahkan dari Suku Sasak. Menjadi Suku Sasak berarti harus melestarikan budaya *merarik*. Oleh karena itulah, mayoritas Suku Sasak yang tinggal di Desa Nyurlembang mempraktikkan *merarik*.

Lamaran yang mulai menjadi hal yang biasa untuk dilakukan di daerah kota seperti Mataram dan Ampenan nyatanya masih menjadi hal yang tabu untuk dilakukan di Desa Nyurlembang. Masyarakat di Desa Nyurlembang masih memiliki anggapan yang kuat bahwa melamar sama halnya dengan meminta anak gadis. Melakukan lamaran sama saja memperjual belikan anak ayam yang bisa diperjual belikan begitu saja, "memang anak saya anak ayam yang bisa diperjual belikan begitu saja" begitulah anggapan masyarakat mengenai lamaran (Daliem, 1982 : 30). Bagi mereka, anak perempuan haruslah diperjuangkan oleh laki-laki seperti di dalam proses *merarik.* Maka, *merarik* adalah cara yang tepat dan cara yang diharapkan dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka meskipun praktik *merarik* menimbulkan banyak konflik.

Praktik Merarik Suku Sasak Desa Nyurlembang

Dalam pembicaraan sehari-hari masyarakat di Desa Nyurlembang, *merarik* merupakan salah satu bahasan yang sering diperbincangkan. Kejadian-kejadian di seputar *merarik* adalah cerita yang selalu hidup dalam kehidupan keseharian di Desa Nyurlembang. Hal ini menunjukkan bahwa *merarik* merupakan kenyataan kultural yang secara objektif hadir dan penting di dalam kehidupan Suku Sasak di Desa Nyurlembang.

Merarik bagi laki-laki Suku Sasak adalah proses budaya yang sangat penting. Kebanyakan masyarakat Suku Sasak menjelaskan bahwa *merarik* pada umumnya secara kultural dapat dianggap sebagai cara yang disepakati laki-laki untuk membuktikan kelaki-lakiannya (Adnan, 2004 : 59) dan menunjukkan harga diri seorang laki-laki. Pendapat semacam ini juga ditemukan pada masyarakat Desa Nyurlembang.

Merarik merupakan adat yang harus dilakukan sebagai upaya untuk menghargai keluarga perempuan. Hal tersebut berhubungan dengan adanya *pesuke* yang harus dibayarkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Bagi Suku Sasak sangat tidak sopan apabila "harga" perempuan langsung dibicarakan seperti yang dilakukan apabila lamaran dilakukan. Padahal penentuan *pesuke* terindikasi sebagai proses komersialisasi perempuan (Aniq, 2012 : 2331). Hal ini terindikasi dari semakin tinggi tingkat status sosial, budaya, dan ekonomi keluarga perempuan, *pesuke* yang diminta juga akan semakin tinggi. Jenis pekerjaan dan pendidikan perempuan yang melakukan *merarik* juga menjadi faktor penentu besaran *pesuke* yang harus dibayarkan, semakin tinggi prestise jenis pekerjaan dan semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan, *pesuke* yang dibayarkan pun akan lebih tinggi (Haq & Hamdi, 2016 : 165).

Kondisi di atas seiring dengan tuntutan budaya yang dibebankan kepada laki-laki Suku Sasak. Murdan (2015 : 104) menyebutkan istilah yang lazim di Suku Sasak "jika seseorang mempunyai anak laki-laki kemudian dia menikah, maka dia akan membuat 2 *taring* (tenda pesta pernikahan) yakni di rumahnya sendiri (*begawe)* dan di rumah ibu/bapak istrinya (*mentoak*)". Dengan demikian beban ekonomi keluarga laki-laki jauh lebih besar dibandingkan keluarga perempuan ketika *merarik* dilakukan. Maka, idealnya, laki-laki (dan keluarganya) yang melakukan *merarik* memiliki kemampuan ekonomi yang cukup atau lebih

untuk menanggung semua tanggungjawab budaya yang harus dilakukannya setelah mengajak seorang perempuan *merarik*.

Konsep *merarik* yang demikian diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan membuat *merarik* menjadi praktik yang paling benar untuk dilakukan untuk mengawali pembentukan sebuah keluarga. Dalam proses tersebut keluarga memainkan peranan penting dalam proses internalisasi (Rabiatul, 2016 : 87). Ketika mayoritas orang tua melakukan *merarik* sebagai awal proses membangun sebuah keluarga maka anak-anak mereka juga diharapkan melakukan hal yang sama. Keluarga dengan demikian menjadi agen yang sangat penting dalam menanamkan dan memastikan kepatuhan budaya Sasak pada generasi selanjutnya.

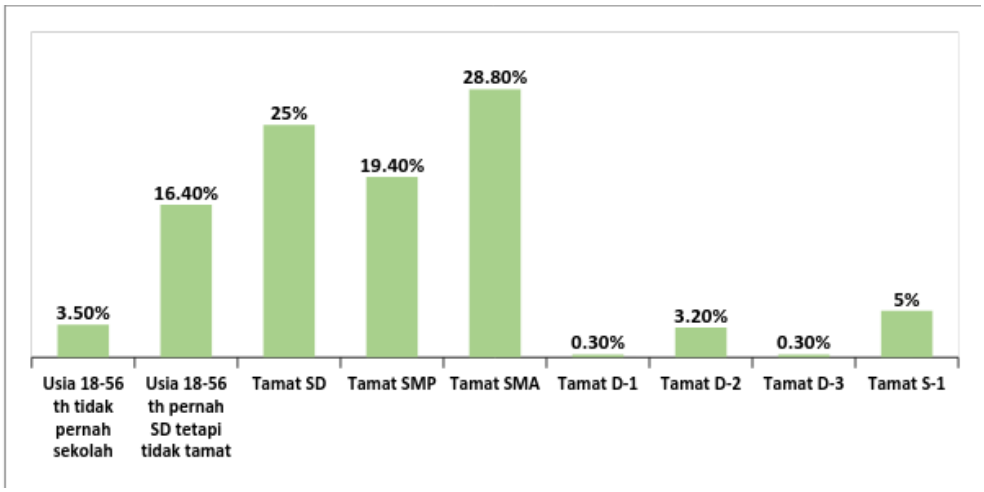
Laki-laki dan perempuan di Desa Nyurlembang lahir dan tumbuh dalam budaya Sasak dan sedikit mendapatkan alternatif berkehidupan di luar budaya yang telah dikenal seumur hidupnya. Kalaupun alternatif berkehidupan dikenal lewat hadirnya teknologi dan informasi terutama akses terhadapa media sosial namun ikatan-ikatan budaya yang ada rupanya tidak mudah untuk dilepaskan. Kuatnya praktik *merarik* yang diinternalisasikan dari satu generasi ke generasi diikuti dengan harapan dari orang tua agar anaknya menikah dengan sesama Suku Sasak sehingga identitas sebagai orang Sasak bertahan.

Internalisasi kepatuhan budaya selanjutnya ditegakkan oleh masyarakat terutama kepada laki-laki dan perempuan yang menginjak remaja atau dewasa yang berpotensi untuk melakukan *merarik.* Masyarakat melakukan pengawasan lebih kepada laki-laki yang datang ke rumah perempuan pada malam hari terutama yang melebihi kepantasan waktu berkunjung. Biasanya masyarakat (tetangga dekat) akan menyebut laki-laki tersebut berpacaran dengan perempuan yang rumahnya ia datangi. Ketika masyarakat telah menyebut laki-laki dan perempuan tersebut berpacaran pengawasan kepada masyarakat kepada keduanya lebih ketat untuk menghindarkan mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh pasangan yang belum menikah terutama berhubungan seksual karena agama Islam tidak memperbolehkan zina.

Tingginya tingkat pendidikan Suku Sasak di Desa Nyurlembang rupanya juga tidak berpengaruh secara signifikan pada perubahan praktik *merarik*. Berikut ini tabel tingkat pendidikan masyarakat di Desa Nyurlembang.

Grafik 2. Penduduk Desa Nyurlembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

N = 1,901



(Sumber: Profil Desa Nyurlembang, 2014)

Dari tabel di atas prosentase tingkat pendidikan menengah (SMA) merupakan prosentase paling tinggi yakni sebesar 28,8% dari total jumlah penduduk 1.901 jiwa pada tahun 2014. Sedangkan total jumlah tingkat pendidikan tinggi D1/D2/D3/S1 sebesar 8,8%. Data di atas tidak menyebutkan lokasi institusi pendidikan tinggi yang menjadi tempat bagi 127 orang menyelesaikan pendidikan tingginya. Bila dikaitkan antara tidak tersedianya data nama institusi pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh masyarakat Desa Nyurlembang dan tidak adanya korelasi antara tingginya tingkat pendidikan dengan perubahan tradisi *merarik* maka muncul 2 alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Pertama, masyarakat Desa Nyurlembang menyelesaikan pendidikan tingginya di Lombok seperti di Universitas Mataram, dll. yang secara kultural masih kental dengan budaya Sasak sehingga *merarik* tetap menjadi pilihan utama untuk memulai berkeluarga. Kedua, beberapa pemuda/i Sasak memilih untuk mendapatkan pendidikan tingginya di luar Lombok seperti di Pulau Jawa yang menjadi pusat pendidikan di Indonesia. Namun, ketika kembali ke Lombok, harapan orang tua kepada mereka untuk menikah dengan sesama Suku Sasak masih kuat. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dengan memenuhi harapan mereka merupakan hal yang dijunjung tinggi di dalam Islam (Platt, 2012 : 174) dan menjadi faktor paling utama anak memutuskan untuk *merarik* atau tidak.

Ketika seorang anak memutuskan untuk mengikuti harapan orang tua dengan menikahi sesama Suku Sasak secara otomatis mereka diharapkan melakukan *merarik* sebagai tradisi yang sah dan harus dilakukan sebagai Suku Sasak. Menikahkan anaknya dengan orang luar Suku Sasak tidak pernah menjadi pilihan utama orang tua karena tradisi *merarik* menjadi begitu cair dan budaya yang telah ditetapkan menjadi kabur (Murdan, 2015 : 138). Harapan agar tidak menikah dengan orang luar Suku Sasak merupakan usaha melanggengkan struktur dan pranata budaya yang telah beratus tahun lamanya menjadi pegangan Suku Sasak di Desa Nyurlembang. Namun demikian, tradisi *merarik* rupanya tidak kebal terhadap perubahan. Beberapa unsur di dalam *merarik* berubah seiring perubahan di masyarakat yang lebih luas. Berikut beberapa perubahan praktik *merarik* di Desa Nyurlembang.

Tradisi *midang* yang awalnya selalu dilakukan dengan cara mendatangi rumah perempuan Suku Sasak perlahan mulai bergeser dan digantikan oleh teknologi. Gaya komunikasi tatap muka antara laki-laki dan perempuan terfasilitasi lewat hadirnya telepon pintar yang memungkinkan keduanya berkomunikasi tatap muka jarak jauh. Rencana *merarik* bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menjalin hubungan percintaan cukup dilakukan dengan perantaraan telepon pintar ini tanpa harus hadir secara langsung di rumah keluarga perempuan. Kehadiran teknologi terutama akses terhadap internet rupanya telah mengaburkan pengawasan masyarakat atas pergaulan laki-laki dan perempuan karena ketidakmampuan sistem pengawasan tersebut dalam menjangkau pergaulan keduanya di dunia maya lewat perantaraan teknologi. Dengan demikian laki-laki dan perempuan Suku Sasak bisa merencanakan *merarik* kapan saja, pada usia berapapun, dengan status sosial dan ekonomi manapun.

Hadirnya teknologi tidak hanya mengubah cara *midang* dilangsungkan namun juga ketika *merarik* dilaksanakan. Pada saat *merarik* berlangsung beberapa perempuan yang melakukan *merarik* menghubungi keluarga mereka melalui telepon dan mengabarkan bahwa mereka telah *merarik* namun merahasiakan tempat persembunyiannya. Sesaat setelah mengabarkan *merarik* telepon tersebut dimatikan dengan tujuan menghindari orang tua mengontak kembali anak perempuannya dan menghindari penolakan orang tua atas *merarik* yang dilakukan anak perempuannya dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah tidak menyetujui laki-laki yang akan menjadi menantunya.

Sebelum telepon hadir dan meluas penggunaannya pemilik rumah yang menjadi tempat persembunyian biasanya menjadi orang yang bertugas mengabarkan kepada kepala dusun setempat bahwa ada pasangan yang melakukan *merarik (selabar*). Setelah itu kepala dusun lokasi persembunyian akan menghubungi kepala dusun keluarga perempuan yang nantinya akan mengabarkan secara resmi kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka melakukan *merarik (majetik).*

Hadirnya teknologi berupa telepon memungkinkan orang tua perempuan di Desa Nyurlembang mengetahui lebih awal informasi *merarik* yang dilakukan oleh anaknya sebelum mendapatkan pernyataan resmi dari kepada dusun yang secara adat memiliki tugas untuk mengabarkan *merarik* kepada keluarga perempuan. Namun demikian, biasanya orang tua perempuan adalah pihak paling akhir yang mengetahui bahwa anaknya melakukan *merarik* sedangkan teman dekat perempuan menjadi orang pertama yang tahu *merarik*.

Meskipun orang tua tidak memberikan restu, bagi perempuan Sasak sekali melakukan *merarik* pantang untuk mundur karena gagal menikah atau tidak melanjutkan *merarik* ke tahapan budaya selanjutnya adalah sebuah aib terutama bagi perempuan dan keluarga perempuan. Pantang bagi perempuan yang telah dibawa kawin lari oleh laki-laki kembali ke rumah karena adanya anggapan bahwa apabila seorang perempuan kembali ke rumah dan tidak melanjutkan ke pernikahan setelah *merarik* mereka akan kesulitan untuk menemukan jodoh kembali dan sulit untuk menikah.

Pendapat di atas begitu kuat melekat di dalam benak Suku Sasak di Desa Nyurlembang karena realitas beberapa perempuan yang kembali ke rumah orang tuanya setelah *merarik* tidak jua menemukan jodoh hingga menjadi "perawan tua". Ketakutan menjadi "perawan tua"[4] menjadi salah satu sebab perempuan di Desa Nyurlembang segera menikah di usia muda. Pantang baginya untuk kembali ke rumah. *Merarik* tetap harus dilangsungkan hingga prosesi *nyongkolan*. Keyakinan pantang kembali ke rumah setelah

[4] Konsep perawan tua sangat terkait dengan harga diri seorang perempuan. Salah satu standar penghargaan kepada perempuan di Suku Sasak adalah menikah lewat *merarik* karena perempuan dianggap memiliki kriteria keperempuanan yang membuat laki-laki Sasak mengerahkan upayanya untuk menarik hatinya hingga mengajaknya untuk melakukan *merarik*. Dari sudut pandang biologi dan juga budaya, perempuan dipercaya memiliki fase kesuburan dan *sexual appealing* lebih singkat dibandingkan laki-laki. Oleh karena sumber daya yang dimilikinya terbatas waktu biasanya muncul ketakutan jika perempuan tidak menikah pada usia tertentu yang dianggap pantas menikah secara budaya.

merarik menjadi blunder bagi perempuan Suku Sasak terutama bagi mereka yang *merarik* dengan laki-laki yang tidak dicintainya.

Idealnya *merarik* dilakukan dengan dasar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan. Namun rupanya *merarik* tidak selalu dilakukan dengan cara demikian. Platt (2012 : 167-174) menceritakan beberapa kisah perempuan yang melakukan *merarik* dengan laki-laki yang tidak dicintainya dan terpaksa merampungkan semua proses *merarik* karena terlanjur. Perempuan tersebut lantas memilih untuk bercerai setelah beberapa tahun mencoba bertahan di dalam pernikahan dengan laki-laki yang tidak dicintainya.

Merarik harusnya merupakan momen bagi seorang perempuan menjadi agen bagi dirinya sendiri sehingga dia bisa memutuskan laki-laki mana yang akan dinikahinya. Lantas bagaimana mungkin seorang perempuan mau *merarik* dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Di Desa Nyurlembang beberapa perempuan melakukan *merarik* karena "dipaksa". Beberapa perempuan tersebut keluar bersama dengan laki-laki dan diajak paksa untuk *merarik* seketika itu juga. *Merarik* spontan dilakukan karena laki-laki tersebut menyenangi perempuan yang ia ajak *merarik* sedangkan perempuan tersebut tidak menyenangi laki-laki yang memaksanya untuk *merarik*. Karena perempuan tersebut tidak mungkin kembali ke rumah orang tua karena hal tersebut tabu untuk diilakukan maka *merarik* akan terus berjalan hingga prosesi adat selesai.

Mengingat aktor paling utama dalam *merarik* adalah laki-laki, teman sebayanya menjadi orang yang penting melaksanakan niat *merarik.* Dalam perbincangan dengan sebaya keinginan *merarik* dan bagaimana tradisi tersebut dijalankan merupakan hal afirmatif dan cita-cita yang dihidupkan untuk membangun sebuah keluarga di Desa Nyurlembang. Pengalaman orang tua dan pengalaman teman sebaya melakukan *merarik* merupakan hal yang terendap dalam alam bawah sadar berbudaya mereka. Ketika ada laki-laki yang meniatkan untuk *merarik* teman-teman sebayanya akan dengan senang hati membantu proses tersebut meskipun perempuan yang diinginkannya tidak mencintai laki-laki tersebut. Ketika hal ini terjadi, agensi perempuan Sasak dalam memilih laki-laki yang akan dijadikan suaminya sama sekali tidak berlaku. Yang terjadi justru *merarik* menjadi celah melemahkan perempuan.

Lemahnya posisi perempuan juga terlihat atas pilihannya menyetujui *merarik* dengan laki-laki yang dicintainya namun tidak siap secara finansial. Bagi perempuan Sasak,

menyetujui *merarik* dengan laki-laki yang belum siap secara finansial adalah usahanya untuk membantu laki-laki tersebut karena cinta. Karena jika harus siap secara finansial, keinginan menikah tidak akan segera terlaksana mengingat biaya untuk melangsungkan pernikahan sangat besar karena panjangnya ritual adat yang harus dilakukan. Dengan *merarik* keinginan untuk menikah akan mudah dilaksanakan. *Merarik* oleh karenanya adalah proses "memaksa" orang tua laki-laki agar menyediakan materi meskipun orang tua pihak laki-laki tidak memiliki uang dan berhutang untuk menyelesaikan prosesi adat.

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan Suku Sasak telah banyak mengkhawatirkan orang tua. Banyaknya *merarik* yang dilangsungkan karena perempuan telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah telah membuat orang tua Suku Sasak menyetujui *merarik* yang dilakukan oleh anaknya meskipun anaknya masih berada di bawah umur (di bawah 18 tahun). *Merarik* lantas menjadi usaha menutupi aib karena telah hamil sebelum menikah agar pasangan dan keluarga tidak mendapatkan gunjingan dari tetangga sekitar.

Ketika proses *merarik* berlangsung, orang tua anak perempuan akan merasa cemas karena anaknya tidak pulang ke rumah setelah lewat batas waktu yang telah ditetapkan. Orang tua biasanya menjadi orang yang paling akhir tahu bahwa anak perempuannya melangsungkan *merarik* dan akan sangat terkejut terlebih ketika mereka tidak pernah mendapati anak perempuannya memiliki pasangan. Rasa kecewa muncul karena biasanya mereka mengharapkan anak perempuan mereka menyelesaikan sekolah terlebih dahulu. Tidak seperti generasi sebelumnya yang bebas dan bahkan diharapkan melakukan *merarik* pada usia sangat muda (bahkan ada berusia12 tahun), orang tua Suku Sasak saat ini mengharapkan pendidikan yang terbaik untuk anak perempuan mereka agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

Ketika anak perempuan mereka tidak sesuai dengan harapan, orang tua akan kecewa dan marah dengan tindakan anak perempuannya. Budaya Sasak yang mewajibkan seorang anak menghormati, menuruti, dan meminta pendapat orang tua adalah bagian dari kewajiban anak. Sebaliknya kewajiban orang tua adalah memberikan kebijaksaan dan perlindungan kepada anak. Ketika *merarik* tanpa sepengetahuan orang tua dilakukan *merarik* lantas menjadi proses meretakkan hubungan sosial keduanya.

Konflik yang terjadi di dalam *merarik* tidak berakhir hanya antara orang tua perempuan dengan anaknya karena melakukan *merarik* tanpa sepengetahuannya orang tua padahal orang tua memiliki harapan tertentu padanya. Konflik lanjutan muncul pada saat negosiasi *pesuke*. Keluarga laki-laki harus membayar *pesuke* kepada pihak perempuan karena anak laki-lakinya telah melarikan anak perempuan mereka. Proses negosiasi *pesuke* ini adalah bagian dari tradisi dalam melangsungkan *merarik*.

Negosiasi ini bisa berlangsung alot karena jumlah uang yang diminta oleh keluarga perempuan tidak mampu dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki karena pihak keluarga perempuan meminta uang yang lebih banyak dari yang mampu dibayarkan oleh keluarga laki-laki. Namun, karena *merarik* tetap harus dilangsungkan segera dan tidak baik menunda pernikahan terutama terhalang jumlah *pesuke* maka mau tidak mau keluarga perempuan menyetujui jumlah uang yang diajukan oleh keluarga laki-laki untuk menghindarkan diri dari aib. Keluarga laki-laki dapat mengancam keluarga perempuan untuk mengembalikan anak gadis mereka jika keluarga perempuan sulit untuk negosiasi besaran pesuke. Dalam proses ini, pihak keluarga perempuan berada di posisi tawar yang lemah

Tetap berlangsungnya *merarik* meskipun diawali berbagai permasalahan bukanlah persoalan tuntutan budaya semata-mata. Ajaran agama yang telah menjadi bagian penting dalam budaya Sasak memainkan peranan yang tidak sederhana dalam menjaga kelangsungan tradisi ini. Wacana "telah datang jodoh" menjadi wacana yang dominan dan terus menerus dimunculkan ketika sepasang muda mudi melangsungkan *merarik* tanpa restu orang tua. Tuntutan melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik menjadi faktor penting mengapa orang tua perempuan mau tidak mau menerima laki-laki yang mengajak anak perempuannya *merarik* meskipun dalam hati menilai bahwa anak laki-laki tersebut tidak layak untuk anak perempuannya. Kepala dusun dan tokoh agama menjadi agen yang penting dalam melanggengkan pengetahuan ini. Keduanya berperan sebagai penjaga utama struktur dan pranata tradisi *merarik* di Nyurlembang.

Ketika rangkaian prosesi *merarik* yang panjang telah selesai dilaksanakan maka kepantasan adat telah selesai dilaksanakan. Namun, konflik akan kembali muncul ketika seiring dengan berjalannya waktu ternyata menantu laki-laki tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua perempuan entah karena permasalahan ekonomi atau kepribadian menantunya. Ketidakcocokan ini menjadi cikal bakal konflik yang berkepanjangan antara 2

keluarga. Perbedaan tingkat sosial dan ekonomi antara dua keluarga yang berujung pada sikap, pandangan, dan harapan untuk hidup yang berbeda antara menantu laki-laki dan anak perempuannya membuat permasalahan panjang dalam keluarga. Karena tuntutan dan harapan perempuan mengabdi kepada suami biasanya maka perempuan dan keluarga perempuan berada pada posisi inferior dibandingkan laki-laki dan keluarga laki-laki.

Praktik *merarik* saat ini terkesan sebagai upaya memaksakan kehendak pasangan yang dilakukan agar orang tua mau tidak mau menerima calon menantu mereka dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan acara pernikahan sang anak. Orang tua Suku Sasak dituntut untuk mempersiapkan pernikahan anaknya meskipun orang tua dalam keadaan belum siap untuk menyelenggarakan pernikahan baik terkait kesiapan finansial melangsungkan perkawinan, ketidaksiapan menerima calon menantu yang tidak mereka restui, dan tidak siap melepaskan anak perempuan mereka menikah karena mengharapkan anak perempuan mereka menyelesaikan sekolah.

Mudahnya proses *merarik* ini membuat celah mudahnya bagi laki-laki untuk menikah kedua kali tanpa persetujuan istri pertama. Meskipun tidak disetujui oleh istri pertama dan keluarga perempuan yang dilarikan, *merarik* tetap harus dilangsungkan karena aib bagi perempuan dan keluarga perempuan jika tidak melangsungkan *merarik*. Pada tingkat ektrem, jika perempuan yang dilarikan adalah perempuan bersuami, maka suami perempuan tersebut dipaksa menceraikan istrinya. Kasus ini pernah terjadi di Desa Nyurlembang dimana seorang perempuan bersuami dipaksa *merarik* oleh seorang laki-laki. Karena aib bagi perempuan kembali ke rumah maka setelah diskusi antara keluarga perempuan, keluarga laki-laki, kepala dusun, dan tokoh agama suami perempuan tersebut yang pada saat kejadian tengah bekerja menjadi TKI di Malaysia dipaksa menceraikan istrinya.

Banyak pernikahan yang diawali *merarik* di Nyurlembang tidak dicatatkan di KUA. Legalitas negara atas pernikahan dianggap tidak penting oleh Suku Sasak di Nyurlembang karena pernikahan *merarik* telah sah menjadi ikatan bagi suami istri berdasarkan agama dan budaya. Memperoleh legitimasi agama dan budaya atas pernikahan adalah hal yang lebih penting bagi Suku Sasak di Nyurlembang dibandingkan legalitas formal negara.

Lemahnya legalitas pernikahan dalam sisi hukum negara menyebabkan posisi perempuan menjadi lebih rentan. Pertama, kondisi ini memudahkan laki-laki untuk melakukan poligami. Isteri pertama dituntut untuk menerima pernikahan suaminya,

kalaupun perempuan akhirnya menolak *merarik* sang suami maka satu-satunya pilihan adalah dengan jalan bercerai. Biasanya perempuan yang tetap bertahan dalam poligami ini adalah mereka yang sangat tergantung secara ekonomi pada suami, sehingga mau tidak mau harus menerima untuk dipoligami. Kedua, apabila terjadi perceraian, perempuan tidak bisa menggugat haknya, termasuk harta bersama selama berkeluarga. Kebanyakan perempuan Suku Sasak setelah bercerai tidak lagi memperoleh nafkah, meskipun perempuan membawa serta anak-anak mereka. Begitu juga dengan harta benda, setelah bercerai biasanya perempuan tidak mendapatkan apapun dari harta yang diperoleh bersama.

Ketika legitimasi agama dan budaya menjadi lebih penting dibandingkan legalitas formal agama maka pada saat itulah Suku Sasak di Nyurlembang hanya mengandalkan sanksi budaya yang perlahan-lahan mulai kendur karena adanya banyak perubahan budaya. Budaya Sasak yang tidak kebal terhadap perubahan membuat kepastian-kepastian budaya dan perlindungan budaya menjadi lebih rapuh. Legalitas formal negara atas pernikahan dengan jalan mendaftarkan pernikahan di KUA bisa menjadi jalan terbaik untuk menopang ketidakpastian budaya tersebut dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan.

Melamar Bagi Suku Sasak Desa Nyurlembang

Jika sebelumnya satu-satunya cara untuk memulai keluarga adalah dengan cara *merarik* di Desa Nyurlembang konsep dan praktik lamaran rupanya perlahan mulai diterima sebagian kecil orang yang tinggal di sana. Penerimaan perlahan konsep dan lamaran *merarik* ini tidak lain karena munculnya pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman lama mengenai lamaran itu sendiri. Jika sebelumnya lamaran dianggap sebagai proses meminta anak perempuan dan membicarakan harga di depan adalah hal yang tidak pantas dilakukan maka lamaran saat ini justru dianggap sebagai tawaran konsep dan praktik membangun keluarga yang lebih baik dibandingkan *merarik* mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi karena *merarik*.

Di Desa Nyurlembang saat ini berkembang 2 macam *merarik* yaitu kawin lari dan lamaran. *Merarik* dengan cara kawin lari dilakukan oleh sebagian besar Suku Sasak di Desa Nyurlembang. Dalam proses ini pasangan yang melakukan *merarik* tidak memberitahukan waktu *merarik* dan calon suami/istri kepada orang tua masing-masing karena cara ini adalah

bagian dari tradisi *merarik* yang telah dilakukan Suku Sasak sejak lama. Sedangkan *merarik* dengan cara melamar dilakukan oleh beberapa orang saja di desa ini. Menurut keterangan informan, dari total Suku Sasak yang tinggal di Desa Nyurlembang hanya 5 orang saja yang melakukan proses lamaran, selebihnya melakukan *merarik.*

Melamar merupakan hal yang baru dilakukan oleh Suku Sasak di Desa Nyurlembang dan menjadi pilihan bagi 5 orang di Desa Nyurlembang yang telah melakukan pernikahan melalui proses tersebut. Dalam proses ini, laki-laki dan keluarganya datang ke rumah keluarga perempuan untuk menanyakan kesediaan keluarga perempuan dan perempuan tersebut menjadi keluarga besar dengan mengikatkan diri pada pernikahan. Pada pernikahan yang diawali dengan lamaran, proses adat menjadi lebih ringkas karena *panyeboan, selabar, majetik* tidak perlu dilakukan sedangkan negoisasi *pesuke* dilangsungkan pada saat lamaran atau setelah lamaran. Setelah lamaran dilaksanakan, prosesi *sorong serah, mbait wali,* dan *nyongkolan* tetap dilaksanakan.

"Seperti bukan orang Sasak saja" adalah pernyataan yang sering dilontarkan oleh masyarakat Desa Nyurlembang ketika ada anggota masyarakatnya yang tidak memilih *merarik* untuk menikah, meskipun demikian beberapa orang tetap memilih lamaran, bukan *merarik*. Jika *merarik* selalu dilaksanakan pada malam hari, lamaran bisa dilakukan pada siang atau malam hari. Lamaran yang dilaksanakan pada siang hari seringkali menarik minat warga untuk melihatnya dari dekat. Lamaran menjadi semacam pertunjukan yang menarik untuk ditonton karena jarang dilakukan oleh Suku Sasak di Desa Nyurlembang. Hal ini seringkali membuat keluarga yang memilih melamar merasa tidak nyaman dan mendorong warga yang lainnya tetap memilih *merarik* karena tidak ingin menjadi pusat perhatian warga desa.

Lamaran memungkinkan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk saling mengenal terlebih dahulu, pun demikian antara orang tua dengan pasangan anak perempuan/laki-laki mereka. Konflik yang muncul karena adanya ketidakcocokan orang tua perempuan dengan calon menantu laki-laki berkurang karena hadirnya waktu dan kesempatan untuk menilai laki-laki yang menjadi calon suami anaknya dan keluarga laki-laki tersebut. Laki-laki yang memilih lamaran biasanya telah mempunyai persiapan finansial yang baik dan ini berimplikasi pada keberlangsungan ekonomi keluarga yang ia bangun. Dengan demikian lamaran memberikan kepastian hidup yang lebih baik bagi perempuan dan

meminimalisir konflik yang timbul saat maupun setelah pernikahan berlangsung. Namun karena tidak ada unsur paksaan di dalam adat seperti ketika *merarik* dilakukan maka pembatalan menikah sangat dimungkinkan setelah lamaran dilakukan.

Semakin tingginya pemahaman agama Islam dan tingginya pendidikan tinggi menjadi alasan mengapa lamaran dinilai lebih baik dibandingkan *merarik*. Lamaran dianggap lebih dekat dengan syariat Islam dibandingkan dengan kawin lari karena syariat Islam memang mensyaratkan membangun keluarga dengan cara melamar bukan kawin lari. Lamaran juga dianggap lebih memiliki dampak positif untuk semua orang yang terlibat terutama perempuan dan keluarga perempuan karena lamaran mensyaratkan persiapan finansial dan mental laki-laki yang akan melakukannya sehingga ketidakberdayaan perempuan dan keluarga perempuan yang biasanya muncul dalam tradisi *merarik* hilang.

Membuat lamaran sebagai alternatif lain di Desa Nyurlembang tidaklah mudah. Selain karena dianggap bukan budaya Sasak, lamaran mensyaratkan kesiapan psikologis dan finansial terutama bagi laki-laki yang tidak mudah untuk dilakukan. Ketika laki-laki melakukan lamaran namun ditolak karena dianggap "tidak pantas" maka *merarik* akan tetap menjadi pilihan utama karena pernikahan akan tetap dilangsungkan apalagi jika pasangan saling mencintai. *Merarik* oleh karena itu tetap menjadi pilihan terbaik untuk mempercepat keinginan untuk menikah meskipun banyak permasalahan muncul darinya.

Kesimpulan

Budaya patriarki yang begitu kuat membuat perubahan budaya merarik yang ditopang oleh teknologi modern (mobile phone), hanya memperkuat posisi laki-laki dalam melakukan merarik. Di sisi lain, perempuan tetap dituntut untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Bahkan lamaran yang menjadi alternatif *bargaining position* perempuan malah dianggap "memperjualbelikan anak perempuan".

Posisi laki-laki dan perempuan yang sejak awal *unequal* pada Suku Sasak, ketika terjadi perubahan–dengan adanya teknologi, maka perubahan yang terjadi lebih menguntungkan laki-laki. Perempuan tetap berada pada ranah yang dituntut untuk menjaga keberlanjutan budaya. Bagian proses merarik yang bisa berubah dan tidak, ditentukan oleh pihak laki-laki dan keluarganya.

Daftar Pustaka

Adnan, S. 2004. Pergeseran Nilai-nilai Adat Marari Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Pada Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat) [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro .

Amin, A. 1997. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Aniq, A. F. 2012. Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok. *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XI)*. Jakarta: Kementrian Agama. hal. 2321-2339

Anonim. Pernikahan Dini Membuat IPM di NTB Stagnan. dalam http://kbr.id/ (diakses 12 April 2015)

Daliem, M. M. 1982. *Lombok Selatan Dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak.* Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hamdi, S. Potret Perempuan Sasak Migrasi Perempuan Sasak Pernikahan Dini dan Legitimasi Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Dalam Budaya Sasak dalam http://www.alidachlancenter.com/ (diakses 12 April 2017)

Haq, H. S., & Hamdi. 2016. Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif Vol. XXI No 3 September*, 157-167.

Murdan. 2015. Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perpekstif Antropologi Hukum) [Tesis]. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Parlindungan, T. 2004. Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.

Platt, M. 2012. Sudah Terlanjur "Perempuan dan Transisi ke Perkawinan di Lombok. *Jurnal Studi Pemuda, Volume 1 No 2 :* 165-178.

Rabiatul, A. 2016. Makna Tradisi Merarik (Studi Tentang Bertahannya Tradisi Merarik di Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabuaten Lombok Barat) [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.

Saladin, B. 2013. Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam. Al Ihkam, Volume 8 No 1 : 21-39.

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Strategi Paguyuban Pencak Silat Tradisional Bintang Timur Dalam Melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk*

Gandi Indika Affandi[1], Anif Fatma Chawa[2], & Astrida Fitri Nuryani[3]

Perkembangan Kesenian *Can Macanan Kadduk* di Kabupaten Jember yang semakin lama semakin memprihatinkan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya sebuah tindakan untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* di Kabupaten Jember. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah Konsep habitus, modal dan ranah milik Pierre Bourdieu. *Habitus*, modal dan ranah tidak dapat dipisahkan, *Habitus* yang dilakukan oleh aktor tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan modal yang dimiliki. Oleh karena itu modal memiliki peran dalam menentukan habitus yang dimiliki oleh aktor tersebut. *Habitus* dan modal dilakukan dalam sebuah ranah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* ialah dengan menggunakan strategi reproduksi dan strategi rekonversi. Dari kedua strategi tersebut PPST Bintang Timur membuat sebuah kegiatan yakni melegalkan PPST Bintang Timur sebagai paguyuban yang sah secara hukum, mengadakan latihan rutin. Selain itu PPST Bintang Timur juga rutin mengadakan kegiatan arisan dan padang bulan.

Kata Kunci: Kesenian *Can Macanan Kadduk* , *Habitus*, Modal, Ranah, Strategi

[1] Email peneliti: gandiaffandi@gmail.com
[2] Email peneliti: anif_chawa@ub.ac.id
[3] Email peneliti: astridafn@ub.ac.id
Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya. Email:

© Gandi Indika Affandi , Anif Fatma Chawa , & Astrida Fitri Nuryani, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.59-69.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):
Affandi, Gandi Indika., Chawa, Anif Fatma & Nuryani, Astrida Fitri. 2019. "Strategi Paguyuban Pencak Silat Tradisional Bintang Timur Dalam Melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk" Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 59-69.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.05

The development of *Can Macanan Kadduk* art performance in Jember District which by time become worthy of concern. Due to the fact that more and more modern pop culture are growing in the society, nowadays people can choose which type of art performance they would try to feature in the events they set. One way to know that the existence of *Can Macanan Kadduk* art performance is becoming less anticipated is that by looking at the level of response which has been accepted by the PPST Bintang Timur. So, there must be an action or a solution towards this problem in order to preserve *Can Macanan Kadduk* art performance existence in Jember residence. The concepts that were used in this research is the *Habitus,* capital and field concept by Pierre Bourdieu. *Habitus* and capital cannot be separated. A habit that is done by one will not run if it is not balanced with the capital owned. Hence, capital has an important role in determining a person's habit. *Habitus* and capital are performed in a certain field. Results show that the strategies of PPST Bintang Timur in defending and preserving *Can Macanan Kadduk* art performance are reproduction and reconversion. From those two strategies, PPST Bintang Timur made an activity that confirms PPST Bintang Timur as a legal organization, creating routine gatherings. Other than that, PPST Bintang Timur also routinely do activities like 'arisan 'padang bulan'.

Keyword: *Can Macanan Kadduk* traditional art, *Habitus*, Capital, Field, Strategy

TANTANGAN KESENIAN *CAN MACANAN KADDUK*

Kesenian *Can Macanan Kadduk* merupakan kesenian tradisional khas Kabupaten Jember. Kesenian ini menyerupai Kesenian Barongsai dari Negeri Cina. Hal tersebut disebabkan karena dalam pertunjukan Kesenian *Can Macanan Kadduk* dimainkan oleh dua orang. Ada yang menjadi kepala dan ada pula yang menjadi badannya. Seperti yang dimainkan dalam Kesenian Barongsai. Dalam pertunjukan Kesenian *Can Macanan Kadduk* ditampilkan pula kesenian-kesenian dari daerah lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kesenian *Can Macanan Kadduk* merepresentasikan Budaya Pendalungan di Kabupaten Jember.

Kesenian ini merepresentasikan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. Penutup pertujukan Kesenian *Can Macanan Kadduk* ialah ditampilkannya Kesenian Jaranan. Kesenian *Can Macanan Kadduk* berada dalam sebuah paguyuban pencak silat. Salah satu paguyuban pencak silat yang sampai saat ini masih eksis melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* ialah Paguyuban Pencak Silat Tradisional (PPST) Bintang Timur. PPST Bintang Timur merupakan salah satu paguyuban pelestari Kesenian *Can Macanan Kadduk* tertua di Kabupaten Jember.

Saat ini Kesenian *Can Macanan Kadduk* sudah jarang ditampilkan. Hal tersebut karena sudah tidak ada generasi yang melanjutkan Kesenian *Can Macanan Kadduk* , selain itu tidak adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Jember untuk membenahi manajemen pementasan Kesenian *Can Macanan Kadduk* (Raharjo, 2003).

Upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kembali Kesenian tradisional perlu dilakukan, karena banyak sekali kandungan nilai-nilai positif dalam Kesenian tradisional (Zoebazary, 2017). Dalam konteks Kesenian *Can Macanan Kadduk* di PPST Bintang Timur upaya untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* dilakukan. Beragam upaya mereka lakukan agar keberadaan Kesenian *Can Macanan Kadduk* tetap ada sampai

Untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* PPST Bintang Timur melakukan sebuah tindakan yang dilakukan secara kolektif dan tindakan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama agar keberadaan Kesenian Tradisional *Can Macanan Kadduk* tetap ada sampai kapanpun.

Menurut peneliti konsep *Habitus,* modal dan ranah dianggap mampu menjelaskan serta menganalisis fokus dalam penelitian ini. Dalam konsep *Habitus* tindakan yang dilakukan oleh aktor, dilakukan untuk menghadapi kehidupan sosial mereka. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh aktor tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh aktor tidak akan berjalan jika tidak memiliki modal yang kuat untuk mendukung tindakan yang dilakukan tersebut. Kemudian tindakan yang dilakukan aktor tersebut dilakukan dalam sebuah ranah yang ada di masyarakat.

Habitus, modal dan ranah tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. *Habitus* dan modal saling berhubungan, *Habitus* yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak menggunakan modal yang dimilliki. Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dilakukan dalam sebuah ranah yang ada di masyarakat. Sehingga dari kolaborasi antara *Habitus,* modal dan ranah yang dimiliki PPST Bintang Timur menghasilkan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* di Kabupaten Jember.

Konsep *Habitus* tidak sepenuhnya murni hasil pemikiran Bourdieu, melainkan hasil pemikiran dalam tradisi filsafat. Dalam bahasa latin *Habitus* diartikan sebagai kebiasaan (habitual), penampilan diri (appearance), selain itu dapat pula diartikan sebagai pola

pembawaan yang merujuk pada kondisi tubuh (Fashri, 2007). *Habitus* didefinisikan sebagai "struktur mental atau kognitif" yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosialnya. Dalam menghadapi dunia sosialnya, aktor diberikan pola-pola yang terinternalisasi dalam dirinya agar bisa merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial mereka. Melalui pola-pola tersebut aktor dapat memproduksi tindakan dan melakukan penilaian terhadap tindakan tersebut. Dengan kata lain *Habitus* merupakan "produk internalisasi struktur" dunia baru (Bourdieu dalam Ritzer, 2003).

Habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur sosial yang ada di masyarakat. Pembagian tersebut didasarkan pada umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. *Habitus* diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi aktor dalam kehidupan sosial mereka. Sehingga *Habitus* yang dimiliki antar aktor akan berbeda-beda bergantung pada posisi mereka dalam kehidupan sosial. Tidak semua aktor memiliki kebiasaan dan posisi yang sama dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini *Habitus* dapat dipahami sebagai fenomena kolektif di masyarakat. Aktor dalam penelitian ini ialah PPST Bintang Timur. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan *Habitus* kelompok/kelas.

Habitus yang dimiliki oleh kelompok/kelas merujuk pada fenomena kolektif yang menunjuk pada suatu kelas. *Habitus* kelas merupakan struktur mental yang diinternalisasikan dari kondisi kelas (Bourdieu, 1984). *Habitus* kelas merupakan elemen yang mengorganisasikan praktik sehingga agen-agen yang berada dalam kondisi eksistensi yang sama dapat memproduksi praktik yang sama dan menyandang status yang sama. Hal tersebut memungkinkan *Habitus* kelas memiliki fungsi dalam menghasilkan praktik. Fungsi yang pertama ialah sebagai sistem yang memproduksi praktik, fungsi yang kedua ialah sebagai sistem skema persepsi dan apresiasi terhadap praktik (Bourdieu, 1984).

Habitus yang terbentuk dalam PPST Bintang Timur, memberikan pola terhadap persepsi (cara pandang), apresiasi (pilihan), dan aksi (tindakan) yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Berdasarkan *matrix of perception, appreciation, and action*, penjelasan di atas matriks tersebut dijadikan sebagai dasar peneliti saat melihat strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* di Kabupaten Jember.

Persepsi dan apresiasi dalam *Habitus* kelas memberikan skema dalam praktik yang dijalankan. Kemudian ketika Bourdieu memberikan penjelasan bahwa *Habitus* tidak

sepenuhnya ditentukan oleh struktur dan juga agen untuk mendapatkan kembali kebebasannya melalui posisi-posisi yang berada dalam sebuah kehidupan sosial. Maka, situasi seperti ini membuka kesempatan bagi para aktor untuk menggunakan sebuah strategi. Strategi memberikan kekuatan bagi para aktor untuk meningkatkan posisi mereka dalam kehidupan sosial (Fashri, 2007).

Bourdieu mengklasifikasikan strategi kedalam dua tipe, yakni:

1. Strategi Reproduksi (*Reproduction Strategies*)

   Strategi ini merujuk pada kumpulan tindakan yang dipersiapakan oleh aktor untuk mempertahankan dan meningkatkan asset-aset yang dimiliki oleh aktor dengan kecenderungan ke arah masa depan. Strategi ini sangat bergantung pada jumlah dan komposisi modal serta sarana reproduksi (hukum waris, pasar tenaga kerja, sistem Pendidikan, dsb).

2. Strategi penukaran kembali (*Reconversion Strategies*)

   Strategi ini merujuk pada pergerakan-pergerakan di dalam ruang sosial yang terstruktur dalam dua dimensi, yakni keseluruhan jumlah modal yang terstruktur dan pembentukan jenis modal yang dominan dan yang terdominasi.

Saat menjelaskan mengenai modal (*capital*) Bourdieu berangkat dari konsep masyarakat yang memiliki kelas-kelas sosial (Wacquant: 1992). Aktor akan menempati ruang-ruang sosial yang multidimensional. Ruang tersebut tidak didefinisikan sebagai kelas sosial. Melainkan akumulasi dari setiap jenis modal yang dimiliki oleh aktor.

Menurut Bourdieu Modal (*capital*) digolongkan kedalam empat jenis yakni modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Keempat modal tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Modal-modal tersebut mendukung habitus yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur.

Habitus dan modal yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur digunakan dalam sebuah ranah atau arena pertarungan. Menurut Bourdieu (Ritzer dan Goodman, 2010) ialah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya. Ranah merupakan arena perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Ranah dalam penelitian ini ialah masyarakat Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. Hal tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat Pendalungan di

Kabupaten Jember yang mulai menerima arus globalisasi sehingga perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan hal-hal yang menjadi identitas mereka. Salah satunya mereka mulai menyukai kesenian pop modern dibandingkan Kesenian *Can Macanan Kadduk* yang merupakan kesenian tradisional khas masyarakat Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember.

SEJARAH KESENIAN CAN MACANAN KADDUK

Awal mulanya Kesenian *Can Macanan Kadduk* digunakan oleh seorang petani di daerah Tegal Boto Desa Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember untuk mengusir binatang buas yang selalu merusak lahan pertaniannya. Si petani tersebut membuat sebuah benda untuk menakut-nakuti hewan buas yang akan merusak lahan pertaniannya.

Akhirnya terciptalah benda tersebut yang berupa kepala macan (Harimau). Alasannya karena hewan buas seperti babi hutan akan takut dengan macan. Dan petani tersebut juga membuat badan dari kepala macan tersebut menggunakan *kadduk* (Karung Goni). Kemudian saat petani tersebut melihat ada hewan buas yang akan masuk ke lahan pertanian miliknya ia menggunakan kepala macan dan pakaian yang terbuat dari *kadduk* untuk menakut-nakuti hewan buas tersebut agar tidak merusak lahan pertanian miliknya.

PERKEMBANGAN KESENIAN *CAN MACANAN KADDUK*

Kesenian *Can Macanan Kadduk* biasanya ditampilkan dalam berbagai acara atau hajatan di masyarakat. Perkembangan Kesenian *Can Macanan Kadduk* yang saat ini memprihatinkan disebabkan banyaknya kesenian atau hiburan yang ada di masyarakat seperti *electone,* orkes dangdut, ataupun yang lainnya. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ada penurunan jumlah tanggapan yang diterima oleh PPST Bintang Timur. Pada tahun 2017 jumlah tanggapan yang diterima oleh PPST Bintang Timur berjumlah kurang lebih sekitar dua puluh lima tanggapan. P

enurunan jumlah tanggapan tersebut yang diterima oleh PPST Bintang Timur menurut beberapa informan dikarenakan saat ini semakin beragam hiburan atau kesenian yang ditampilkan di masyarakat. Semakin beragamnya kesenian atau hiburan yang ditampilkan di masyarakat mempengaruhi pada selera masyarakat terhadap kesenian atau

hiburan tersebut. Masyarakat bisa memilih untuk menikmati kesenian atau hiburan apa yang mereka sukai. Di sisi lain, ada pula informan yang mengatakan bahwa alasan mengapa semakin lama jumlah tanggapan yang diterima PPST Bintang Timur semakin berkurang karena bisa jadi memang tidak ada hajat di masyarakat atau ada yang memiliki hajat tetapi tidak menampilkan hiburan apapun dalam hajat tersebut.

HABITUS PPST BINTANG TIMUR

Habitus yang terbentuk dalam PPST Bintang Timur, memberikan pola terhadap persepsi (cara pandang), apresiasi (pilihan), dan aksi (tindakan) yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Bourdieu menyebutnya sebagai matrix of perception, appretiation, and action. Dalam menyikapi perkembangan Kesenian *Can Macanan Kadduk* yang saat ini semakin memprihatinkan, PPST Bintang Timur memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat Kesenian *Can Macanan Kadduk* sebagai kesenian khas masyarakat Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember yang itu tidak ada di Kabupaten atau kota yang lain di Indonesia.

Dari cara pandang tersebut tentunya mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan serta melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* yang ada di Kabupaten Jember.

Kebiasaan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur untuk menjaga eksistensi Kesenian *Can Macanan Kadduk* diwujudkan dalam sebuah tindakan kolektif yang dilakukan secara terus menerus, yaitu berlandaskan pengalaman yang mereka miliki. Contohnya adalah kegiatan arisan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur merupakan hasil dari sejarah dimasa lalu yang dialami oleh PPST Bintang Timur. Seluruh anggota PPST Bintang Timur hanya berkumpul ketika latihan rutin. Selain itu seluruh anggota PPST Bintang Timur akan berkumpul ketika ada tanggapan. Sehingga melalui kegiatan arisan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur menjadi sarana agar seluruh anggotanya bisa berkumpul sekaligus melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* melalui pertunjukan yang mereka tampilkan ketika arisan.

Kegiatan arisan yang rutin dilakukan oleh PPST Bintang Timur telah dilakukan sejak sebelum tahun 1990 sampai saat ini sebagai salah satu ciri *Habitus* yakni *System of Durable* (sistem yang bertahan lama). Selain itu, karena *Habitus* bersifat *Transposable*, maka kebiasaan

melakukan arisan rutin yang dilakukan setiap satu minggu sekali berubah menjadi dua minggu sekali untuk mengakomodasi kesibukan anggota dengan pekerjaan masing-masing, disertai perubahan iuran Rp 25.000,00 menjadi Rp 50.000,00. *Habitus* juga bersifat *Structured Structure* (struktur yang terstruktur), misalnya permintaan mantan Gubernur Jawa Timur agar PPST Bintang Timur membuat dan melakukan kegiatan *padang bulan* setiap satu bulan sekali di alun-alun Kabupaten Jember.

Kebiasaan lain yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur ialah mengadakan latihan rutin setiap malam Jumat bertempat di depan rumah pimpinan PPST Bintang Timur, yang dapat digolongkan sebagai salah satu ciri *Habitus* yakni *System of Durable* (sistem yang bertahan lama). Kegiatan latihan rutin yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dilakukan sejak PPST Bintang Timur berdiri dan sampai saat ini kegiatan tersebut masih dilaksanakan.

Dari latihan rutin yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur, kegiatan tersebut memenuhi ciri *Habitus* sebagai *Structuring structure* (struktur yang terstruktur). Kegiatan latihan rutin yang dilakukan PPST Bintang Timur dilakukan sejak lama dan sampai saat ini kegiatan tersebut masih terus dilakukan.

PEMANFAATAN MODAL PPST BINTANG TIMUR

Tidak akan ada *Habitus* tanpa modal aktor. Dalam penelitian ini modal berfungsi membentuk dan mendukung *Habitus* PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* di Kabupaten Jember. Empat modal yang digunakan PPST Bintang Timur dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan, antara lain modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Modal ekonomi yang dimiliki dan digunakan oleh PPST Bintang Timur ialah anggota yang berjumlah kurang lebih enam puluh orang, selain itu peralatan dan perlengkapan pertunjukan seperti kostum, alat musik, *sound system,* serta yang lainnya.

Modal budaya yang digunakan PPST Bintang Timur masih berhubungan dengan modal ekonomi yakni kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seluruh anggota PPST Bintang dalam menyajikan pertunjukan Kesenian *Can Macanan Kadduk* . Modal budaya ini juga berkaitan dengan habitus yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur yakni kebiasaan mengadakan latihan rutin.

Modal sosial yang dimiliki dan digunakan oleh PPST Bintang Timur ialah adanya relasi antara PPST Bintang Timur dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Jember, Bupati Kabupaten Jember, dan instansi-instansi lain, serta sanggar seni maupun komunitas lain di Kabupaten Jember.

Modal simbolik PPST Bintang Timur berupa pengakuan secara hukum bahwa PPST Bintang Timur, dikenalnya paguyuban oleh masyarakat, dan penghargaan yang diterima PPST Bintang Timur dari Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

RANAH PPST BINTANG TIMUR

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam sebuah ranah atau medan pertarungan, yaitu masyarakat Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember.

Beragam budaya melebur menjadi satu di masyarakat ini, sehingga setiap anggotanya memiliki selera masing-masing dalam hal kesenian tradisional. PPST Bintang Timur memiliki beban yang cukup berat dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* ditengah kondisi masyarakat Pendalungan yang memiliki selera yang bermacam-macam. Maka dari itu, dalam sajian pertunjukan Kesenian *Can Macanan Kadduk* tetap dinikmati oleh masyarakat Pendalungan di Kabupaten Jember kesenian-kesenian tradisional dari beberapa daerah seperti Banyuwangi, Bali, Jawa (Mataraman), dan yang lainnya.

STRATEGI PPST BINTANG TIMUR

Strategi yang digunakan PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian *Can Macanan Kadduk* di Kabupaten Jember ialah dengan menggunakan strategi reproduksi dan strategi rekonversi. Strategi reproduksi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur ialah dengan melegalkan PPST Bintang Timur sebagai paguyuban yang sah secara hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan modal simbolik yang dimiliki. Selain itu strategi reproduksi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur ialah dengan mengadakan latihan rutin untuk mempertahankan dan meningkatkan modal ekonomi dan budaya yang dimiliki. Melalui latihan rutin pula, PPST Bintang Timur mereproduksi pengetahuan yang dimiliki kepada anak kecil yang mengikuti latihan rutin tersebut. Kegiatan tersebut sekaligus sebagai bentuk regenerasi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur.

Selain strategi reproduksi, PPST Bintang Timur juga melakukan strategi rekonversi. Melalui kegiatan arisan dan padang bulan yang dilakukan, PPST Bintang Timur berusaha merubah modal ekonomi dan budaya yang digunakan dalam dua kegiatan tersebut menjadi modal simbolik. Kegiatan arisan dan *padang bulan* yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur memanfaatkan modal ekonomi berupa anggota dan peralatan serta perlengkapan pertunjukan. Sedangkan modal budaya yang digunakan ialah kemampuan dan keahlian yang dimiliki anggota dalam menampilkan pertunjukan Kesenian *Can Macanan Kadduk*. Dari situ PPST Bintang Timur berusaha mengubahnya menjadi modal simbolik berupa status agar PPST Bintang Timur semakin dikenal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agus, Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*.Yogyakarta:Tiara Wacana.

Alim, M. S., Prasetyo, Y., & Indrawanto, S. 2014. Eksistensi Kesenian Ludruk Sidoarjo di Tengah Arus Globalisasi Tahun 1975-1995. *GENTA Jurnal Program Studi Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo*2 (2): 194-206

Barker, Chris. 2008. *Cultural Studies Teori & Praktik.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Fashri, Fauzi. 2007. *Penyingkapan Kuasa SImbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu.* Yogyakarta: JUXTAPOSE.

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Djambatan.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putra, Yudha M.P. 2017. Republika, 7 Februari. "Budaya Pendalungan Dikenalkan di Objek Wisata. Jember, Jawa Timur, Indonesia." (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/07/okztvt284-budaya-Pendalungan-dikenalkan-di-objek-wisata)

Raharjo, Christianto. 2003. Liputan6, 15 Mei. "Macanan Kaduk, Kesenian Tertua Jember Terancam Punah. Jember, Jawa Timur, Indonesia." (https://www.liputan6.com/news/read/54664/macanan-kaduk-kesenian-tertua-jember-terancam-punah)

Rezananta, Reynaldo. 2017. *Pemertahanan Tradisi Wayang Topeng Malang dalam Bersih Dusun Kedungmonggo.* Skripsi, Universitas Brawijaya

Ritzer, George, Goodman, Douglas, J. 2003. *Teori Sosiologi Modern.* Terjemahan oleh Alimandan. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

Septiyan, Dadang D. 2016. Eksistensi Kesenian Gambang Semarang dalam Budaya Semarangan. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni* 1(2): 171-172.

Sitorus, Felix. 1998.*Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor:Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sujarno. 2003. *Seni Pertunjukan Tradisional. Nilai, Fungsi dan Tantangannya.* Yogyakarta: Jarahnitra.

Sumarjo, Jacob. 1992. *Lintasan Sastra Indonesia Modern, Jilid 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yin, Robert, K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode.* Jakarta: Rajawali Pers.

Yoeti, Oka A. 1985. *Cultural: Melestarikan Seni Budaya Tradisional yang Nyaris Punah.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Zoebazarry, Muhammad I. 2017. *Orang Pendalungan: Penganyam Kebudayaan di Tapal*

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya

Yopinovali Fherastama S[1], Titi Fitrianita[2], Arief Budi Nugroho[3]

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

LDK (Lembaga Dakwah Kampus) merupakan organisasi yang dibentuk secara formal di kampus yang berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa belajar nilai-nilai Islam sekaligus berorganisasi. Anggota mayoritas LDK adalah mahasiswa yang berafiliasi dengan Organisasi Ekstra Kampus (OMEK) atau memiliki latar kelompok agama yang berbeda. Kehadiran mahasiswa yang berasal dari berbagai kelompok Islam ini mewarnai aktivitas berorganisasi di LDK. Perbedaan latar belakang kelompok Islam tersebut menimbulkan persaingan di dalam LDK karena cara dan tafsiran agama yang mereka miliki berbeda sehingga menimbulkan upaya berebut pengaruh. Menggunakan kerangka analisis Piere Bourdieau tentang modal dan metode kualitatif deskriptif tulisan ini berupaya melacak kontestasi kelompok Islam di dalam LDK. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan cara dan tafsiran agama mengantarkan masing-masing kelompok Islam menawarkan konsep Islam yang "paling benar" sehingga muncul persaingan dan berebut pengaruh di dalam LDK. Kelompok seperti KAMMI, HMI, IMM, PMII, NU, Muhammadiyah, HTI dan Salafi bersaing dan berebut menempati posisi strategis di LDK untuk menciptakan perilaku dan praktek keagamaan sesuai dengan ideologi beragama yang mereka miliki. Persaingan ini melibatkan 4 modal Pierre Bourdieau yaitu modal simbolik, modal budaya, modal sosial, dan modal ekonomi. Dalam persaingan tersebut KAMMI menjadi kelompok dominan karena berhasil mengakumulasikan modal sehingga menciptakan kekerasan simbolik terhadap kelompok lainnya. Dominasi ini kemudian mulai menimbulkan perlawanan dari kelompok Islam lainnya.

[1] Email peneliti : yopinovali.fherastamas@yahoo.com
[2] Email peneliti : titifitrianita@gmail.com
[3] Email peneliti : ariefb.nugroho@gmail.com

© Yopinovali Fherastama S , Titi Fitrianita , Arief Budi Nugroho, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.70-91.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):
Fherastama, Yopinovali S., Fitrianita, Titi & Nugroho. 2019. "Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya" Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 70-91.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.06

Kata Kunci: Lembaga Dakwah Kampus, Praktek Keagamaan, Persaingan, Kelompok Islam

LDK (Lembaga Dakwah Kampus/Campus Preaching Institute) is a formally formed organization on campus that serves as a place for students to learn Islamic values as well as organize. The majority of LDK members are students affiliated with Extra Campus Organizations (OMEK) or have different religious group backgrounds. The presence of students from various Islamic groups colored organizational activities in the LDK. The differences in the background of the Islamic groups led to competition within LDK because the ways and interpretations of their religion were different, giving rise to efforts to fight for influence. Using the framework of Piere Bourdieau's analysis of capital and descriptive qualitative methods this paper seeks to trace the contestation of Islamic groups in the LDK. From the results of the study, it was found that differences in the ways and interpretations of religion led each Islamic group to offer the concept of "the most correct" Islam so that competition arose and fighting over influence in the LDK. Groups such as KAMMI, HMI, IMM, PMII, NU, Muhammadiyah, HTI and Salafi competed and scrambled to occupy a strategic position in LDK to create religious behavior and practices in accordance with the religious ideology they had. This competition involves Pierre Bourdieau's capital, namely symbolic capital, cultural capital, social capital, and economic capital. In this competition KAMMI became the dominant group because it succeeded in accumulating capital so as to create symbolic violence against other groups. This dominance then began to cause resistance from other Islamic groups.
Keywords: Campus Preaching Institution, Religious Practices, Competition, Islamic Groups

PENDAHULUAN

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) merupakan organisasi kerohanian Islam yang ada di universitas di Indonesia yang berfungsi sebagai penyemai nilai-nilai agama Islam. LDK muncul lewat gerakan “dakwah kampus” pertama kali pada tahun 1970an di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB). Gerakan ini dimotori oleh Imaduddin Abdurahim, yang tergerak untuk mengubah pendidikan di ITB yang tidak menjadikan agama Islam sebagai bagian dari penting dari kurikulum pendidikannya. Berasal dari keluarga yang sangat religius, Imaduddin Abdurahim harus sering membolos perkuliahan karena perkuliahan seringkali dilaksanakan pada saat Sholat Jumat, mahasiswa yang ikut Sholat Jumat selalu tidak dapat mengikuti perkuliahan (Rosyad, 1995). Keresahan ini menjadi dorongan untuk mengubah sistem pendidikan di ITB dengan tujuan Islam dapat menjadi bagian penting dalam kurikulum perguruan tinggi. Gerakan ini lantas menjadi contoh bagi masjid di seluruh

universitas di Indonesia terutama dalam menggabungkan dan memodifikasi Islam dengan sistem pendidikan perguruan tinggi yang ketika itu sangat sekuler.

Dalam perkembangannya, gerakan dakwah kampus kemudian tersebar luas dan menjadi gerakan yang muncul karena ketidakpuasan mahasiswa atas kondisi politik di Indonesia karena terpilihnya kembali Suharto pada tahun 1978 ((Miichi, 2003). Ketertarikan pemuda dalam kegiatan sosial dan religi di Indonesia bermunculan karena kegagalan gerakan politik di Indonesia yang dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Selain itu, pemerintah yang berkuasa dianggap bersalah karena membuat umat Islam tidak pernah menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan sehingga membuat umat Islam semakin jauh dari nilai-nilai Islam padahal Islam dan ajarannyalah yang bisa membuat masyarakat lebih baik dalam sosial, politik, maupun ekonomi (Rosyad, 1995). Kristalisasi ketertarikan pemuda pada isu sosial dan religi muncul pada tahun 1970an dalam bentuk dakwah kampus dan resmi menjadi sebuah lembaga yang disebut Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

LDK sebagai lembaga di dalam kampus yang bertugas untuk membentuk perilaku yang Islami berhasil memunculkan kesadaran di antara mahasiswa untuk meningkatkan intensitas ibadah kepada Allah, dapat mencegah perilaku anarkis, narkoba, pergaulan bebas, memiliki kesadaran untuk berhijab secara sempurna bagi wanita (akhwat) dan lain-lain lewat pembinaan keagamaan yang dilakukan secara intensif (Rafiuddin, 2016). Namun di sisi yang lain, LDK secara organisasi bersifat terbuka (inklusif) namun secara gerakan cenderung bersifat eksklusif karena identitas penampilan kader yang khas (celana dasar, jilbab lebar, bendera Palestina, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis) memberikan jarak tersendiri dalam berinteraksi dengan mahasiswa di luar organisasi (Suyati, Huda, & Sumarto, 2011).

Cara dakwah yang dikembangkan oleh LDK ini mengadopsi gerakan Tarbiyah yang mulai berkembang pada tahun 1980an di Indonesia. Gerakan Tarbiyah ini dipercaya sebagai anak ideologis Ikhwanul Muslimin dengan mengembangkan bukan hanya metode namun juga struktur dan pembinaan materi (Abdurakhman, 2013). Keberhasilan mengembangkan pengaruhnya lewat gerakan dakwah bawah tanah *usrah* yang diterima secara longgar di masjid-masjid kampus memunculkan respons dari organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam lokal seperti Muhammadiyah dan NU merasa tergerus otoritasnya karena kehadiran

gerakan ini yang salah satunya terwujud dalam bentuk LDK. Pemikiran Islam yang moderat yang diusung oleh kedua organisasi ini tergeser secara pelan dengan pemikiran Tarbiyah yang mirip dengan pemikiran Ikhawanul Muslimin yang dianggap memunculkan potensi radikalisme.

Kontestasi atas konsep Islam yang paling benar bukan hanya terjadi pada level nasional namun juga di kampus. Di Universitas Brawijaya, LDK menjadi medan pertarungan atas konsep Islam yang paling benar dan paling baik diterapkan oleh mahasiswa. Hal ini paling terlihat dalam pengorganisasian kegiatan, pelaksanaan program, pemilihan kader, dll. Organisasi ekstra kampus yang menjadi *underbow* 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut turut serta merespons kegiatan LDK yang lebih dekat dengan tarbiyah dibandingkan sebagai organisasi yang menaungi keragaman pikir ber-Islam di kampus. Penelitian ini mencoba melakukan pelacakan kontestasi yang ada di LDK. Mengetahui kontestasi ini menjadi jalan untuk mengetahui dinamika kelompok Islam dan kontestasi organisasi Islam yang ada di Indonesia terutama yang ada di dalam kampus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena secara mendalam. Model dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (2009) studi kasus "merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila penulis hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah intrinsik. Tipe studi kasus intrinsik fokusnya adalah pada kasus itu sendiri karena kasus tersebut menghadirkan situasi yang tidak biasa atau unik (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena dan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh LDK. Observasi juga dilakukan berkaitan dengan ritual dan ketaatan yang dijalankan oleh aktor dari kelompok Islam yang ada. Wawancara menjadi teknik yang penting untuk memperdalam data penelitian (Creswell, 2014). Dalam wawancara dapat diketahui motif yang sesungguhnya dan alasan mengenai sebuah tindakan yang berkaitan dengan praktek keagamaan. Dokumentasi

berupa pengumpulan data kegiatan keagamaan LDK, data keanggotaan, artikel baik media cetak ataupun internet.

Kerangka Teoritik: Praktik Sosial Bourdieu

Salah satu tokoh penting yang membahas mengenai praktik sosial adalah Pierre Bourdieu. Bourdieu berperan dalam menjelaskan perilaku manusia dalam bertindak secara sadar ataupun tidak, yang nantinya akan menciptakan dunia sosial. Terdapat arena/lingkungan (field) yang menjadi tempat dimana habitus dapat tercipta. *Field* merupakan bagian dari masyarakat dan terdapat banyak ranah yang menentukan habitus seperti ranah pendidikan, politik, agama, seni, bisnis dsb. Setiap *field* memiliki sistem sendiri-sendiri oleh karena itu individu memiliki pilihan untuk memilih sebuah habitus. Dalam *field* inilah kemudian terjadi kontestasi dalam usaha memperoleh dominasi dalam sebuah habitus.

Habitus yang mendominasi habitus lainnya maka dapat mendefinisikan sebuah ranah dan menjadi ideologi yang dominan. Ideologi inilah yang disebut dengan *doxa* yakni suatu kepercayaan yang diterima apa adanya, tidak pernah dipertanyakan, yang telah mengarahkan cara pandang seseorang dalam mempersepsi dunia atau arena dimana *doxa* tersebut berada (Karnanta, 2005:92). *Doxa* kemudian dihadapkan dengan oposisi yakni *hetherodoxa* yang berusaha menganggu posisi dominan tersebut. Untuk mempertahankan dominasi, *doxa* dapat memproduksi *orthodoxa* sehingga posisi *doxa* semakin kuat. Konsep lain yang menjadi penting dalam sebuah pertarungan adalah kepemilikan modal. Terdapat empat modal yakni ekonomi, kultural, sosial dan simbolik. Modal dalam setiap ranah berbeda, sehingga jika satu modal dianggap berharga dalam satu ranah, bisa jadi di ranah yang lain modal tersebut menjadi tidak berharga.

Modal ekonomi dalam arti sempit bisa dikonversi dalam bentuk uang atau dalam bentuk hak milik. Jika modal lain lebih terikat pada ranah tertentu, modal ekonomi lebih leluasa ditransfer antar ranah, juga paling mudah diwariskan pada orang lain (Aunullah, 2006:52). Modal kultural meliputi berbagai pengetahuan yang sah. Modal simbolik mengenai posisi dalam struktur ataupun kebanggan (prestise). Modal sosial terdiri dari hubungan sosial yang bernilai antara individu (Ritzer & Goodman, 2004:525). Modal sosial juga terdapat dalam suatu kelompok yang relatif terikat seperti keluarga, suku, sekolah, partai, atau

organisasi (Bourdieu dalam Aunullah, 2006:53). Modal-modal ini dapat berpengaruh satu sama lain.

Nilai-Nilai Dasar LDK di UB

Universitas Brawijaya memiliki 17 LDK yang terbagi menjadi 3 alur koordinasi. Yakni 13 LDK dibawahi oleh FSLDK, 2 LDK dibawahi BKLDK dan 1 memiliki alur koordinasi yang bersifat nasional yakni Forum Studi Agama Islam FH (Forsa FH UB). Mulanya LDK hanya terbagi menjadi 2 yakni FSLDK dan Forsa. FSLDK masuk ke UB pada tahun 90-an, hanya saja belum menghimpun semua LDK karena beberapa fakultas saat itu belum memiliki LDK. LDK tertua di UB yakni berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yakni pada tahun 1986. Tahun 1994-1995 merupakan tahun dimana FSLDK mulai masuk ke UAKI. Pada tanggal 7 September 2007 akhirnya terbentuklah FSLDK UB yang didalamnya terdapat LDK dari berbagai fakultas di UB yang dibawahi oleh UAKI sebagai LDK pusat. FSLDK memiliki semangat yang sama (Wijaya, 2009) yaitu memperjuangkan nilai-nilai yang merujuk kepada Al Islam sebagai agama Allah (Dinullah) yang menjadi pandangan hidup (Mabda) yang didasarkan pada ikatan kalimat tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah dengan jalan *amar ma'ruf nahi munkar* (Iskandar, Azra, & Hisyam, 2015:444). FSLDK juga berusaha agar nilai-nilai Islam mampu masuk ke dalam tiap-tiap sendi masyarakat atau Islam yang *kaffah*. FSLDK didirikan oleh Ismail Yuswanto, Agus Priyono, Ahmad Kabul dan Mursalin.

Masa peralihan dari Orde Baru menuju Orde Reformasi menjadi momen terbentuknya BKLDK. Arah perjuangan yang tidak mengarah sepenuhnya kepada Islam dan *khittah* perjuangan FSLDK dirasa mulai berubah membuat Ismail Yuswanto keluar dari FSLDK dan membentuk BKLDK. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik yang ada di Indonesia terutama pada masa reformasi, dimana saat itu Indonesia sedang kembali mencari jati diri. Kesempatan politik bagi semua kelompok untuk berpartisipasi, akhirnya membuat LDK berperan aktif di dalam perpolitikan, setelah sebelumnya berhasil menundukkan pemerintahan Orde Baru melalui aksi yang dilakukan. FSLDK dan BKLDK sama-sama menganggap mereka sebagai lembaga independen, namun jika ditarik melalui sejarah dan aktor yang terkait dapat diketahui hubungan dua lembaga ini dengan dua ideologi antara *jamaah tarbiyah* dan *hizbut tahrir*.

Sejarah berdirinya LDK (FSLDK) terinsipirasi oleh gerakan Timur Tengah, khususnya *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, gerakan ini mengambil haluan Islamis yang mengagendakan penerapan ajaran Islam secara penuh dalam kehidupan sosial-keagamaan dan juga politik kenegaraan. Berawal dari gerakan tarbiyah, kelompok pengajian berskala kecil mulai berkembang di kampus-kampus umum di Indonesia sejak 1980-an (Iskandar, Azra, & Hisyam, 2015:444). Kegiatan ini atau biasa juga disebut mentoring, *liqo'*, *halaqoh* akhirnya menyebar di setiap kampus sehingga gerakan ini semakin besar dan akhirnya disepakati didirikanlah LDK. Beberapa universitas yang akhirnya menjadi tonggak awal berdirinya LDK yakni Salman ITB, Jamaah Salahudin UGM dan SALAM UI.

Dari FSLDK inilah tercipta organisasi mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada Munas FSLDK X pada tanggal 29 Maret 1998 di Malang. Karena itu ketika memasuki LDK atau KAMMI sebenarnya menjadi tempat untuk saling mengenal lebih dekat diantara kedua organisasi tersebut. Ini juga diperkuat banyaknya anggota KAMMI yang masuk LDK ataupun sebaliknya. Sama ketika melihat hubungan BKLDK dengan ideologi/organisasi yang ikut mendukungnya. Salah satu pendirinya yakni Ismail Yuswanto yang sekarang menjadi juru bicara HTI dan upayanya dalam membela HTI dalam berbagai acara diskusi yang ada di televisi. Ismail Yuswanto sebenarnya sudah merupakan bagian HTI ketika LDK masih tergabung dalam FSLDK, hanya saja saat itu baik HTI ataupun kelompok lain masih memiliki semangat yang sama yakni meningkatkan ukhuwah LDK yang ada di Indonesia. Saat itu HTI memang belum berani memperlihatkan eksistensinya. Baru pada tahun 2002 HTI mulai menampakan eksistensinya dengan mengadakan Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan–Jakarta dan sejak saat itu HTI mulai diakui keberadaannya. Tahun 2017 dan awal tahun 2018 sempat beredar kabar di media yang mengaitkan [1]BKLDK dengan HTI. Begitu juga di UB dimana sikap kampus terhadap LDK yang berasal dari BKLDK semakin memperkuat dugaan hubungan tersebut.

[1] Media beritasatu yang membahas bahwa kegiatan Simposium Nasional yang diadakan oleh BKLDK walaupun tidak secara khusus menyebut HTI namun kegiatannya dianggap mengarah kepada pemahaman ideologi yang sama dengan HTI, yakni terdapat sumpah akan menegakkan syariat Islam. Terdapat juga berita yang dibuat dalam laman web mediaumat yang berjudul "mantan ketua BKLDK tegaskan "sumpah mahasiswa" bukan acara HTI. Berita tersebut mengenai penolakan BKLDK bahwa mereka memiliki hubungan dengan HTI. Tetapi yang perlu dilihat disini bahwa, walau pada akhirnya berita tersebut mengenai penolakan, namun dalam titik tertentu ada semangat ataupun tujuan yang mirip dengan HTI, sehingga berita tersebut diangkat oleh media. Skripsi Maulina Nuril Izzati (UIN

Satu-satunya LDK yang tidak memiliki alur koordinasi yakni Forsa. Forsa diidentifikasikan berhubungan dengan kelompok Islam pada tataran mahasiswa yakni HMI. Tujuan dan pemikiran HMI, bahwa HMI tetap berusaha agar semua lini kehidupan terutama di dalam organisasi mengandung nilai-nilai Islam, tetapi tetap berpegang teguh pada Pancasila (Wekke, Sitompul, & Afkari, 2016:174). HMI juga disebut sebagai organisasi yang menciptakan tokoh-tokoh politik seperti Akbar Tanjung, Adi Sasono, M. Amin Rais, AM. Fatwa (Iskandar, Azra, & Hisyam, 2015:437). Di UB, temuan dan pengakuan dari informan menyatakan bahwa Forsa dekat dengan HMI diperkuat bahwa ketua umum Forsa dari tahun ke tahun berasal dari HMI yang menjadikan LDK sebagai tempat belajar para kader.

Nilai-nilai dasar baik dari FSLDK, BKLDK ataupun Forsa inilah yang saat ini aktif mewarnai kegiatan keagamaan di UB. Walaupun terjadi pembagian, karena perbedaan nilai dasar, tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang yang memiliki keyakinan berbeda terhadap Islam untuk ikut aktif. Karena masing-masing juga memiliki anggota yang berasal dari kelompok agama yang berbeda. Dapat dijumpai bahwa di FSDLK, BKLDK, ataupun Forsa terdapat anggota yang berasal dari NU, Muhammadiyah, HTI, PKS dan Salafi. Tetapi jika dilihat dari nuansa kegiatan kegamaan di UB maka dapat dikatakan bahwa FSLDK lebih mendominasi. Selain dari jumlah, FSLDK didukung bahwa LDK UAKI menjadi/memiliki akses paling banyak untuk menyebarkan dakwah karena posisinya sebagai LDK yang berada di tingkat universitas.

Kontestasi Mendefinisikan Lembaga Dakwah Kampus

Usaha Memperebutkan Kebenaran

Secara garis besar sebenarnya persaingan yang dilakukan oleh kelompok Islam yang ada di UB dapat dikatakan berkaitan antara wacana Islamisme (dari Timur Tengah) dengan Islam-Nasionalisme (Indonesia) dengan tarbiyah yang menjadi pihak dominan. Wacana Islamisme ini mengharapkan kehidupan mahasiswa yang selalu menghadirkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dan kembali kepada Al Quran dan hadits. Salah satu ranahnya dapat di implementasikan melalui LDK dan dapat dilihat dari pendefinisian-nya terhadap kegiatan mentoring, kajian rutin bahkan LDK itu sendiri .Di dalam LDK UB, FSLDK

Sunan Kalijaga) tahun 2016 menemukan hasil temuan yang sama kaitan antara FSLDK berafiliasi dengan gerakan tarbiyah dan BKLDK condong ke HTI.

merupakan kelompok dominan (doxa) sehingga kegiatan keagamaan mahasiswa di UB bernuansa tarbiyah.

Dalam **memaknai arti dan fungsi LDK**, tarbiyah mampu menyebarkan wacana bahwa LDK dalam kondisi yang baik dan tugas para kader agar mampu membumikan kembali kegiatan LDK. Di dalam kegiatan **mentoring**, tarbiyah berhasil membangun wacana bahwa mentoring merupakan kegiatan yang penting di zaman modern untuk mengenalkan Islam, terlepas bahwa yang menjadi pemateri tidak selalu ustad dan kegiatan mentoring yang dekat akan kepentingan politik. Dalam **kajian rutin**, tarbiyah mampu mengembangkan konsep kegiatan tematik yang bertujuan untuk menarik massa agar mahasiswa tertarik untuk hadir. Dilihat dari **alasan yang melatarbelakangi**, kader tarbiyah memilih LDK karena ingin mencari lingkungan yang mendukung seperti lingkungan sebelumnya (ketika berada di SMA atau pesantren). Serta hubungan LDK-KAMMI juga menjadi alasan karena dengan aktif di kedua organisasi ini dapat saling menjaga satu sama lain.

Pendefinsian tersebut akhirnya menciptakan habitus kelas yakni antar-kelas yang mendominasi dan terdominasi. Tarbiyah dapat menjalankan keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan dapat dirasakan oleh banyak mahasiswa karena jumlah dan posisi penting yang dimiliki. Selain itu FSLDK juga memiliki kesamaan dengan KAMMI, selain AD/ART yang berasaskan Islam ataupun berasaskan Al Quran dan Sunnah, *dhawabith* (aturan) yang diterapkan juga memiliki kesamaan. *Dhawabith* inilah yang kemudian mengatur perilaku para anggota mulai dari sifatnya yang umum sampai kepada hal pribadi. Hal yang bersifat umum seperti aturan dalam rapat, yang mengharuskan rapat diawali dengan pembacaan Al Quran, *sharing* informasi/motivasi sampai pada penutup dengan doa *kafaratul majelis*. Ketika dzikir, yang digunakan adalah buku *Al-Matsurat* karangan Hasan Al Banna. Selain itu dalam berkomunikasi juga terdapat adab-adab terutama yang mengatur hubungan antara *ikhwan-akhwat*. Penggunaan media sosial juga tidak lepas dari aturan, dimana penggunaan kalimat yang baik dan sopan diatur sampai pada penggunaan foto untuk keperluan media sosial. Tidak hanya itu, dalam hal penampilan tarbiyah juga dianggap sebagai model dalam menampilkan seseorang yang taat. Terutama kaitannya dengan *akhwat*, yang sering dijumpai menggunakan rok dan berjilbab lebar.

Nilai-nilai tarbiyah yang dominan di LDK tentunya membuat kelompok lain akan berusaha memodifikasi atau mengubah nilai-nilai tersebut agar menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan kelompok yang saat ini didominasi. Salah satu caranya adalah melalui bahasa dimana disana juga terjadi persaingan wacana. Wacana dominan (doxa) yang berkepentingan melestarikan dominasinya, dan wacana pinggiran yang terus menggugat wacana dominan (Fashri, 2007:126).

Menggunakan konsep Bourdieu, maka dari semua pendefinisian ini akan membuat mereka yang berada di dalam LDK menciptakan suatu kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif seperti inilah yang kemudian menjadi wacana dominan dan dijalankan oleh semua anggota. Sayangnya wacana seperti ini sudah disadari oleh beberapa kelompok yang mulai memahami nilai-nilai dari tarbiyah. Sehingga, menentang dan mendorong kelompok lain untuk mengubah nilai-nilai tersebut dengan mengusulkan atau memunculkan wacana yang berbeda dari yang tarbiyah konsepsikan. Wacana tandingan ini disebut oleh Bourdieu dengan *heterodoxa*. Wacana ini mengambil strategi subversi di mana kelompok yang minim secara modal terus mempersoalkan otoritas wacana kelompok dominan dalam mendefinisikan dunia sosial (Fashri, 2007). Wacana tandingan ini adalah upaya yang dilakukan agar kelompok lain yang didominasi mampu meningkatkan posisinya. Sehingga, dapat menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan kelompok yang didominasi.

Sudah ada sikap dan wacana yang dilakukan kelompok-kelompok Islam untuk menandingi tarbiyah, terutama dari kelompok Islam nasionalis. IMM sendiri bahkan Muhammadiyah secara keseluruhan dengan tegas sebenarnya sudah menolak gagasan-gagasan tarbiyah (dan PKS) melalui sebuah [1]surat keputusan. Namun, hal itu bukan menjadi sebuah kewajiban untuk tidak bersosialisasi dengan tarbiyah. IMM pun tidak mewajibkan suatu standar berpakaian Islami. IMM tidak mempermasalahkan teknis atau aturan yang ada di LDK, tetapi lebih kepada isi materi LDK itu sendiri. IMM menginginkan kegiatan yang tidak hanya berfokus kepada bahasan mengenai nikah muda atau pembingkaian bahwa Islam sedang sakit. Tetapi, lebih kepada LDK yang lebih terbuka kepada semua kelompok, kajian

[1] Salah satu berita yang membahas ini adalah detiknews. "Pada 2006 PP Muhammadiyah sampai mengeluarkan Surat Keputusan yang menyerukan kepada warganya untuk "mewaspadai" PKS dan tetap menjaga prinsip-prinsip Muhammadiyah". Abdurakhman, Hasanudin (2018). Cita-cita Persatuan Umat Islam. detiknews. Dipetik pada 12 Desmber 2018 pukul 13.30. https://m.detik.com/news/kolom/4327883/cita-cita-persatuan-umat-islam

Islam-ilmu pengetahuan dan membingkai Islam yang sebenarnya bahagia. Itu sudah dilakukan dengan mencoba ikut berperan aktif di LDK dan kritik-kritik yang disampaikan melalui tulisan.

HMI juga hampir sama dengan IMM, yakni mencetuskan wacana LDK yang plural, terbuka pada semua ilmu pengetahuan dan pengemasan yang santai (termasuk dalam berpakaian) sehingga semua kelompok ikut aktif di LDK. Bahkan hal itu sudah dibuktikan dengan dibuatnya Remas di salah satu fakultas yang diharapkan menjadi contoh bagi LDK untuk mengadakan kegiatan dimana kegiatan tersebut mengundang berbagai macam ustadz dari tiap kelompok kemudian mengajak semua kelompok untuk aktif.

Berbeda lagi dengan PMII, jika dilihat di UB memang sebenarnya sangat jarang anak PMII untuk ikut aktif di LDK, terutama FSLDK dan BKLDK. Perbedaan ideologi yang membuat PMII merasa "wegah" berurusan LDK karena merasa ideologi tersebut mengekang kebebasan. Selain itu masih adanya anggapan bahwa PMII adalah organisasi besar dan sudah ada sejak dulu, dimana yang menjadi pesaing hanya HMI dan LDK bukan ranah yang menarik untuk diperebutkan. Hampir sama dengan IMM dan HMI yang dimana LDK yang ideal adalah LDK yang terbuka pada semua ilmu pengetahuan dan ditambah dengan keilmuan Islam yang mendalam yang tidak hanya menggunakan beberapa *hadits* untuk menilai suatu persoalan dan hanya berhenti dalam Al Quran/hadits dalam mengambil tindakan. Karena, kondisi ini dapat menimbulkan pemahaman yang terlalu mudah menyalahkan.

Setelah melihat kelompok Islam dalam tataran mahasiswa yang mempersoalkan wacana kelompok dominan, maka menarik untuk melihat persoalan yang dicetuskan oleh kelompok Islam yang lebih luas. Muhammadiyah – juga telah dijelaskan dalam pembahasan IMM – berusaha menjadi kelompok yang berada pada posisi netral atau di tengah-tengah dalam suatu perdebatan. Muhammadiyah tidak mempermasalahkan aturan yang mengikat yang diterapkan LDK, namun lebih kepada LDK yang terbuka pada semua kelompok (baik pemateri maupun isi materi) demi kebaikan LDK itu sendiri. Posisi yang tidak terlalu bersaing yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini juga dapat didasari karena Muhammadiyah dan tarbiyah juga memiliki kesamaan. Karena, sama-sama berasal dari Timur Tengah dan amalan ibadah yang juga hampir sama. Hanya saja Muhammadiyah

berjuang bersama NU untuk kemederdekaan Indonesia. Selain itu Muhammadiyah sendiri juga memiliki LDK sendiri yang khusus untuk menjaga dan menjadi tempat untuk mendidik kadernya, yakni IMM dan organisasi pemuda Muhammadiyah lainnya. Sehingga wajar jika LDK menjadi sarana untuk mereka memahami nilai-nilai tarbiyah.

Dominasi satu nilai yang ada di LDK membuat kader NU merasa "gelisah" yang menyebabkan kader NU memilih tidak aktif di LDK. NU menganggap LDK sebagai tempat yang hanya mengurusi simbol-simbol keagamaan, sehingga esensinya sedikit yang terlihat. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh LDK juga diragukan kebenarannya, karena tidak langsung belajar dari ustadz atau ulama yang sanad-nya jelas, melainkan kepada sesama mahasiswa. Sehingga pemahamannya diragukan dan justru kepentingan politiklah yang terlihat. Upaya yang dilakukan oleh kelompok NU yakni melalui media sosial yakni *Line* dan *Instagram*. Dengan media sosial berbagai fenomena atau kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan kelompok Islam baik lingkungan kampus atau nasional selalu ditanggapi oleh akun tersebut dengan menggunakan perspektif NU. Serta menggunakan analisis keagamaan dan didukung oleh berbagai data. Tidak jarang tanggapan tersebut yang dapat memancing kontroversi. Tindakan ini dilakukan diharapkan dapat membuka kesadaran lagi bagi kader NU yang mulai dirasa tergerus rasa kepemilikannya. Kritik yang diberikan kepada semua kelompok Islam terutama yang berasal dari Timur Tengah.

Usaha ini juga dilakukan untuk membuka kesadaran mahasiswa lain (terutama mahasiswa baru atau yang ingin belajar Islam) yang ingin melihat perspektif berbeda dengan fenomena keagamaan yang ada di universitas. Salah satu wacana tandingan yang juga dihembuskan di media sosial yakni mengenai pentingnya menjadi Islam yang moderat. Selain itu pentingnya berpegang pada Pancasila yang dapat menjaga seluruh agama-agama yang ada di Indonesia. Tindakan lainnya adalah menyadarkan para anggota untuk kembali aktif di LDK.

Ideologi dominan dari tarbiyah yang kemudian menjadi persoalan bagi kelompok Islam-nasionalis, mendapatkan dukungan (orthodoxa) dari berbagai kelompok yang membuat tarbiyah semakin mapan pada posisi yang sekarang. *Orthodoxa* merupakan wacana yang bertujuan mempertahankan *doxa*. Salafi pada dasarnya tidak secara terang-terangan mendukung suatu kelompok, hanya saja mereka tetap setuju dengan fungsi LDK saat ini.

Hanya saja, LDK yang baik bagi mereka adalah LDK yang mampu memberikan keilmuan yang mendalam dengan tidak fanatis pada suatu golongan demi terciptanya umat yang satu. Salafi memberikan penerimaan kepada kelompok yang berkuasa saat ini untuk terus menyebarkan nilai-nilai Islam. Begitu juga dengan HTI, LDK saat ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan memang perlu ada peningkatan lagi untuk terus "membumikan" kegiatan-kegiatan agar dakwah yang dilakukan dapat masuk ke mahasiswa. Dukungan HTI pun sudah dalam bentuk tindakan dengan sudah terjalin kembali *silaturahmi* antara FSLDK dan BKLDK di UB yang selama ini sangat jarang terlihat bekerjasama.

Bentuk *orthodoxa* juga dapat ditemukan dalam bentuk [1]*dhawabith* (aturan/ketentuan). Dalam usaha *orthodoxa* yang berusaha mendukung *status quo* adalah dengan strategi defensif dan strategi pelestarian (conversation), di mana wacana kritis dibungkam agar tidak menganggu "kenyamanan" kelompok dominan (Fashri, 2007:126). Berdasarkan data dari beberapa LDK, baik UAKI dan LDK fakultas (FSLDK) memiliki kesamaan dalam menerapkan aturan. Salah satu aturan adalah ketika ingin menyampaikan pendapat maka harus dengan cara yang baik dan berupaya meninggalkan perdebatan, ketika suatu keputusan sudah tercipta maka diharapkan untuk menerima semua keputusan. Keputusan inilah yang kemudian dilakukan oleh ketua umum sebagai pemimpin dari *syuro* (rapat). Maka jika terdapat masukan dari kelompok lain, KAMMI selaku kelompok yang paling sering menjadi ketua umum berhak memutuskan suatu perkara.

Ketua Umum LDK kemudian menjadi posisi yang sangat penting bagi KAMMI jika masih menginginkan nilai-nilai KAMMI atau ideologi *tarbiyah* tetap eksis di LDK. Ketua umum sendiri dipilih bukanlah berdasarkan hasil voting (suara terbanyak) melainkan dipilih oleh Majelis Syuro (mantan ketua umum dan BPH sebelumnya). Majelis Syuro inilah yang nantinya akan menilai para calon yang dianggap tepat untuk menjadi ketua umum, melalui forum diskusi yang tidak melibatkan para anggota LDK dan dengan berbagai pertimbangan seperti perilaku, keaktifan dalam mentoring, kedewasaan, pengalaman dan pertimbangan organisasi lain yang diikuti. Aspek pengetahuan memang tidak menjadi tolak ukur yang terlalu penting dalam penentuan ketua umum, tetapi kemampuan mengatasi masalah

[1] Dhawabith yang di dalamnya merupakan berbagai macam aturan dimana berfungsi untuk mengatur anggota (baik laki-laki, perempuan ataupun interaksi laki-laki dan perempuan), mengelola media sosial sampai pada aturan dalam sebuah perjalanan.

menjadi aspek yang ikut dinilai. Pada tahap ini merupakan strategi KAMMI (strategi reproduksi) dalam bertarung dengan kelompok Islam lainnya, tetapi dengan cara yang lebih aman, dapat dibuktikan bahwa FSLDK dan UAKI, mereka yang menjadi ketua umum berasal dari KAMMI, atau paling tidak merupakan seorang simpatisan.

Ketika ketua umum sudah terpilih, maka penentuan BPH (Badan Pengurus Harian) LDK juga ikut menentukan dalam membungkan suara kelompok Islam lainnya. Mereka yang dipilih menjadi BPH selain dari KAMMI, juga terdapat dari mereka yang menjadi simpatisan, atau jika tidak merupakan orang dari kelompok Islam lain yang mudah dikendalikan. Oleh karena itu nilai-nilai KAMMI akan dapat berjalan, walau terdapat perbedaan dalam usulan mengenai kegiatan oleh kelompok lain. Maka di sinilah keuntungan dari adanya modal, usulan yang berbeda tersebut akan ditahan atau disimpan terlebih dahulu yang kemudian, jika belum terdapat keputusan yang tepat, maka akan dibahas di lingkup yang struktur yang lebih tinggi dan disampaikan di waktu selanjutnya. Disinilah letak penentuan dari usulan tersebut, terdapat keputusan yang ditunda (pending) jika usulan tersebut memunculkan perbedaan yang penting dan ketua umum menjadi aktor penting dalam menentukan sebuah keputusan.

Cara tesebut memang sangat efektif untuk menghindari nilai-nilai yang membahayakan bagi keberlangsungan kelompok dominan. Walaupun pada mulanya memang aspirasi akan ditampung, namun hal itu hanya upaya untuk memperlihatkan bahwa LDK menampung semua aspirasi, tetapi tetap bahwa tidak semua aspirasi akan dilaksanakan dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Peran Modal dalam Persaingan

Persaingan yang dilakukan oleh tiap-tiap kelompok untuk memperbaiki posisi atau bahkan mengambil alih menjadi kelompok dominan tentu tidak hanya sebatas pada menyebarkan wacana, melainkan didukung juga oleh modal yang dimiliki sehingga suatu ranah dapat memiliki arti. Dari keempat modal (ekonomi, simbolik, budaya dan social), terdapat kesamaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Islam yang ada di UB dimana lemahnya modal ekonomi. Hal ini dikarenakan status mahasiswa dan belum bekerja masih banyak terdapat di LDK. Sehingga materi yang digunakan masih berputar kepada pemenuhan kebutuhan. Salah satu aspek yang kemudian juga termasuk dalam modal

ekonomi adalah pemanfaatan teknologi untuk menunjang dakwah. Tetapi kembali bahwa di era teknologi saat ini hampir semua kelompok dapat mengakses modal ekonomi yang dilihat dari kepemilikan dan penggunaan teknologi. Hanya saja memang ada beberapa kelompok yang lebih intensif dalam memanfaatkan teknologi untuk menebarkan wacana keagamaannya.

Modal yang kemudian menjadi bekal untuk melawan dominasi *tarbiyah* yang dimiliki adalah modal sosial dan budaya (pengetahuan). Modal sosial dapat dilihat bahwa NU memiliki basis massa yang banyak termasuk di UB, tidak hanya mahasiswa, juga termasuk di kalangan dosen dan bahkan rektorat. Dari sisi mahasiswa kerap kali dari NU melahirkan mahasiswa yang berprestasi sehingga tak jarang mereka juga menjadi orang kepercayaan dari beberapa dosen yang memegang jabatan di fakultas ataupun di universitas. Tidak hanya menjadi modal sosial namun ini dapat menjadi modal simbolik. Kelompok NU juga mendapatkan dukungan dari keputusan pemerintah yang melarang nilai-nilai radikal berada di kampus. Semua organisasi di UB harus taat pada Pancasila dan Undang-Undang, sehingga kondisi bangsa Indonesia juga akan mempengaruhi kondisi LDK. Walaupun dari segi kader kelompok NU sangat banyak, namun tidak berlaku di LDK. Kelompok NU cenderung berhenti di tengah jalan karena tidak nyaman dan akhirnya hanya sedikit kader NU yang mengikuti LDK sampai akhir. Walaupun masih ada yang bertahan, itu dikarenakan memang ingin berdakwah atau alasan lainnya adalah ada hubungannya antara kelompok NU yang kemudian juga ikut KAMMI, sehingga mereka tetap berada di LDK. Selain itu modal budaya juga dimiliki karena pengetahuan yang mendalam terkait Islam. Modal ini terbangun dari pendidikan dasar sampai pada mengengah atas yang sudah tersebar di Indonesia.

Kelompok Muhammadiyah juga ikut bersaing, hanya memang tidak segencar dan terlihat seperti yang dilakukan oleh kelompok NU. Hal ini dapat dimaklumi karena Muhammadiyah menjadikan LDK sebagai tempat untuk belajar Islam dan berdakwah. Dari segi modal sosial Muhammadiyah tidak terlalu kuat karena anggota hanya akan dekat dengan orang yang sudah dikenal baik yang kemudian mampu diajak untuk berdakwah. Walaupun ada nilai-nilai yang masuk karena interaksi dengan kelompok lain, hal itu akan tetap terima, tetapi tetap akan disaring dengan melihat berbagai referensi dan semacamnya. dari segi budaya Muhammadiyah dapat dikatakan kuat, hal ini juga tak lepas dari adanya

pendidikan khusus yang didirikan oleh Muhammadiyah. Sehingga, nilai-nilai Muhammadiyah yang didapat ketika SD sampai SMA dapatditerapkan, dan inilah yang kemudian berdampak pada pengetahuan kader dari kelompok Muhammadiyah. Selain itu mereka juga tidak hanya aktif di LDK, tetapi juga memilih aktif di kegiatan lain untuk menambah pengetahuan, seperti di kegiatan-kegiatan ilmiah.

Tidak berbeda jauh dengan IMM, modal sosial IMM tidak terlalu kuat di LDK, karena dari segi jumlah kader IMM di tiap fakultas itu sedikit. Itu dengan catatan kader IMM yang memilih untuk aktif di LDK, karena memang IMM sendiri merupakan lembaga dakwah Muhammadiyah di lingkup kampus, sehingga tidak jarang kadernya lebih memilih untuk aktif di IMM.. Bahkan tak jarang IMM dalam berdakwah justru mengajak orang yang berasal dari PMII atau NU karena memiliki kesamaan yakni kelompok Islam moderat. Dari modal sosial yakni keluarga, pengetahuan akan ke-Muhammadiyah-an mampu diteruskan dari generasi ke generasi sehingga modal budaya menjadi kuat selain di satu sisi memang dorongan atau keinginan untuk membaca buku juga kuat. Yang membedakan dengan IMM, saat ini juga ikut dalam perpolitikan kampus di UB, sehingga mereka memahami perpolitikan yang ada di LDK.

Modal yang dimiliki PMII hampir sama dengan kelompok NU, yaitu kuat pada modal budaya. Pendidikan pondok pesantren yang diterima sejak kecil kemudian lingkungan sekitar rumah juga membuat nilai-nilai NU semakin tertanam. Ditambah dengan pengetahuan yang didapat dari PMII sendiri yang juga mengadakan diskusi sehingga menambah wawasan dalam hal politik. Didukung juga dengan pembawaan karakter yang fleksibel, sehingga dalam hal sosialisasi-pertemanan, ketika masuk di LDK sudah cukup lama mulai berusaha membangun modal sosial dengan menerima dan bisa bergaul dengan kelompok lain terutama aktivis LDK, walaupun dalam syariat sangat bertentangan dengan LDK (tarbiyah). Kemudian yang menjadi pembeda dengan kelompok NU selaku induk dari PMII adalah sikapnya yang fleksibel yang kemudian justru juga ikut memunculkan rasa malas untuk bersaing di LDK karena aturan yang ketat di LDK.

Kelompok HMI juga tidak terlalu tertarik untuk bersaing dengan KAMMI dan bahkan cenderung menutup diri dari kerjasama yang coba ditawarkan oleh FSLDK. Karena memang, dominasi KAMMI yang sudah sangat kuat dan kemudian berbedanya nilai Islam KAMMI

dengan HMI membuat mereka juga tidak terbiasa dengan ke-Islam-an versi KAMMI. Sehingga, saat ini timbul rasa "minder" dan lebih memilih menjalankan Islam versi HMI yang lebih fleksibel. Jika disandingkan antara HMI, FSLDK dan BKLDK, maka HMI memiliki modal sosial yang lemah. Karena mereka hanya berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada di Forsa (LDK Fakultas Hukum UB), yang memang berbeda jika di ranah perpolitikan kampus mereka selalu memiliki semangat. Dapat dilihat bahwa HMI yang memegang LDK pun sangat jarang dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Tetapi tetap dapat dikatakan HMI memiliki modal sosial yang kuat. Karena dengan banyaknya anggota mereka, tak jarang LDK menjadi tempat untuk mentrasnfer ilmu yang ada di HMI seperti kegiatan diskusi. Banyaknya anggota mereka yang dapat ditemui di setiap fakultas di UB tentu menjadi potensi yang sangat menguntungkan seandainya HMI ingin berbicara banyak di ranah LDK. Modal simbolik yang dimiliki oleh HMI di Forsa tidak berfokus untuk merebut dominasi *tarbiyah*, melainkan mempertahankan kondisi Forsa yang saat ini. Dimana dengan kuasa yang dimiliki mereka, membuka keran bagi para junior HMI ataupun temannya yang memiliki kepentingan di HMI.

KAMMI yang menjadi kelompok dominan, menggunakan modal untuk mempertahankan posisinya sebagai kelompok dominan. Modal sosial menjadi modal yang kuat yang dimiliki oleh KAMMI, terutama hubungannya dengan pejabat dekan ataupun rektorat. Hal ini disebabkan karena aktor-aktor petinggi KAMMI yang juga menjadi petinggi di LDK selalu membangun komunikasi dan hubungan dengan para pejabat seperti sering berkunjung ke kantor, sering meminta nasehat dan tak jarang juga sering berkunjung ke kediaman para pejabat fakultas/universitas. Kader KAMMI memberikan pintu bagi para pejabat untuk mengusulkan LDK seperti apa yang ideal untuk mahasiswa. Walaupun terlihat seolah menjadi pintu bagi nilai-nilai lain untuk masuk, namun tetap KAMMI yang menjalankan LDK lah yang akan memutuskan kegiatan seperti apa yang cocok.

Pemberian pintu bagi nilai lain pada kegiatan kunjungan itu hanya merupakan cara agar LDK suatu saat dapat meminta bantuan dengan dosen yang bersangkutan. Selain modal sosial yang hubungannya dengan struktur luar, KAMMI juga memiliki modal sosial yang kuat ketika berada di LDK. Hal ini tentunya tidak lepas dari hubungan antara LDK-KAMMI. Sehingga, mampu membentuk nuansa yang "sama nyaman"-nya bagi mereka yang

mengikuti kedua lembaga tersebut. Mereka yang ikut LDK juga mengikuti KAMMI karena sudah saling mengenal dan nilai keagamaan yang sudah terbentuk baik di KAMMI ataupun LDK. Tapi justru inilah yang menjadi blunder yang kemudian menjadi permasalahan penting LDK yakni permasalahan mensosialisasikan kegiatan agar kegiatan dapat sampai kepada mahasiswa lain. Kuatnya modal sosial di kalangan LDK-KAMMI akhirnya membuat mereka lebih memilih berdakwah bersama-sama. Karena rasa nyaman bergaul di kalangan mereka sendiri, akhirnya ini menciptakan zona nyaman yang terkadang tidak disadari bahwa ini menjadi permasalahan kenapa kegiatan rohis tidak mampu menarik banyak massa.

Selain modal sosial, modal simbolik tentu didapat oleh KAMMI. Modal simbolik didapat karena banyaknya kader KAMMI yang di LDK dan bahkan menjadi ketua umum di LDK yang bersangkutan. Bahkan tidak hanya dari LDK, KAMMI juga memperoleh modal simbolik dari lembaga eksekutif, jika KAMMI mampu memenangkan perpolitikan di fakultas ataupun universitas. Lembaga eksekutif yang dipegang KAMMI tentu akan mempermudah akses LDK agar tetap eksis baik dari sisi kegiatan maupun anggota.

Selain modal simbolik, KAMMI juga memiliki modal budaya. KAMMI tentunya juga mencari kader yang dapat dikatakan taat dalam beragama dan paham akan nilai-nilai Islam. Ketika sudah berada di KAMMI, nilai-nilai *tarbiyah* tentu juga mulai diperkenalkan. Sehingga, LDK menjadi salah satu tempat untuk menerapkan ajaran KAMMI. Masuk LDK dengan alasan karena mencari lingkungan yang nyaman dan untuk menjaga nilai-nilai semasa di pondok ini memperlihatkan bahwa tarbiyah pun sudah diperkenalkan pada beberapa jenjang pendidikan. Selain itu modal budaya juga terbangun dari kegiatan seperti diskusi tokoh. Tokoh yang dibahas meliputi Hasan Al Banna, Sayd Qutb, Fahri Hamzah dan kajian buku seperti karangan dari Anis Matta.

Modal dari kelompok yang mendukung dominasi *tarbiyah* yakni HTI, justru lebih sibuk untuk mempertahankan eksistensinya, karena beberapa rohis HTI (BKLDK) di universitas mengalami permasalahan yang memang ada hubungannya dengan ormas HTI di Indonesia yang dibubarkan. Sehingga penggunaan modal HTI saat ini lebih berfokus untuk mempertahankan eksistensi dakwahnya, ketimbang membantu *tarbiyah* ataupun menyerang wacana yang terus dilakukan oleh kelompok NU. Hanya modal sosial-lah yang dapat dikatakan kuat. Hal ini karena mereka memanfaatkan alumni-alumni baik dari HTI maupun

dari aktivis dakwah BKLDK untuk mempertahankan nilai-nilai mereka agar tetap diakui di UB. Selain itu HTI juga menggunakan cara yang hampir sama dengan *tarbiyah* yakni mencoba membuka ruang komunikasi baik dari dekanat maupun rektorat untuk kembali mendapatkan kepercayaan.

HTI juga menggunakan modal simbolik untuk mempertahankan nilai-nilai mereka, dimana orang-orang BKLDK yang memiliki posisi dijadikan pemateri di beberapa kegiatan seperti kajian. Selain itu juga menggunakan dekanat yang berfungsi untuk mengayomi LKM agar gerak dakwah mereka di LDK dapat terus berjalan. Modal simbolik juga didukung dengan memiliki akses lembaga yang mampu mereka kuasai yakni LDK (BKLDK), tetapi memang tidak terlalu kuat karena saat ini sedang dihambat geraknya. Saat ini dakwah yang dilakukan terkesan berhati-hati. Akses juga menjadi lebih sulit karena dampak dibubarkannya ormas HTI dan beberapa buletin yang selama ini dianggap berhaluan HTI juga sudah mulai diketahui. Tetapi di UB, HTI terus berusaha mempertahankan nilai-nilai mereka melalui kajian dimana yang menjadi pemateri adalah dari kalangan mereka sendiri yakni BKLDK. Hal ini, kembali, juga tak lepas bahwa HTI tidak memiliki modal budaya karena nilai-nilai mereka baru dapat diterima ketika jenjang perkuliahan.

Begitu juga dengan kelompok Salafi yang sebenarnya juga tidak terlalu banyak memiliki modal di LDK. Modal sosial misalnya, kelompok Salafi hanya kuat pada mereka yang menjadi teman dekatnya saja. Memang jika dilihat kelompok Salafi (Salafi-KAMMI) tidak se-sosial mereka yang berada di dalam suatu organisasi seperti KAMMI (yang lainnya) yang sering bersama di berbagai kegiatan. Tidak adanya lembaga yang khusus yang menampung para kader Salafi juga ikut mempengaruhi lemahnya modal simbolik. Tetapi untuk modal budaya, kelompk Salafi dapat dikatakan kuat. Bagaimana mereka memahami suatu fenomena sosial itu berusaha dijawab dengan menggunakan Al-Quran ataupun *hadits*. Hal ini tentu disebabkan rajinnya mereka untuk selalu datang ke kajian, bahkan setiap hari entah itu kajian umum ataupun kajian khusus. Mulai dari belajar membaca Al Quran sampai pada membahas kitab-kitab. Sehingga, selalu berusaha untuk menghubungkan permasalahan kehidupan dengan nilai-nilai Islam yang telah dipelajari. Walau kasusnya hampir sama dengan HTI dimana nilai mereka baru dapat tersebar secara masif ketika seseorang lulus dari SMA, namun saat ini nilai-nilai Salafi sudah mulai berani masuk melalui jenjang pendidikan

seperti sudah adanya pondok ber-*manhaj* salaf. Namun ini juga tetap dampak dari perkembangan teknologi yang terus menebarkan nilai-nilainya. Sehingga, mampu diterima oleh mahasiswa terutama melalui ustadz yang penyampaiannya dapat diterima seperti Khalid Bassalamah dan beberapa ustadznya pun ada yang tidak terlalu keras.

Tabel 1. Modal Kelompok Islam di LDK

Modal / Kelompok	Modal budaya	Modal ekonomi	Modal sosial	Modal Simbolik
KAMMI	√		√	√
IMM	√			
HMI			√	
PMII	√			
Salafi	√			
HTI			√	√
NU	√			
Muhammadiyah	√			

(Sumber: Pengolahan Data Penelitian)

Uraian tersebut secara ringkas memperlihatkan bahwa modal yang dibawa melalui habitus akan membentuk kelas dominan, dimana modal yang memiliki pengaruh besar adalah modal ekonomi dan budaya. Memiliki modal simbolik tentu membuat dominasi KAMMI dalam menerapkan nilai ke-Islam-annya semakin kuat. Melalui modal simbolik inilah KAMMI mampu "meresmikan" nilai-nilai mereka. Sehingga, menjadi penentu kegiatan keagamaan yang diterapkan di UB. ini yang kemudian disadari oleh kelompok NU sebagai "lembaga dakwah versi mereka". Walaupun di dalam LDK terdapat orang dari berbagai kelompok tetapi karena mempunyai modal ini akhirnya Islam versi *tarbiyah* lah yang dilaksanakan. Karena, mereka memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menyampaikan suatu hal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Persaingan yang terjadi di dalam Lembaga Dakwah Kampus dalam praktek kegamaan pendidikan melibatkan beberapa kelompok Islam, baik yang lingkupnya nasional

maupun mahasiswa. Kelompok-kelompok yang ada di dalam persaingan ini adalah Salafi, HTI, NU, Muhammadiyah, KAMMI, HMI, HTI, PMII dan IMM. Kelompok tersebut saling mendefinisikan kegiatan LDK yang paling tepat untuk mahasiswa. Namun, KAMMI akhirnya menjadi *doxa* dan mendefinisikan LDK seperti apa yang baik untuk menyebarkan nlai-nilai Islam melalui kegiatan keagamaan yang diterapkan. Dominasi ini akhirnya membuat praktek keagamaan mulai dari aspek ritual seperti aturan di LDK, mentoring, kajian rutin dan aspek ketaatan lebih bernuansakan KAMMI.

Terdapat nilai-nilai Islam lain (heterodoxa) yang kemudian ditawarkan untuk mengganggu posisi dominan ini seperti yang dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, PMII, IMM dan HMI. NU sendiri sudah mulai melakukan pergerakan dengan mulai aktif di LDK dan media sosial dalam membangun wacana ke-NU-an. Melalui modal budaya kelompok-kelompok ini mencoba memperbaiki posisinya yang selama ini terdominasi. KAMMI yang memiliki akumulasi modal lebih banyak di satu sisi berusaha mempertahankan dominasinya dan didukung oleh kelompok HTI dan Salafi yang menjadi kelompok *orthodoxa*. Tapi di LDK peran penting dimiliki ketua umum sebagai agen yang mampu menghambat nilai-nilai lain untuk masuk.

LDK sebagai corong keagamaan mahasiswa memiliki peranan strategis dalam membawa atmosfir dan corak beragama kepada mahasiswa. Corak beragama ini sangat ditentukan oleh kelompok agama di luar LDK mana yang lebih dominan. Untuk memenangkan tafsir agama yang ada di dalam LDK, maka masing-masing organisasi Islam ekstra kampus harus memahami modal apa yang harus dimiliki untuk memenangkan kontestasi di dalam LDK yang membawa pada dominasi atas tafsir LDK yang ada di dalam kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurakhman. (2013). *Gerakan Tarbiyah 1980-2010 : Respons Umat Islam Terhadap Gerakan Transnasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Asry, M. Y. (2012). *Gerakan Dakwah Islam dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Jakarta.

Aunullah, I. (2006). *Bahasa dan Kuasa Simbolik dalam Pandangan Pierre Bourdieu.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, skripsi tidak diterbitkan.

Creswell. (2014). *Research Design.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fashri, F. (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol. Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu.* Yogyakarta: Juxtapose.

Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu.* Yogyakarta: Jalasutra.

Iskandar, M., Azra, A., & Hisyam, M. (2015). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Intitusi dan Gerakan.* Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

Karnanta, K. Y. (2005). Sastra 'Mungkin': Kontestasi Simbolik Andrea Hirata dalam Arena Sastra Indonesia. *Jurnal Poetika*, Vol III No 2.

Miichi, K. (2003, November). Islamic Youth Movement in Indonesia. *Research and Reports IIAS Newsletter*, p. 22.

Rafiuddin. (2016). *Peranan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Pada Perilaku Mahasiswa (Studi Kelompok Belajar Muslim Fakultas Teknik UNM).* Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Rosyad, R. (1995). *A Quest of True Islam : A Study of Islamic Resurgence Movement Among The Youth in Bandung, Indonesia.* Melbourne: The Australian National University.

Shobron, S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. *Studi Islam*, 44-62.

Suyati, Huda, S., & Sumarto, W. (2011). *Lembaga Dakwah Kampus Komunitas Eksklusif.* Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Wekke, I. S., Sitompul, A., & Afkari, R. (2016, Agustus 1(2)). INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southest Asia. *Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam dalam Pemikiran dan Dakwah di Indonesia*, pp. 167-184.

Wijaya, W. K. (2009). *Perkembangan Nunaa Islam Universitas Indonesia (SALAM UI) sebagai Gerakan Dakwah Kampus 1998-2003.* Depok: FIB UI, skripsi tidak diterbitkan.

Yin, R. K. (2009). *Studi Kasus Desain & Metode.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse

Handrianus Nino[1]

Perbatasan merupakan pintu gerbang negara yang sekaligus menjadi pintu internasional antara negara yang satu dengan negara lain, oleh karena itu sudah selayaknya bila wilayah perbatasan menjadi wajah dari negara yang bersangkutan. Namun hal tersebut tidaklah nampak pada kenyataan masyarakat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokrat Timor Leste karena kenyataan konflik sosial yang beraneka ragam yang terdapat di sana. Oleh karena itu tulisan ini membahas dinamika konflik yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste terkait konflik tapal batas antara kedua negara. Dengan menggunakan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser, peneliti mencoba mengupas kenyataan konflik sosial yang ada di wilayah perbatasan tersebut, dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, disimpulkan bahwa kenyataan konflik sosial yang ada berdasarkan hasil wawancara ditemukan adanya indikasi konflik yang bersifat struktural dan fungsional karena konflik yang terjadi karena pemerintah tidak melibatkan elemen masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan sehingga penetapan tapal batas tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menimbulkan konflik di antara kedua kelompok masyarakat yang berada di wilayah perbatasan yaitu masyarakat di enam desa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan masyarakat di Distrik Oecusse.

Kata kunci : Konflik Sosial, Konflik Struktural, Konflik Fungsional

[1] Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya. Email

© Handrianus Nino, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.92-100.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):
Nino, Handrianus. 2019. "Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse" Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 92-100. DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.07

The border is the gate of the state which at the same time becomes an international door between one country and another, therefore it is appropriate if the border region becomes the face of the country concerned. But this does not appear in the reality of the people in the North Central Timor Regency who are directly adjacent to the Republic of Timor Leste's Democratic Republic of Timor because of the reality of the diverse social conflicts found there. Therefore, this paper discusses the dynamics of the conflict that occurred in the border region between Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste in relation to the boundary conflict between the two countries. By using the social conflict theory proposed by Ralf Dahrendorf and Lewis Coser, researchers tried to explore the reality of social conflict in the border region, by using a case study approach and qualitative methods, it was concluded that the reality of existing social conflicts based on interviews found indications of conflict. structural and functional because of conflicts that occur because the government does not involve community elements in issuing policies so that the establishment of boundaries is not in line with the expectations of the community, causing conflict between the two groups in the border region, namely the people in six villages in Timor Regency North Central with people in the Oecusse District.
Keywords: Social Conflict, Structural Conflict, Functional Conflict

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat terkenal dengan seribu pulau yang membentang sepanjang wilayahnya, yang terdiri dari 17.508 pulau baik itu pulau kecil serta memiliki perimeter perbatasan yang sangat panjang dengan negara-negara tetangga. Salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa daratan dan berbatasan langsung dengan negara lain adalah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timor-Timur sebelum menjadi sebuah negara yang berdaulat, wilayah ini menjadi bagian dari salah satu provinsi di Indonesia yang ke dua puluh tujuh dan menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1975, di bawah kendali presiden Soeharto. Namun Timor Leste akhirnya berpisah dan menyatakan merdeka pada tahun 1999 melalui jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 agustus 1999 di bawah pengawasan *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET). Setelah berpisah dari NKRI pemerintahan sementara dijalankan oleh PBB melalui *United Nations Transition in East Timor* (UNTAET) hingga penyerahan kedaulatan pada tahun 2002. Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh *United Nations Transition in East Timor* (UNTAET) kepada pemerintahan baru Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintahan sebagai Negara yang merdeka, pemerintah Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) sebagai pelaksanaan amanat rakyat tentu berusaha

untuk mempertahankan semua teritori baik batas darat, laut, dan udara. Salah satu persoalan yang dihadapi RDTL adalah persoalan penetapan perbatasan khususnya perbatasan di darat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disebabkan karena perbatasan darat kedua Negara terdiri dari dua bagian yaitu perbatasan di sekitar Oecusse yaitu suatu *enclave* yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat yang merupakan wilayah NKRI dan terpisah sekitar 60 km dari wilayah induknya, kedua perbatasan sepanjang 149,9 km. yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat dan Timor Leste di bagian Timur, sehingga penetapan batas wilayah merupakan tujuan utama yang harus diselesaikan demi hubungan baik antara kedua Negara Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste.

Sejarah panjang permasalahan konflik tapal batas antara kedua negara Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste dapat dikelompokan dalam lima periode pada masa yang panjang sejak masa kolonialisme hingga saat ini. Pengelompokan periode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. ***Pertama:*** Masa Kolonialisme. Masa ini dimulai pada tahun 1701-1945 di mana pada saat itu Belanda menjajah Indonesia dan Portugis menjajah Timor Leste. Pada periode ini terjadi dinamika pembagian wilayah antara kedua bangsa ini, sebagai batas pengelolaan sumber daya alam, sehingga kedua negara ini sepakat untuk melakukan delimitasi dan demarkasi, yang dikenal dengan *A Convention for Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor*, yang ditandatangani pada tanggal 1 oktober di Belanda, yang tidak berjalan dengan baik, kemudian terjadi perundingan kedua yang dikenal dengan nama *Permanent Court of Arbitration (PCA),* yang dibuat pada tahun 1914. Periode ini berakhir dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, dan wilayah perbatasan berubah nama dari perbatasan Indonesia dan Timor Portugis. ***Kedua:*** Pasca Kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini Indonesia telah merdeka dan memiliki hak untuk mengatur dan mengolah seluruh wilayahnya, tetapi pada masa ini Pulau Timor bagian Timur masih berada di bawah Kolonialisme Portugis sehingga wilayah tersebut dikenal dengan nama Timor Portugis. Pada waktu itu terjadi upaya melakukan demarkasi khusus di wilayah Oecusse yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Portugis. ***Ketiga:*** Integrasi Timor-Timur. Periode ini terjadi pada tahun 1975-1999 di mana pada periode ini kepemilikan wilayah berubah dari Kolonial Portugis menjadi milik Indonesia, dimulai dari Revolusi Anyelir oleh Fretelin yang menyebabkan bangsa Portugis meninggalkan Timor-Timur, dilanjutkan dengan integrasi

Timor-Timur menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke 27 pada waktu itu. Maka batas wilayah yang sudah ada berubah menjadi batas provinsi. Pada masa ini tidak ada konflik antar masyarakat karena baik itu Indonesia dan Timor-Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa ini juga dilakukan upaya oleh Indonesia terhadap penentuan batas-batas wilayahnya namun tidak diakui oleh International Boundary atau Pengakuan Internasional. ***Keempat :*** Pra kemerdekaan, yang dimulai pasca referendum Timor-Timur pada tahun 1999-2002. Pada saat inilah lahir sebuah negara baru yang difasilitasi oleh PBB melalui UNAMET (*United Nation Mission in East Timor*), sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Timor-Timur diwakili oleh UNTAET, termasuk hubungan bilateral dengan Indonesia hingga penetapan batas-batas negara. Pada masa inilah UNTAET dan Indonesia membentuk *Joint Border Committe* (JBC), untuk melakukan penetapan wilayah perbatasan kedua negara. ***Kelima :*** Kemerdekaan Sebagai Negara Yang Berdaulat, dimulai dari tahun 2002 hingga saat ini. Penegasan batas wilayah kembali dibuat oleh kedua negara karena UNTAET tidak lagi memiliki peran sebagai wakil dari pemerintah Timor-Timur, karena Timor-Timur telah resmi merdeka sebagai negara yang berdaulat dan berubah nama menjadi *Republica Demokratica de Timor Leste (The Democratic Republic of East Timor,* atau dalam bahasa Indonesia Republik Demokrat Timor Leste. Upaya kedua negara untuk menentukan batas wilayah adalah dibentuknya sub-komite yang berada pada level teknis penegasan tapal batas negara yang disebut dengan *Technical Sub-Committe Border Demarcation Regulation* atau disingkat TSC-BDR.

Sampai dengan saat ini permasalahan konflik sosial tapal batas antara Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusse ada enam titik di antaranya adalah ***Pertama ; Bijaelsunan/Oelnasi/Crus***, bagian dari Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, yang berstatus *Unresolved segment* karena status tanah di daerah ini masih steril dan tidak boleh dikuasai kedua negara, baik Indonesia maupun Republik Demokrat Timor Leste. ***Kedua ; Tubu Banat/Oben,*** yang letaknya di Desa Nilulat dan Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat. ***Ketiga ; Nefo Nunpo*** yang letaknya ada di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi Nilulat. ***Keempat ; Pistana*** yang terletak di Desa Inbate dan Nainaban, yang terletak di Kecamatan Bikomi Nilulat. ***Kelima ; Subina*** yang terletak di Desa Inbate dan Nainaban. Masalah tapal batas yang berada di Kecamatan Bikomi Nilulat ini termasuk dalam kategori ***Unsuveyed***

segment karena masyarakat Indonesia yang berada di Bikomi Nilulat menganggap bahwa tanah ini adalah tanah ulayat, yang secara sepihak diambil oleh Timor Leste (Distrik Oecusse), wilayah yang dimaksud seluas ±14 Km, yang jika diterapkannya batas negara berdasarkan traktat tahun 1904 antara kolonial Portugis dan Belanda. Masyarakat mengklaim wilayah ini karena mereka memiliki kesepakatan adat yang sudah terjadi pada masa sebelum Kolonial Belanda dan Portugis menjajah Pulau Timor. Konflik sosial yang terjadi di wilayah perbatasan beraneka ragam, diantaranya seperti penjualan Bahan Bakar Minyak, karena harga yang ditawarkan di Oecusse sangat tinggi, dan adanya pelintas batas secara ilegal, namun yang paling menonjol dari segala bentuk konflik sosial yang ada adalah adanya penetapan tapal batas antara kedua negara, yang bisa berimbas pada persoalan sosial lainnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus. Selain metode studi kasus masih ada metode lain seperti eksperimen, survei, historis, dan analisis informasi dokumenter tetapi peneliti lebih tertarik kepada metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena sangat membantu peneliti dalam menganalisis kasus yang akan diteliti karena metode studi kasus membantu peneliti dalam menjelaskan kasus yang akan diselidiki, menentukan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar relevan, dan apa yang seharusnya dikerjakan sehubungan dengan data yang sudah dikumpulkan tersebut.

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah untuk melihat faktor penyebab terjadinya konflik sosial, dan proses konflik serta melihat peran serta tokoh adat, pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi konflik sosial di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya di beberapa titik potensi konflik yaitu di Bijaelsunan, Tubu, Nefo Nunpo, Pistana, Subina, Bah Ob/ Nelu, dengan Republik Demokrat Timor Leste khususnya Distrik Oecusse.

Penelitian ini lebih menekankan bagaimana proses konflik sosial itu terjadi, kemudian bagaimana melihat aktor-aktor di balik konflik sosial, dan apa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik sosial perbatasan. Situs penelitian adalah tempat berlangsungnya proses pengamatan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Situs dari penelitian ini adalah enam titik konflik yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu: Bijaelsunan/Oelnasi yang terletak di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten

Timor Tengah Utara. Pistana yang terletak di Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Subina yang terletak di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Nelu/Bah Obe yang terletak di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan tiga tahap yaitu: *tahap pertama* : kajian pustaka terhadap berbagai macam riset yang sudah dilakukan di kawasan perbatasan yang disebutkan di atas, baik dari peneliti perorangan, mahasiswa dan lembaga survei. *tahap kedua* : melakukan analisis dan identifikasi komponen-komponen dan aspek-aspek yang terkait dengan masalah konflik sosial yang diteliti dan mengintegrasikan dengan data yang diperoleh di lapangan. *tahap ketiga*: mendeskripsikan permasalahan konflik sosial yang terjadi dan memasukan berbagai macam unsur baru yang memiliki hubungan timbal balik dengan kenyataan konflik yang terjadi pada masyarakat perbatasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua kategori konflik tapal batas antara Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste yaitu *Unresolved segment* dan *Unsurveyed segment*. Daerah yang termasuk dalam kategori *unresolved segment* di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Desa Manusasi tepatnya di Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur. Status tanahnya adalah steril dan tidak boleh dikuasai oleh kedua belah pihak baik masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Timor Leste, serta tanah ini juga belum diukur secara bersama-sama. Masyarakat masih mempermasalahkan tanah seluas 489 bidang, yang panjangnya 2,7 km, atau seluas 142,7 Ha di wilayah tersebut. Pihak Indonesia (masyarakat Manusasi) menghendaki agar batas negara dimulai dari Tugu Bijaelsunan, mengikuti punggung gunung hingga Oben, sedangkan pihak Timor Leste (masyarakat Oecusse), menginginkan agar perbatasan dimulai dari Tugu Bijaelsunan mengikuti Lembah Sungai Miomaffo, sampai dengan Oben (Kolne, 2017). Perbedaan pendapat ini didasari oleh perjanjian adat yang sudah terjadi antara kedua belah pihak pada masa lalu, sehingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan secara pasti dan jelas. Sedangkan daerah yang termasuk dalam wilayah kategori *unsuveyed segment* adalah segment Subina sampai dengan Oben, yang luas wilayahnya sepanjang ±14 Km, yang sebenarnya bagi masyarakat perbatasan Indonesia tanah ini menjadi hak ulayat masyarakat perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat yang meliputi 6 Desa

yaitu: Inbate, Sunkaen, Nainaban, Haumeniana, Nilulat, dan Tubu (Kolne, 2017). Masyarakat mengklaim bahwa wilayah garapan mereka diambil alih oleh pemerintah Timor Leste, jika menggunakan pembagian wilayah perbatasan berdasarkan traktat kolonial Belanda dan Portugis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada indikasi konflik yang penyebab utamanya adalah penetapan aturan mengenai tapal batas antara kedua negara yaitu Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste. Dengan menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser tentang konflik maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar yaitu ***Pertama :*** konflik yang terjadi di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse adalah merupakan konflik struktural fungsional karena penetapan kebijakan terkait perbatasan sangat merugikan masyarakat setempat. Kebijakan pemerintah menetapkan pembagian batas wilayah negara dengan berdasarkan warisan dari kolonial Portugis dan Belanda ketika menjajah pulau Timor. ***Kedua :*** Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada hukum adat (hukum tidak tertulis) dimana telah terjadi perjanjian antara raja Miomaffo (salah satu raja besar di Kabupaten Timor Tengah dengan Raja Amu yang berasal dari Oecusse, ketika terjadi perkawinan pada tahun ±1700. ***Ketiga*** ; koordinasi dan diskusi dengan masyarakat perbatasan khususnya yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara tentang perbatasan untuk memperoleh masukan dari masyarakat sebelum membuat kesepakatan bilateral antara kedua negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konflik sosial perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusse dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya adalah: **Pertama:**Dasar kesepakatan yang digunakan sebagai penetapan tapal batas antara kedua negara yang menggunakan traktat 1904 yang adalah hasil warisan dari pemerintah kolonial Portugis dan Belanda mestinya kembali ditinjau kembali, dengan mempertimbangkan kesepakatan adat yang sudah terjadi di antara kedua kelompok masyarakat di sekitar wilayah perbatasan kedua negara. **Kedua**: Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse merupakan konflik yang bersifat struktural, di mana konflik yang melibatkan masyarakat kedua negara adalah karena produk hukum yang disebabkan oleh pemerintah pusat yang tidak tepat, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan di

tengah masyarakat yang berada di perbatasan. **Ketiga:**Konflik tersebut juga merupakan konflik fungsional di mana konflik yang terjadi juga karena adanya disfungsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun koordinasinya dengan pemerintah daerah yang sangat lemah, sehingga ada potensi saling melempar tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. **Keempat:** Adanya birokrasi yang sangat berbelit-belit menyebabkan tumpang-tindih tanggung jawab pengelolaan masalah perbatasan. **Kelima:** Rekomendasi dan usulan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai perantara masyarakat kepada pemerintah pusat belum ditindaklanjuti secara tegas. **Keenam:** Lemahnya perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan masalah konflik tapal batas antara kedua negara, padahal perbatasan sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar, di mana wilayah perbatasan adalah pintu masuk internasional. **Ketujuh:** Berdasarkan perspektif pendekatan budaya kedua masyarakat yang berada di perbatasan kedua negara memiliki latar belakang satu keturunan yang sama dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang juga sama. **Kedelapan:** Melakukan pemantauan, pengamanan, penertiban kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hasil konvensi dengan negara tetangga. **Kesembilan:** Melakukan perbaikan-perbaikan penting terhadap produk hukum/kesepakatan bilateral yang bersangkutan sehingga tidak memiliki dampak terhadap masalah politik, ekonomi, budaya, keamanan).

REKOMENDASI DAN SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan di atas maka ada beberapa rekomendasi yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius dalam penyelesaian persoalan konflik sosial perbatasan antara Indonesia, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Republik Demokrat Timor Leste atau Distrik Oecusse, di antaranya adalah sebagai berikut: ***Pertama :*** Pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah pusat perlu melakukan negosiasi dengan pemerintah Republik Demokrat Timor Leste dalam menyelesaikan persoalan konflik sosial tapal batas yang terjadi di 6 Desa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang hingga saat ini status tanahnya masih bersengketa. ***Kedua*** : Perlu dilakukan dialog demi mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat di tingkat desa, agar penyelesaian konflik sosial di perbatasan kedua negara tepat sasar, dengan mempertimbangkan kearifan lokal atau kesepakatan tidak tertulis yang sudah terjadi antara masyarakat perbatasan. ***Ketiga :*** Perlunya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah

perbatasan karena kondisi di wilayah perbatasan di enam desa di Kabupaten Timor Tengah Utara hingga saat ini sangat memprihatinkan. ***Keempat :*** Perlu adanya dukungan anggaran baik itu dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah perbatasan menjadi pintu gerbang negara dan internasional. ***Kelima :*** Perlu adanya perbaikan terhadap produk hukum yang berlaku terkait penetapan tapal batas agar tidak lagi terjadi korban dari masyarakat perbatasan antara kedua negara.

Daftar Pustaka

Deeley, N. (2001). *The International Boundaries of East Timor.* Boundary and Territory Briefing.

Kolne, Y. (2015). Implementasi Perjanjian Perbatasan RI–RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi Kasus Di Kabupaten TTU–RI Dengan Distrik Oecusse-RDTL). *Politika: Jurnal Ilmu Politik 5* , 2-30.

Kolne, Y. (2017). Penyelesaian Konflik Perbatasan Un-Resolved dan Un-Surveyed Segmen Melalui Pendekatan Budaya. *POLITIKA* , 5.

Susilo, E. (2010). *Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir.* Malang: UB Press.

Wuryandari, G. (2009). *Keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste : sumber ancaman dan kebijakan pengelolaannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Mengenang Kembali Riwayat Hongkong dan Jepang dalam Kapitalisme Asia abad ke-19 dan ke-20

Saiful Hakam[1]

Ada dua "tradisi besar" dalam perkembangan kapitalisme di Asia Timur dan Tenggara pada abad kesembilan belas bersamaan dengan terbukanya Asia Timur pada ekonomi global. Dua tradisi besar tersebut adalah model Jepang dan model China Hongkong. Keduanya berhasil dalam mengorganisasi dan membangun ekonom. Model Jepang adalah model ekonomi politik korporasi (*mode of corporatized political economy*) sedangkan model China adalah model kemandirian kaum pengusaha (*mode of entrepreneurial deal-making*). Dua model organisasi ekonomi tersebut membawa pada dua perkembangan dan lintasan sejarah yang berbeda. Model China dan Jepang dalam membangun ekonomi pada abad kesembilan belas melontarkan dua perbedaan dalam pembangunan ekonomi. Meskipun mengalami perubahan signifikan pasca Perang Dunia Kedua namun kedua model tersebut tumbuh kembali pada pertengahan kedua abad kedua puluh.

There had been two great tradition in the development of capitalism in East Asia and Souteast Asia during 19th centuries with the link the East Asia in to global economics, which are: Japan and Chinese Hongkong. Both suceeded to organize and develop the economics. Japanese model was mode of corporatized political economy and mode of enterpreneurial deal-making. Both two model had different consequences, dispite it's absense of those model, but they are arise againt in middle of twenth first century.

Keywords: Hongkong, Restorasi Meiji, dan Kapitalisme China, Kapitalisme Jepang

[1] Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Email : saif003@lipi.go.id

© Saiful Hakam, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.101-122.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):
Hakam, Saiful. 2019. "Mengenang Kembali Riwayat Hongkong dan Jepang dalam Kapitalisme Asia abad ke-19 dan ke-20" Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 101-122.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.08

Pendahuluan

Pada 1980-an, Inggris dan China mengadakan perundingan rahasia. Perundingan ini menghasilkan Deklarasi Kerja Sama China-Inggris 1984 (Steve Tsang, 2005). Isi pokoknya adalah Inggris akan mengembalikan Hong Kong pada 1997. Hasil pokok perundingan adalah status Hongkong. China maupun Inggris sepakat bahwa Hongkong akan tetap dijadikan sebagai kota pusat finansial global. Pemahaman tentang Hongkong harus dimulai dengan transformasi kapitalisme. Transformasi ini membuat Hongkong menjadi kota global. Banyak sarjana membahas bangkitnya Hongkong menjadi terkemuka sebagai fenomena pasca Perang Dunia dan menjelaskan keberhasilannya sebagai kemenangan kapitalisme pasar bebas (Lethbridge H. J, 1978; Macintyre, 1985; Cheng, T. Y. 1985). Namun, peran Hongkong dalam ekonomi global perlu ditempatkan dalam sejarah. Hongkong harus dipahami secara utuh dalam lintasan kapitalisme Asia abad kesembilan belas.

Dalam memahami kapitalisme, ada tiga dimensi penting (Hamilton, 2006). Pertama, jangan mengkaitkan kapitalisme dengan negara, namun kaitkanlah dengan orang-orang, perusahaan, uang, produk-produk, industri, dan keterkaitan di antara hal-hal itu. Kedua, pahami kapitalisme sebagai gerakan yang selalu berubah dalam waktu dan ruang. Kapitalisme memiliki karakteristik sejarah dan geografis. Ketiga, pahami kapitalisme adalah aktifitas ekonomi yang kompleks dan beragam cara. Pengusaha mengatur aktivitas-aktivitas kapitalisme, dalam persaingan satu sama lain. Pada saat yang sama, pekerja ingin membatasi aktivitas kapitalisme agar tidak mendominasi kehidupan pekerja. pemerintah berusaha mengaturnya, biasanya dalam sikap oposisi pada beberapa aktor. Selain itu, bankir berusaha menghubungkannya demi keuntungan. Ide besar semua aktivitas kapitalisme adalah bahwa kapitalisme mencerminkan gerakan-gerakan ekonomi yang bersaing dalam ruang dan waktu dan selalu diorganisir dalam beberapa tingkat (Wallerstein,1983; Weber, 1958).

Hamilton menegaskan bahwa jangan pahami Hongkong sebagai Negara Industri Baru, Ekonomi Industri Baru, naga kecil, atau angsa terbang (*flying geese*) (Hamilton, 2006). Semua akronim dan metafora tersebut sangat bersifat biologis, bersifat fungsional dalam pengertian sistem tertutup, yang membuat Hongkong nampak seperti spesies ekonomi yang dilahirkan atau ditetaskan dan tumbuh dewasa. Akan tetapi, Hongkong harus dipahami sebagai tempat yang terdapat percampuran dan persaingan namun tetap mengatur

pergerakan orang-orang, perusahaan, uang, produk, dan industri (Hamilton, 2006). Hal penting harus diperhatikan adalah transformasi kapitalisme Asia, dan peran Hongkong dalam transformasi.

Hongkong menjadi pusat kapitalisme China. Hongkong memikul peran ini segera setelah pendiriannya pada abad kesembilan belas dan melanjutkan peran ini hingga Perang Dunia Kedua. Kemudian, setelah perang dan Revolusi China, Hongkong menjadi lokasi pertama bangkitnya kapitalisme China meskipun dalam bentuk berbeda.

Kapitalisme China Berbasis Niagawan/Pedagang Sedangkan Kapitalisme Jepang Berbasis Negara

Pandangan umum menyatakan bahwa kapitalisme Asia, di luar Jepang, baru muncul sesudah Perang Dunia Kedua. Memang, periode ini merupakan era di mana Hongkong, Singapura, dan Taiwan berkembang menjadi negara maju (World Bank, 1993). Namun, penting diingat kapitalisme China telah berkembang sebelum Perang Dunia Kedua. Pengusaha-pengusaha China bersifat "kapitalistik", bahwa mereka berorientasi mengejar keuntungan secara agresif, kerja swasta, dan gelora mencari peluang kesempatan menciptakan lebih banyak uang (Hamilton 2006). Kerasnya sifat kapitalistik ini telah ada sebelum langit-langit Hongkong, Singapura, dan Taiwan penuh dengan gedung pencakar langit (Wong, S. L. 1988). Kota-kota itu adalah akibat, bukan penyebab, dari perkembangan kapitalisme China (Hamilton, 2006).

Hamilton menjelaskan bahwa keberhasilan kapitalisme di kalangan orang China dan ekonomi yang dikuasai etnis China di luar Republik Rakyat China, ekonomi Taiwan, Hongkong, Singapura, dan banyak negara Asia Tenggara lain,tidak dapat dipahami secara terpisah dari dinamika ekonomi global (Hamilton, 2006). Karena model China dalam keahlian kapitalisme didasarkan pada keahlian individu (*bottom-up individual*) dan strategi keluarga (*family-based strategies*) (Wong S.L., 1985) dalam meraih kesempatan di mana pun mereka berada, dibandingkan dengan strategi korporasi dari atas ke bawah (*top-down corporatist strategies*) dalam menghubungkan kemampuan-kemampuan birokrasi negara dengan kesempatan ekonomi para elit, kapitalisme China terintegrasi dengan dunia kapitalisme itu sendiri (Hamilton, 2006).

Dengan tidak hadirnya ekonomi domestik yang terbingkai secara politik maka bentuk-bentuk kapitalisme China sukar dipahami (*elusive*). Kebanyakan penafsir sejarah Asia

melihat tidak adanya perkembangan kapitalisme pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh di China. Jepang mengalami industrialisasi pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, sementara China secara ekonomi masih terbelakang. Untuk menyokong tesis ini, kebanyakan sarjana menunjukkan secara sederhana kemampuan awal industrialisasi Jepang, terutama dalam industri berat seperti besi dan baja, dan produk-produk terkait seperti kapal, kereta api, truk, dan mobil dibandingkan dengan industri-industri di China. Dengan industri tersebut, para penafsir berpendapat, Jepang membangun angkatan darat dan laut modern yang memenangkan peperangan melawan China pada 1895 dan melawan Rusia pada 1905. Sebaliknya, upaya industrialisasi China tidak berjalan baik. Sementara itu adalah benar bahwa China membangun industri berat milik badan usaha yang dijalankan oleh para pedagang pada abad kesembilan belas, namun industri-industri itu sangatlah tidak berhasil (Liu 1962; Feuerwerker 1958). Selain itu, China kalah dalam setiap peperangan, sejak Perang Candu pada 1840-an hingga Perang Dunia Kedua, hanya di luar periode itu, China dapat mengalahkan Jepang. Berdasarkan atas perbandingan-perbandingan nyata tersebut, maka muncul asumsi bahwa Jepang telah terindustrialisasi sedangkan China tidak.

Perbandingan-perbandingan itu sangat tidak tepat. Karena kerangka waktu terlalu tipis dan definisi kapitalisme juga terlalu kaku. Jika membuat secara tepat perbandingan-perbandingan yang sama di masa kini, perbandingan dalam kemampuan industrialisasi berdasarkan pada industri berat, kita akan mencapai kesimpulan sederhana. Jepang merupakan kekuatan industri. Sementara Taiwan, Hongkong, dan Singapura belum maju. Tiga wilayah ekonomi etnis-China tersebut tidak banyak memiliki industri berat (Hamilton, 2006).

Pada era perang dingin, 1960-1990an, dunia ekonomi didominasi etnis China tidak dicirikan oleh industri berat. Manufaktur-manufaktur China mengkhususkan diri pada perusahaan kecil dan menengah. Pabrik sederhana itu biasanya menciptakan produk konsumsi. Seperti pakaian, sepatu, pesawat TV, kalkulator, komputer. Pada era perang dingin, barang-barang pabrikan itulah yang memenuhi rumah-rumah di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Ahli-ahli ekonomi tahu bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi

negara dan PNB (Produk Nasional Bruto) tidak dapat dihitung hanya berdasarkan pada hasil dari satu atau dua sektor industri.

Bahkan jika diambil perbandingan, perbandingan sejarah antara Jepang dan China masih diperkeruh oleh dimensi politik. Pada abad ke-19 dan ke-20, China yang tidak menang perang dan tidak pula berhasil membangun politik ekonomi.

Jepang dan China pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh punya takdir berbeda. Yang berbeda, bukanlah kehadiran kapitalisme di satu pihak dan ketidakhadiran kapitalisme di pihak lain. Namun, ada dua versi kapitalisme yang berbeda. Keduanya muncul secara serempak dengan terbukanya negara negara. Fakta ini punya pengaruh pada ekonomi dan politik global. Dua versi kapitalisme menguat dan mengambil tempat di dalam kapitalisme global pada akhir abad kedua puluh. (Hamilton, 2006).

Kapitalisme Jepang merupakan transformasi negara. Kapitalisme ini adalah produk ekonomi politik. Sebagai contoh, selama era Meiji (1868-1912), elit politik Jepang merumuskan rencana pembangunan komprehensif, dalam tiga puluh jilid buku. Buku rancangan ini mencakup setiap aspek ekonomi Jepang. Dipublikasikan pada 1884, rencana tersebut didasarkan pada investigasi yang cermat atas ekonomi dan lembaga korporasi Eropa oleh elit Jepang yang pergi ke Eropa. Mereka menetap untuk sementara, mengadakan pengamatan, mengajukan pertanyaan, dan kembali ke Jepang untuk membangun rencana ekonomi untuk menyusul Barat. Kemudian dengan sangat mengagumkan, mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan. Bahwa rancangan-rancangan dan sasaran itu "diselesaikan secara nyata" selama sepuluh tahun (Tu et al. 1991: 79).

Eleanor Westney dalam bukunya Imitation and Innovation, The Transfer of Western Organizational Patterns to Meiji Japan (1987) menunjukkan contoh luar biasa perubahan di era Meiji. Weastney menunjukkan bahwa, pada lima belas tahun pertama dari masa Meiji (kasarnya dari 1868 hingga 1883), elit ekonomi dan politik Jepang mengubah tata lembaga masyarakat dan sistem negara. Mereka menciptakan angkatan darat dan laut model Barat, sistem pos dan telegraf, sistem pendidikan berjenjang dari sekolah dasar hingga universitas, sistem perbankan terpadu, dan angkatan kepolisian nasional yang dibentuk secara birokratis. Di dalam tiap-tiap inovasi organisasi itu, pejabat pemerintah dan elit swasta Jepang meniru praktek-praktek Barat, meminjam secara bebas,terkadang secara tepat, terkadang secara

longgar. Westney (1987:6) menunjukkan secara mendalam, "perbedaan antara melakukan (peniruan) copy dan (menciptakan) invensi, di antara imitasi dan inovasi, adalah dikotomi yang salah. Karena, keberhasilan melakukan imitasi dari pola organisasi asing memerlukan inovasi". Pada akhir masa Meiji, Jepang berhasil menjadi negara industri.

Penting untuk melihat bahwa industrialisasi Jepang merupakan bagian dari kebijakan politik namun selalu terkoordinasi. bagian dari kebijakan ini adalah terciptanya struktur industri yang tersusun dari kelompok perusahaan yang saling bersaing. Masing-masing terdiri dari perusahaan besar dan setengah independen yang terorganisir secara kolektif. Mereka dikenal sebagai zaibatsu. Di antaranya Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo. Mereka mengembangkan diversifikasi saham, hubungan sistematis di antara perusahaan-perusahaan, dan teknik manajemen administratif sebelum akhir abad kesembilan belas (Hamilton, 2006).

Dalam setiap arena politik, bisnis, pendidikan, elit Jepang memiliki otoritas di dalam masyarakat untuk menerapkan kebijakan. Kemampuan ini bersandar pada sistem kontrol internal dalam tatanan sosial. Sistem kontrol sosial ini bersandar pada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan menciptakan tugas dan kewajiban yang tertanam struktural, bahkan bersifat opresif, namun tidak otoriter. Sistem kontrol ini memberikan elit Jepang kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi sumber-sumber daya material dan manusia. Pada tahun-tahun awal perubahan global, kemampuan untuk menggerakkan ini memberikan Jepang pembukaan dan keberlanjutan kolektif masuk ke dalam kancah ekonomi dan politik global.

Profesor Hamashita (2003), dikutip dalam Hamilton (2006) dari Universitas Tokyo memberikan tesis yang menyakinkan bahwa pejabat-pejabat Jepang memilih kebijakan ini karena mereka sadar akan keterbatasan Jepang menghadapi Bangsa China. Pada pertengahan abad kesembilan belas, dengan masih kokohnya Dinasti Qing, penguasa-penguasa Jepang merasakan bahwa ekspansi perdagangan di Asia bukanlah strategi yang baik (Hamilton, 2006). Karena sebagian besar kewajiban dalam sistem mengirimkan upeti kepada China masih ada di seluruh Asia hingga pertengahan abad kesembilan belas. Lagi, pedagang-pedagang China menguasai perniagaan di semua pelabuhan Asia, termasuk pelabuhan Jepang. Orang-orang Jepang sadar bahwa mereka tidak dapat memukul orang-

orang China. Karena, para pedagang China adalah pedagang utama di Asia. Maka, orang-orang Jepang sebaliknya, mulai membangun secara internal, menggunakan sumber daya manusia dan kemampuan organisasinya untuk menanamkan bentuk kapitalisme Barat di Asia.

Di Jepang, selama abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, alat utama perkembangan kapitalisme adalah koalisi elit politik dan elit ekonomi. Kapitalisme Jepang bukanlah ciptaan (*creation*) dari kelas pedagang. Meskipun. beberapa pedagang berperan dalam koalisi elit tersebut. Kapitalisme Jepang bukan pula ciptaan para petani meskipun para petani benar-benar mengubah hasil produksi dan daya kerja secara drastis. (Hamiton 2006) Dibandingkan dengan kasus China, kapitalisme Jepang merupakan kreasi ekonomi politik, dari sistem yang saling memperkuat satu sama lain dalam kuasa-kuasa pemerintahan dan hak-hak istimewa elit ekonomi. Dalam masa yang sangat singkat, orang-orang Jepang mampu mengubah produk kerajinan dengan skala kecil menjadi produk industri dengan skala besar, dari pabrik-pabrik kecil menjadi hirarki korporasi birokratis yang membentuk jaringan-jaringan konglomerasi.

Pembentukan lembaga kapitalisme China abad kesembilan belas secara politik, ekonomi, dan sosial—tidak seperti di Jepang. Pada periode antara 1850 hingga 1890, adalah mustahil untuk membayangkan istana Qing mengirimkan sarjana ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari adat-istiadat Barat. Upaya kecil yang dibuat sebagian besar gagal (Kuo and Liu 1978: 537-42). Mustahil untuk membayangkan istana Qing menciptakan dan menanamkan rencana-rencana detil tentang pembangunan ekonomi. Bahkan banyak lompatan "gerakan memperkuat diri (self-strengtening movement)" pada 1860-an dan 1870-an sebagian besar terbatas pada reformasi militer. Dan, itu pun hancur dalam kekalahan militer dalam perang melawan Prancis dan Jepang. Bahkan lebih sulit untuk membayangkan istana Qing berhasil menjalankan kebijakan meminjam pola organisasi dari Barat dan menanamkannya di masyarakat.

Hamilton menegaskan bahwa Penguasa Qing di China tidak dapat membentuk ekonomi politik kapitalis nasional seperti yang berhasil dilakukan oleh pembaharu/reformer Meiji di Jepang (Hamilton, 2006). Meskipun Dinasti Manchu menguasai wilayah kekaisaran yang luas, dominasi mereka tidak sampai merasuk ke dalam masyarakat lokal. Di bawah

lapisan birokrasi dalam rezim kekaisaran adalah desa-desa yang mandiri secara politik dan sukar dikuasai. Pasar di kota-kota tersusun melalui ikatan dan status keluarga. Karena itu elit politik tidak dapat menggerakkan sumber daya manusia dan material di China. orang-orang China di desa-desa dan kota-kota punya peribahasa sindiran pada birokrasi , "Surga begitu tinggi menjulang dan kaisar begitu jauh."

Hamilton menegaskan bahwa meskipun China tidak dapat mengembangkan kapitalisme negara (*a state-based capitalism*) pada abad kesembilan belas, tidak berarti tidak ada transformasi kapitalisme di China (Hamilton, 2006). Alat kapitalisme China bukanlah elit politik, namun kepala rumah tangga yang berhasil mengumpulkan kekayaan dan kemasyhuran (Hamilton, 2006). Kepala-kepala rumah tangga itu adalah petani, pedagang, pengrajin, dan terkadang cendekiawan. Mereka tidak tersusun sebagai kelas yang berbeda dari masyarakat. Namun mereka adalah kepala keluarga yang sering bergerak keluar-masuk dalam peran ekonomi dan sosial yang definisinya bersifat ambigu. Media organisasi untuk ekonomi orang-orang China sebagian besar bersandar pada jiwa wirausaha individu dan perusahaan keluarga. Media ini melekat dalam jaringan niaga dengan wilayah yang luas yaitu jaringan sesama daerah asal. Sejak masa Dinasti Ming (1368-1644), ekonomi China selalu berjaya di kalangan masyarakat lokal, bukan di lingkup negara.

Keluarga, pertalian keluarga, dan institusi berdasarkan wilayah membentuk aktifitas ekonomi dan memelihara bentuk-bentuk khas dari struktur wirausaha. Rumah tangga merupakan unit yang pokok dalam komunitas maupun pertalian keluarga. Karena itu, orang-orang China tidak membuat batas kaku antara rumah tangga dan perusahaan. Maka, perusahaan adalah seperti rumah tangga, dan seperti rumah tangga, perusahaan China biasanya berukuran kecil. Namun jika bisnis keluarga sungguh-sungguh berhasil, perusahaan sebagaimana rumah tangga sarjana terkemuka, tumbuh lebih besar karena lebih banyak keluarga dan teman yang dilibatkan dalam lingkaran anggota keluarga yang sedang berkembang. Namun, bisnis besar sangatlah jarang karena kebanyakan pengusaha kaya tidak berusaha menciptakan perusahaan yang makin besar secara horizontal atau terintegrasi secara vertikal, seperti yang berlaku di Jepang atau Amerika Serikat. Jika mereka tetap aktif secara ekonomi secara keseluruhan dan tidak beristirahat di daerah pedalaman, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pengusaha kaya, mereka menanamkan investasi pada

jaringan luas anggota keluarga dan teman yang menjalankan perusahaan kecil dan berskala menengah, sering kali mencakup beberapa bidang bisnis dan di berbagai macam lokasi.

Ada beberapa alasan dalam strategi ini. Alasan pertama adalah pengaruh harta warisan atas praktek bisnis (Wong 1985). Praktek pewarisan Jepang bersandar pada sentralitas dari keluarga inti (*stem family*) dan pada praktek hak anak sulung (*primogeniture*). perusahaan besar diserahkan secara utuh kepada satu anak laki-laki tertua. Sebaliknya, praktek pewarisan China bersandar pada pentingya menjaga garis silsilah keluarga dan karena itu bersandar pada pewarisan yang merata (*partible*), tiap anak laki-laki menerima bagian yang sama dari tanah (*estate*) ayahnya agar tiap anak laki-laki dapat membangun rumah tangga yang mandiri. Jika ayah telah bekerja menciptakan bisnis besar yang tunggal, bisnis tersebut hampir dipastikan akan pecah dan aset-aset dibagikan (*fenjia*) setelah kematiannya. strategi yang lebih masuk akal akan dilakukan dengan memulai banyak jenis usaha kecil yang dapat diserahkan secara utuh kepada anak-anak laki-laki setelah kematian sang ayah. Pola pewarisan ini diperkuat kembali oleh sistem yang terlembagakan yang menciptakan bidang (*scope*) dan skala ekonomi, bukan dari perusahaan-perusahaan individu, namun kiranya yang berasal dari jaringan-jaringan perusahaan yang telah memiliki koneksi. Masyarakat bisnis menggunakan jaringan-jaringan itu berdasarkan pada hubungan timbal balik (*guanxi network*), untuk meningkatkan modal investasi, menjamin kebutuhan tenaga kerja, membuat produk, dan mendistribusikan komoditi. Dengan membangun dan membangun kembali jaringan-jaringan tersebut maka menciptakan ekonomi berdasarkan pada kemandirian pengusaha (*deal-making entrepreneurship*)(Hamiton, 2006).

Bentuk ekonomi pengusaha ini, sebagian besar terdiri dari perusahaan keluarga berskala kecil dan menengah yang saling terkoneksi melalui berbagai macam hubungan sosial yang saling bersaing dan bekerja sama, tidak kondusif dalam mengembangkan industri-industri berat, dan jelas tidak (berkembang) pada abad kesembilan belas. Sebaliknya, ekonomi berbasis rumah tangga ini menghasilan bentuk kapitalisme perdagangan kecil.

Bagaimanakah praktek perdagangan kecil orang-orang China pada abad kesembilan belas. Tidak ada kapitalisme yang esensial secara istilah dalam pengertian Barat, tentang praktek-praktek tersebut secara keseluruhan, kecuali dalam fakta bahwa orang-orang China menggunakan praktek-praktek itu secara berhasil guna membuat banyak uang. Dalam

kenyataannya, kebanyakan dari praktek-praktek perdagangan tersebut dapat ditelusuri kembali pada ekspansi ekonomi yang berlangsung selama masa Dinasti Ming. Namun fakta bahwa praktek-praktek ekonomi tersebut sangat fleksibel, tidak bergantung pada patronase negara, mengembangkan komunitas dalam kepercayaan di antara teman-teman dekat, mudah disesuaikan dalam mencari kesempatan ekonomi. Dibangun secara tepat dalam institusi-institusi keluarga dan lokal, praktek-praktek ekonomi yang fleksibel tersebut menawarkan kepada orang-orang China keterbukaan mereka, arah terusan mereka masuk ke dalam ekonomi dunia yang baru saja berlalu dalam proses menuju terintegrasi secara global.

Kurang dari sepuluh tahun setelah pembukaan China dan pendirian Hongkong, petani, pedagang, pengrajin yang cakap China mulai berimigrasi ke seluruh dunia mencari kekayaan. Ini barangkali merupakan migrasi bebas terbesar di dunia selama abad kesembilan belas. Migrasi ini beredar luas ke seluruh dunia, meskipun mayoritas imigran pergi ke Asia Tenggara. Dari perspektif perbandingan, migrasi tersebut adalah migrasi yang sangat luar biasa. Migrasi tersebut merupakan migrasi sementara dan sebagaimana aktifitas ekonomi itu sendiri, tersusun secara baik melalui hubungan sesama daerah. Mayoritas imigran berencana untuk dan pada akhirnya kembali ke kampung halaman mereka. (Hamilton, 2006)

Sebaliknya, dalam periode yang sama, orang-orang Jepang hampir tidak melakukan imigrasi secara. Satu-satunya negara Asia selain China yang menghasilkan banyak imigran pada tahun-tahun itu adalah jajahan Inggris, India. Orang India berimigrasi daerah jajahan Inggris. Namun, orang-orang China berimigrasi ke seluruh dunia di tempat mana pun di mana uang bisa dibuat.

Orang-orang China mencari emas di California dan Australia pada 1850-an dan 1860-an. Mereka sangat sukses. Namun ketika bahan tambang itu mengering, mereka beralih mengejar hal lainnya seperti menggali kanal dan membangun jalur kereta api. Mereka juga membangun dan menjalankan usaha-usaha kecil (Judy Yung (ed.) 2006). Selain itu mereka berimigrasi ke Asia Tenggara. Sebagian orang China menetap di Thailand , Jawa, dan Phillipina dalam jangka waktu lama, melayani para penguasa di negara-negara itu sebagai pedagang dengan hak-hak istimewa dan pemungut pajak petani (Sterling Seagrave, 2005). Pada pertengahan akhir abad kesembilan belas, orang-orang China itu kini bergabung dengan ratusan ribu imigran baru China, yang bercampur baur di setiap sudut Asia Tenggara.

Kebanyakan dari mereka adalah buruh upahan, namun minoritas sangat sukses menjadi pengusaha. Pengusaha-pengusaha China menyusun jaringan-jaringan dari perusahaan-perusahaan kecil yang saling terkoneksi dalam mengumpulkan dan memproses produk-produk penting seperti kayu dan beras dan mendistribusikan barang-barang serba-serbi ke seluruh penjuru negara-negara tersebut. Menjelang dekade kedua abad kedua puluh, orang-orang China mendominasi sektor jasa dan manufaktur dalam ekonomi di seluruh wilayah tersebut dan menjadi figur utama dalam perdagangan di negara-negara Asia dan Barat (Sterling Seagrave, 2005).

Awal abad kedua puluh, pedagang dan pabrik kecil lokal mendominasi bidang-bidang paling modern dalam ekonomi China (MacPherson and Yearly 1987). Di setiap sektor, kecuali dalam industri berat, orang-orang China lokal mampu mengungguli orang-orang Barat dalam memproduksi dan menjual barang-barang konsumsi bagi orang-orang China. Orang-orang China sangat sedikit membeli mobil, traktor, atau kereta api, namun mereka membeli banyak tekstil, rokok, korek api, dan perlatan rumah tangga. Selain itu, orang-orang China menguasai perbankan, retail, dan grosir, dan pada 1920-an, ketika pasar swalayan menjadi penting, orang-orang China juga menguasai pasar swalayan (Chan 1982).

Hongkong merupakan pusat dari ekspansi kapitalis ini. Remer (1993) dalam Hicks (1993: xxxiii) mengatakan bahwa Hong Kong pada tahun 1930-an, sebelum Perang Dunia Kedua, merupakan modal ekonomi Perantauan China. Struktur bisnis Hongkong pada periode sebelum dan selama Perang Dunia Kedua terdiri atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari atau tinggal di distrik-distrik di delta Kanton, seperti Taishan, Nanhai, Zhongshan, dan Xinhui (Chung, 2004). Orang-orang itu secara bersama-sama mengembangkan usaha niaga meliputi hotel, restoran, ansuransi, perusahaan ekspor/impor, bank, dan perusahaan investasi & peminjaman uang. Semuanya didesain guna membantu aliran sumber daya material dan manusia dari Guangdong, melalui Hongkong, menuju belahan dunia dan lalu kembali lagi.

Pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua, Hongkong bertindak sebagai cerobong kapitalis China. Ratusan ribu imigran China dari pedalaman Guandong dan Fukien keluar dan kembali ke Hongkong setiap tahun (Hicks 1993: 18-20). Jutaan uang China terbang melalui bank-bank dan pusat-pusat pengiriman uang di Hongkong. Beberapa uang keluar

dari China untuk investasi di tempat yang jauh, namun porsi terbesar mengalir masuk ke China dalam bentuk pengiriman uang (remittansi)—gaji/upah dan keuntungan (profit) dari tempat kerja manapun. Uang mengalir masuk ke China memenuhi komersialisasi (perdagangan) di China Selatan pada periode sebelum Perang Dunia Kedua.

Hamilton (2006) menegaskan adalah fakta bahwa Hongkong memainkan peran penting dalam ekonomi China sebagaimana peran Hongkong dalam ekonomi Asia Tenggara. Pada awal abad kedua puluh, pengorganisasian aktifitas komersial pedagang China sebagian besar melalui Hongkong, orang-orang Kanton merupakan kelompok bisnis terbesar di Shanghai dan mereka menguasai sebagian besar distribusi berbagai macam barang impor di seluruh China.

Sementara itu, ekonomi tertutup Jepang, bergerak mencipta perang di Asia. Sebaliknya, orang-orang China mendominasi, dan terbuka menuju perdagangan global. Kemajuan ekonomi kapitalis atau wira usaha China di China dan di Asia Tenggara tanpa dukungan dan koordinasi negara. Sebaliknya, Di Jepang, negara melegitimasi kapitalisme, mengatur kepentingan para elit, dan menyelesaikan konflik di antara para elit.Sedangkan di China, negara menuju kehancuran. Namun, hal itu tidak jadi masalah karena malah membebaskan pengusaha-pengusaha China untuk menciptakan jaringan-jaringan yang menjangkau batas-batas politik, dan terus bekerja meskipun tidak disebabkan oleh politik. Kelemahan dan kekalahan akhir negara China membuka perdagangan dan industri di pesisir-pesisir China dan menghubungkan orang-orang China dengan perkembangan-perkembangan kapitalis di mana pun tempatnya. Migrasi orang-orang China dihasilkan dari kondisi-kondisi tersebut. Selain itu, dengan mundurnya, runtuhnya, dan terjadinya disintegrasi tatanan politik China, kekuatan utama kapitalisme China, pengusaha rumah tangga, bergerak ke manapun uang dapat dibuat—seperti di pusat-pusat bisnis yang aman di pesisir-pesisir Shanghai, Kanton, dan pelabuhan-pelabuhan perjanjian (treaty port) lainnya, dan di luar negeri, di Asia Tenggara, Hawaii, dan Pantai Barat Amerika.

Kemudian, singkatnya, pada abad sebelum Perang Dunia tersebut, orang-orang China telah mengintegrasikan diri mereka sendiri masuk ke dalam ekonomi global yang sedang berkembang; mereka menunggang gelombang kapitalisme di seluruh dunia, seperti di Shanghai, California, dan Asia Tenggara. Dengan berbasis pada jaringan-jaringan mereka

yang fleksibel dan kerja keras, mereka memonopoli ceruk-ceruk ekonomi terpilih di banyak negara di seluruh dunia. Dalam terminologi kontemporer, kami dapat mengatakan bahwa mereka memonopoli segmen-segmen dalam sektor jasa di dunia ekonomi pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Mereka menjadi pedagang retail, pedagang grosir, dan pemilik modal; mereka menjadi kelompok pedagang kapitalis terkemuka di dunia. Meskipun terintegrasi dan tergantung pada ekonomi global, bentuk kapitalisme berbasis rumah tangga ini bebas dari tatanan politik mana pun.

Di satu sisi, setelah periode singkat menangkap segala se dari Barat, elit Jepang bertahan sukses menjadi mandiri dalam perdagangan internasional. Malahan, mereka menciptakan pasar internal milik mereka dan membangun dalam versi mereka ekonomi politik berorientasi korporasi yang kuat. Mereka memulai sebagaimana kaum industrialis, melakukan produksi untuk pasar lokal dan regional, dan dari sana melakukan ekspansi ke dalam sektor jasa dengan membentuk bank-bank dan perusahaan perdagangan milik mereka sendiri, dan hanya dengan itu mereka secara bertahap mulai mengintegrasikan diri mereka ke dalam ekonomi dunia. Respon orang-orang Jepang dan China adalah berbeda atas penyebaran imperialisme Barat. Keduanya sama-sama kapitalistik dan keduanya secara historis menuju lintasan-lintasan perkembangan ekonomi yang berbeda.

Hong Kong, Wirausaha China, dan Jepang Pasca Perang Dunia Kedua : Jalan Kapitalisme Yang Berbeda

Pertama, kapitalisme Jepang sebelum perang dengan cepat kuat kembali setelah perang. Jepang mampu memulihkan bentuk kapitalismenya karena Jepang mampu memulihkan ekonomi politiknya. Ekonomi Jepang dibangun kembali pada 1950-an. Perang Dingin telah memaksa Amerika Serikat melihat Jepang sebagai sekutu utama di Asia Timur dan menyokong rekonstruksi ekonomi Jepang. Segera sesudah pendudukan Amerika berakhir, pemerintahan baru Jepang, berpusat pada agen-agen pemerintah, mulai memperbaharui kembali kapitalisme gaya Jepang dengan membangun kembali sistem ekonomi politik yang senada dengan dunia yang kini ada dalam era pasca perang.

Birokrasi Jepang di bawah pengawasan Tentara Amerika Serikat menciptakan struktur industri baru. Tentara pendudukan Amerika mencabut perlindungan hukum dan

melarang kelompok perusahaan yang terpusat pada keluarga, *zaibatsu* dari masa sebelum perang, dengan membuat tiap-tiap perusahaan dalam kelompok tersebut, kepemilikan yang bebas dan menghapus saham-saham perusahaan milik keluarga yang berpusat di tiap-tiap kelompok tersebut. Namun segera setelah pendudukan berakhir, berkat birokrasi Jepang, perusahaan-perusahaan bekas zaibatsu tersebut memperbaharui aliansi ekonomi mereka dan menciptakan sistem baru dalam kelompok bisnis tanpa kepemilikan keluarga. Meraih kesempatan besar yang dipersembahkan oleh Perang Korea dan Perang Dingin, kelompok perusahaan tersebut, sering kali direferensikan sebagai *keiretsu*, bekerja berdampingan dengan pemerintah dan dengan cepat melanjutkan kembali dominasi atas ekonomi domestik. Jaringan produksi yang besar yang dihasilkan dari aliansi tersebut menghasilkan produk-produk yang dijual baik secara domestik maupun internasional. Pertengahan 1980-an, penjualan hanya dari perusahaan terbesar dalam kelompok perusahaan tersebut dan merepresentasikan 81 persen *Gross Domestic Product* Jepang (Hamilton, Zeile, and Kim 1990). Pada 1980-an, berlindung pada payung yang disediakan oleh negara, perusahaan *keiretsu* membawa bentuk-bentuk kapitalisme Jepang menjadi bentuk kapitalisme terkemuka di dunia yang tidak pernah dinikmati sebelum perang.

kedua, Jepang membangun dengan mudah kapitalisme korporasi Jepang. Namun, Basis wirausaha kapitalisme China sangat sulit untuk pulih. Periode pertama tiga puluh tahun, dari 1945 hingga 1980 adalah periode perubahan politik yang mendalam di Asia. Dengan perkecualian Hongkong, Thailand, dan beberapa kerajaan Himalaya, setiap tempat di Asia dalam dekade-dekade sesudah Perang Dunia Kedua tidak hanya memiliki pemerintahan baru namun juga bentuk-bentuk baru dalam pemerintahan terutama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, penjajahanpun berakhir dan muncul negaramerdeka. Memang China membentuk pemerintahannya yang baru melalui revolusi sedangkan Jepang melalui kekalahan dan pendudukan. Namun, apapun bentuknya pemerintahan yang baru berjalan dan pahit. Perang Sipil terjadi di Korea dan Vietnam sedangkan pemberontakan, kudeta, penindasan, dan kekacauan biasa terjadi di Asia Tenggara.

Kekacauan politik tersebut menyebabkan dua perubahan besar dalam cara bagaimana pengusaha-pengusaha China mampu melakukan bisnis. Pertama, perubahan paling besar segera setelah periode pasca perang berlangsung sebagai konsekuensi (akibat) adalah

Revolusi China. Dalam masa sebelum perang, daratan China, telah menjadi inti dari integrasi Asia dalam ekonomi global. Hongkong dan Shanghai adalah pusat dari inti tersebut. Tiba-tiba, Revolusi Komunis memutus Daratan China, secara politik dan ekonomi, dari belahan lain di dunia.

Perubahan kedua dan sama penting terjadi secara bersamaan dengan adanya pembongkaran pemerintahan kolonial di Asia Timur dan Tenggara. Sepanjang masa sebelum perang, hubungan-hubungan kolonial menggerakkan banyak garis perdagangan dan manufaktur dimana orang-orang China terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Perang telah menghancurkan pola-pola perdagangan tersebut. Para pemimpin bangsa-bangsa baru menginginkan ekonomi-ekonomi baru yang terpisah dari ketergantungan kolonial. Mengikuti pemikiran ekonomi pada masa itu yang merekomendasikan substitusi impor, banyak dari pemimpin-pemimpin baru tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi domestik yang sangat bebas milik mereka sendiri. Mereka menasionalisasi banyak industri dan memulai banyak badan usaha negara dan perusahaan negara. Mereka juga mencoba untuk menciptakan kelas industrialis domestik (dalam negeri). Mereka mencoba mengatur dan menggerakkan arus aktivitas ekonomi dalam batas-batas yang dimilikinya. Oleh karena itu, menjelang akhir 1950-an, jaringan-jaringan komersial sebelum perang sebagian besar terputus sedangkan jaringan-jaringan baru belum terbentuk. (Hamilton, 2006)

Perang Jepang, dekolonisasi di Asia Tenggara, dan Revolusi Komunis di Daratan China pada pokoknya menghancurkan kapitalisme komersial (perdagangan) periode sebelum perang. Karena itu, hanya dengan satu perkecualian, orang-orang China yang tinggal di luar Republik Rakyat China di Asia antara 1945 hingga awal 1960-an berada di bawah tekanan kuat untuk menasionalisasi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Pemerintah di seluruh wilayah tersebut mengawasi aktivitas-aktivitas dan mempertanyakan kesetiaan dari generasi pertama, kedua, dan terkadang ketiga dan keempat dari pengusaha China. Dalam tiga puluh tahun pertama sesudah perang, di hampir seluruh wilayah tersebut, wirausaha orang-orang China mendapat tantangan dan tersalur secara langsung oleh kesempatan dan peluang bisnis akibat politik yang sedang berubah dalam periode sesudah perang.

Ketiga adalah bahwa Hongkong adalah satu-satunya perkecualian pada kejadian ini segera selama periode pasca perang dan di Hongkong inilah wirausaha orang-orang China bangkit kembali sebagai kekuatan mandiri dalam kapitalisme dunia. Penjelasan normal atas industrialisasi Hongkong sesudah perang adalah ruang lingkupnya dalam masa pasca-perang yang sangat luar biasa. Segera sesudah perang, pemerintah kolonial Inggris mencoba untuk melanjutkan kembali usaha-usaha bisnis seperti biasa dalam satu masa yang luar biasa. Menjelang 1950, sebenarnya semua perdagangan ekonomi dengan Daratan China telah berakhir dan Hongkong berhenti menjadi sebuah pelabuhan. Namun, seolah-olah ini merupakan kompensasi akhir bagi Hongkong yang posisinya terapung-apung di atas uang, buruh, dan pengusaha. Pada 1950-an, investasi uang, beberapa terbang dari China sebelum revolusi dan beberapa dalam bentuk pengiriman uang (remittances) dari Asia Tenggara yang tidak bisa masuk ke China, tiba dan tinggal di Hongkong. Para pengungsi berlindung dari kekuasaan komunis telah membangun perkampungan liar di seluruh koloni tersebut sehingga menyediakan tenaga kerja dengan upah murah. Selain itu, beberapa pengusaha terkemuka dari Shanghai memindahkan pabrik-pabrik mereka di sana. Banyak orang berpendapat bahwa kombinasi ini merupakan faktor-faktor yang mengizinkan Hongkong dengan cepat mengalihkan ekonominya dari pelabuhan perdagangan menjadi kantong-kantong industri.

Meskipun sumber-sumber daya tersebut memberikan kontribusi pada pertumbuhan yang cepat, namun ada alasan pokok atas industrialisasi Hongkong yakni semangat usaha niaga orang-orang China. Pengusaha-pengusaha China di Hongkong menemukan pasar. Tidak seperti Jepang, Hongkong, mengalami pertumbuhan paling awal pasca perang, namun tidak memiliki pasar lokal yang cukup untuk mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan pabrik-pabriknya. Seperti yang Wong Siu-lun (1988b:74) catat dalam studi seminalnya tentang kaum industrialis Shanghai di Hongkong, pemasaran selalu menjadi masalah paling besar yang dihadapi oleh pabrik-pabrik tekstil, maka (adalah) fakta penting bahwa pemilik pabrik itu sendiri yang mengurus pemasaran. Mereka biasanya merupakan musafir-musafir yang mencari pasar-pasar potensial dan berhadapan langsung dengan para klien.

Pasar-pasar yang ditemukan oleh pengusaha-pengusaha Hongkong merupakan bagian dan terintegrasi pada ekonomi global yang sedang berkembang secara cepat.

Dipenuhi oleh konsumerisme pasca perang di Amerika Serikat dan Eropa, pasar swalayan dan "dime stores" (toko murah yang menjual barang dengan harga beberapa sen) tumbuh di seluruh Amerika Serikat dan Eropa Barat itu dan menawarkan pakaian jadi, mainan anak, alat-alat listrik yang sederhana, dan peralatan rumah tangga lain yang sangat murah. Dengan menggunakan pengetahuan komersial dan kerja keras yang luar biasa, pengusaha Hongkong mulai menghubungkan diri dengan apa yang Gary Gereffi (1994b) sebut (sebagai) "pembeli-pembeli besar" (*big buyers*), agen-agen pembeli yang mewakili perusahaan grosir dan retail besar di Barat, seperti Sears, Montgomery, Ward, J.C. Penney, Marks and Spencer, dan Bon Marché.

Pola bisnis ini dimulai dengan mebel rotan, bunga plastik, dan tekstil, namun segera diikuti dengan sejumlah besar barang konsumsi seperti garmen, jam, mainan anak, radio transistor.. Perusahaan-perusahaan yang membuat barang-barang tersebut tidak diorganisir dalam bentuk industri besar. Agaknya, seringkali berkumpul dalam kelompol kecil jaringan sub-kontrak yang terorganisir secara longgar yang mengingatkan kembali kepada jaringan komersial sebelum perang, perusahaan-perusahaan Hongkong merupakan jaringan manufaktur yang terhubung dalam rantai panjang komoditi yang dimulai di Barat dengan desain, pesanan, dan spesifikasi dan berakhir kembali di Barat dengan pemasaran (marketing), retail, dan konsumsi. (Hamilton, 2006)

Rantai gerak komoditi para pembeli tersebut berasal dari Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman. Statistik perdagangan menunjukkan pola ini secara sangat jelas. Sepanjang 1950-an, perdagangan ekspor dengan Amerika Serikat dan Eropa berada dalam tingkat yang sangat rendah, tetap, atau agak menurun. Naiknya lintasan perdagangan ekspor dimulai pada 1961 dan tumbuh cepat sejak saat itu. Namun hingga awal 1980-an perdagangan ekspor Hongkong secara keseluruhan tercatat hanya dengan tiga negara: Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman. Pada 1975, misalnya, tiga negara itu sendiri mencatat hampir 60 persen dari total ekspor Hongkong. Pada tahun yang sama, ekspor Hongkong ke Jepang mencatat hanya 4.2 persen, Singapura 2.7 persen, dan Taiwan kurang dari 1 persen (Cheng 1985).Pola-pola perdagangan lama di Asia Tenggara telah lenyap dan pola perdagangan baru nampak. Namun meskipun ada perubahan-perubahan tersebut, kontinuitas dalam organisasi dan penguasaan (*control*) masih ada. Pengusaha-pengusaha Hongkong membiarkan pasar

menarik produk. Jaringan-jaringan dari perusahaan kecil berburu dan kemudian merespon permintaan-permintaan pasar tersebut (Turner 1996). sistem kapitalisme komersial semacam itu adalah sangat berbeda dengan bentuk kapitalisme Jepang dimana perusahaan-perusahaan besar menciptakan produk dan menekan produk tersebut masuk ke dalam pasar. Sistem Jepang tersebut adalah menciptakan permintaan (*demand-creating*) sedangkan sistem China adalah merespon permintaan (*demand-responsive*).

Pengamatan keempat, adalah bahwa, sementara para pengusaha China di Hongkong mulai terhubung kembali dengan ekonomi global, para pengusaha China di Singapura, Taiwan masih terbelenggu (*embedded*) dengan rezim-rezim nasionalis. Dengan kata lain, Hongkong adalah perkecualian, namun Singapura dan Taiwan tidak, setidaknya hingga satu dekade kemudian. Hingga Singapura mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1965 maka tidak ada jaminan dalam jangka waktu lama atas kepentingan ekonomi orang-orang China di Asia Tenggara. Perlu diingat kembali bahwa antara 1959 hingga 1968, kebijakan anti China berlangsung di Indonesia dan pada 1969 kerusuhan ras terjadi di Malaysia. Orang-orang China di Asia Tenggara hidup di bawah bayang-bayang politik nasionalis paling tidak hingga 1970-an dan hingga hari ini.

Barangkali karena alasan ini, ketika penguasa politik di Singapura membentuk dasar kebijakan industri memilih tidak menyokong para pengusaha China di Singapura. Malahan, mereka memutuskan untuk membangun banyak perusahaan milik negara dan mendorong dalam jumlah besar perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang untuk membangun manufaktur dan layanan jasa di Singapura.

Di Taiwan, mayoritas besar orang China, berada di bawah tekanan menasionalisasi kepentingan mereka, namun sejak Taiwan dikuasai orang-orang China, dinamika etnis di Taiwan menjadi lebih China. Namun, pada 1950-an kebijakan substitusi impor memblokade usaha kuat (yang dilakukan) oleh masyarakat, bisnis lokal untuk melakukan perdagangan di luar batas-batas negara. Tidak sampai awal 1960-an maka pola ini mulai berubah, dan ketika ini terjadi, jaringan awal wirausahaadalah dengan kelompok perdagangan Jepang dan pabrik-pabrik Jepang. Pada saat itu, perusahaan-perusahaan manufaktur Taiwan bertindak sebagai bagian akhir (tujuan akhir) sub kontrak dari kelompok bisnis Jepang, yang posisinya

sangat berbeda dalam ekonomi global dibandingkan dengan posisi yang diemban oleh perusahaan-perusahaan Hongkong.

Pengamatan kelima, adalah bahwa tidak sampai awal pertengahan 1980-an maka fondasi wirausaha kapitalisme China terbangun kembali di luar Republik Rakyat China. Pada akhir 1970-an stabilitas politik berlaku di Asia Tenggara—Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Semua negara itu mulai mengendurkan nasionalisme ekonominya. Pada saat yang sama, Daratan China memulai reformasi ekonomi dan membuka ekonominya bagi orang-orang luar. Segera sesudah itu, China dan Asia Tenggara mulai menarik dalam jumlah yang sangat besar investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Kebanyakan investasi asing tersebut datang dari perusahaan-perusahaan Jepang, Taiwan, dan Hongkong dan semuanya mencari sumber daya manusia yang lebih murah dan keuntungan-keuntungan ekonomi lain.

Investasi saling-silang tersebut diisi dengan revolusi retail baru yang terjadi di seluruh dunia, diisi mengikuti perkembangan *shopping mall, super discount stores*, dan barang-barang ber-merk terkenal seperti *The Gap, The Limited, Nike, Reebok, Dell Computers*, dan *Mattel Toys*, semua manufaktur tersebut tidak memiliki pabrik. Sistem inventaris yang ter-komputerisasi, transportasi laut dan udara yang cepat, dan periklanan yang sangat maksimal menyertai trend penjualan massal tersebut.

Para pengusaha China dengan cepat mengambil keuntungan-keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru tersebut. Mereka menciptakan produk-produk terbaru, membeli real estate terpilih, dan membuat transaksi terbaik dalam melakukan bisnis apapun di Asia. Para pengusaha China baru dari Hongkong, Taiwan, dan Asia Tenggara tidak lagi merupakan kapitalis kecil dan tidak lagi terikat dengan pertimbangan-pertimbangan wilayah dan garis keturunan.

Keberhasilan mereka di Hongkong, Taiwan, dan Asia Tenggara berlangsung cepat, karena mereka secara ekonomi adalah segmen penduduk yang paling gesit dan paling mudah bergerak. Karena kebanyakan berpendidikan Barat, maka mereka menyadari kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan politik dan ekonomi yang berubah. Keberhasilan mereka menjadikan mereka menjadi kekuatan ekonomi besar di kampung halaman ekonomi. Di Hongkong, kemandirian dan kekuatan para pengusaha China mengusir perusahaan-perusaan Inggris. Di Taiwan, perusahaan-perusahaan swasta yang

dimiliki oleh etnis Taiwan memudarkan perusahaan-perusahaan milik negara dan partai. Di seluruh Asia Tenggara, etnis China meraih kekuasaan atas sektor dinamis dalam ekonomi. Para pengusaha China menjadi super kapitalis Asia.

Hongkong menjadi pusat perkembangan kapitalisme. Basis manufaktur Hongkong adalah di Guangdong, dan Hongkong sekali lagi menjadi cerobong kapitalis di mana sumber daya manusia dan material bergerak masuk dan keluar dari China. Investor terbesar di China berasal dari orang-orang China yang mendominasi ekonomi di luar China: Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Hingga terjadinya krisis bisnis (ekonomi) Asia, perusahaan multinasional terbesar di Thailand, Charoen Pokphand Group, kelompok usaha yang dimiliki dan dikuasai oleh etnis China, adalah juga investor tunggal terbesar di China.

Penutup

Negara China bangkit kembali. Rezim Komunis, dalam semua retorika, melonggarkan pengawasan atas aktifitas ekonomi komunitas bisnis. Namun kontradiksi, tetap eksis di antara rezim di pusat dan otoritas-otoritas mandiri di institusi-institusi lokal (Wank, 1991, 1999). Jika membaca laporan-laporan pembangunan China, maka terlihat bahwa negara masih berhati-hati pada kelompok bisnis. Masyarakat lokal memberikan sumbangan sangat besar, pada budaya kapitalisme. Pada Masa Awal Reformasi Ekonomi China, 1980-an, komersialisasi dan industrialisasi di China dibantu oleh uang yang mengalir masuk dari komunitas bisnis perantauan China di Hongkong, Taiwan dan Asia tenggara. Dalam bentuknya, jika bukan dalam substansinya, lintasan kapitalis Asia telah kembali kepada bentuknya pada masa sebelum perang.

Pustaka

Blue, G. (1999). *China and Historical Capitalism: Genealogies of Sinological Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chan, W. K. K. (1982). "The Organizational Structure of the Traditional Chinese Firm and its Modern Reform", *Business History Review 56*,2 (Summer): 218–35

Chung, W. K. (2004). *The Emergence of Corporate Forms in China, 1872–1949: An Analysis on Institutional Transformation*. Unpublished dissertation. Seattle: University of WashingtonBrook, T. and

Cheng, T. Y. (1985) *The Economy of Hong Kong*. Hong Kong: Far East Publications

Garry G. Hamilton, (2006*). Commerce and Capitalism in Chinese Societies* . London : Routledge.

Garry G. Hamilton, (1996). *Menguak Jaringan Bisnis China Di Asia Timur Dan Tenggara*. diterjemahkan oleh Alexander Irwan. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.Judy Yung, Gordon H. Chang, H. Mark Lai, *Chinese American Voices: From the Gold Rush to the Present*, Berkeley, University of California

Kuo, T. Y. and Liu, K. C. (1978). "Self-strengthening: the Pursuit of Western Technology", in The *Cambridge History of China*, Late Ch'ing 1800–1911, Part 1, Volume 10, edited by John K. Fairbank. Cambridge: Cambridge University Press.

Lethbridge H. J., (1978). Hong Kong: Stability and Change, Hong Kong: Oxford University Press

Liu, K. C. (1962). *Anglo-American Steamship Rivalry in China, 1862–1874*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

MacPherson, K. L. and Yearley, C. K. (1987). "The 2½% Margin: Britain's Shanghai Traders and China's Resilience in the Face of Commercial Penetration", *Journal of Oriental Studies* 25, 2: 202–34.

Stiglitz, J. E. and Yusuf, S. (eds) (2001). *Rethinking the East Asian Miracle*. New York: Oxford University Press.

Sterling Seagrave, (2005). *Sepak Terjang Bisnis Para Taipan*, Penerjemah Yanto Musthofa dan Hamid Basyaib, Jakarta, Alvabet

Thomas S. Macintyre, (1985). Impact of the Sino-British Agreement on Hong Kong, Journal of Comparative Business and Capital Market Law 7 , 197-216 North Holland

Tsang, Steve (2005). *A Modern History of Hong Kong*, 1841–1997. London: I.B. Tauris & Co.

Tu, W. M., Hejtmanek, M., and Wachman, A. (eds) (1991) *The Confucian World Observed, A Contemporary Disucssion of Confucian Humanism in East Asia*. Hawaii: The East-West Center.

Wallerstein, Immanuel (1983). *Historical Capitalism*. Verso Books. p. 78. ISBN 0-86091-761-4.

World Bank (1993). *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. Washington, D.C

Wong, S. L. (1988). "Emigrant Entrepreneurs: Shanghai Industrialists in Hong Kong", Sociology 36. Hong Kong: Oxford University Press

Wong, S. L. (1985). "The Chinese Family Firm: A Model*", British Journal of Sociology* 36: 58–72.

Westney, D. E. (1987). *Imitation and Innovation: The Transfer of Western Organizational Patterns to Meiji Japan*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Wang, G. (1999). "Chineseness: The Dilemmas of Place and Practice", in G. G. Hamilton (ed.), *Cosmopolitan Capitalists: Hong Kong and the Chinese Diaspora at the End of the Twentieth Century*. Seattle: University of Washington Press.

Wang, G. (1991). *China and the Chinese Overseas*. Singapore: Times Academic Press.

Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

Army Wives Serve, Too
(A Novelistic Sense In Sociological Imagination)

Wida Ayu Puspitosari[1]

Under The Sabers: The Unwritten Code of Army Wives. Written By Tanya Biank. Fifth Avenue: New York State St. Martin Press, 2006. Pp. xi+261

Gentlemen:

"I reverently pledge you: The ladies who have shared our lives from the Equator to the Arctic; the ladies who have condoned our reverses, and inspired but to applaud our success. May we live to make them happy, or, and the great day comes, so die as to make them proud. The Army Women, God Bless Them".

General George Smith Patton, Jr.

April 5, 1924

(A toast to "the ladies" at a West Point dinner in Kansas City)

We frequently hear about the heroic soldiers struggle for their nation, but we seldomly hear about what their wives have made. Army wives are conjoined by unwritten codes. They

[1] Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya. Email: widapuspitosari@ub.ac.id

© Wida Ayu Puspitosari, 2019
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol 1, No 2, 2019. Hal.123-127

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung *American Sociological Association (ASA)*:
Puspitosari, Wida A. 2019." Army Wives Serve, Too (A Novelistic Sense In Sociological Imagination)," Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 123-127.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.001.2.09

are expected to endure hardships with kindness and tragedies with heads held high (Moelker, Andres, and Poot 2006). The media commonly focuses only on the families' tearful goodbyes and tearful reunions – or, in the case of spouse murders, their deaths. Yet the reality is far more complex and breath-taking.

In summer 2002, Tanya Biank, military reporter for the Fayetteville Observer in Fayetteville, North Carolina, the town outside Fort Bragg, was observing crisis in a military post. The post is home base to several Army's most elite soldiers, called paratrooper, Delta Force Commandos and Green Berets of the U.S. With a density of high-achieving people who prosper on adrenaline, Fort Bragg is the biggest military installation, a stimulating place to serve, a fact not missed by visiting VIPs, government officials and other dignitaries who often note the privilege place. Yet that summer, in over six weeks, four Fort Bragg soldiers killed their wives; then two of those committed suicide, and a third would hang himself in jail eight months later. In a fifth case on an officer's wife was accused with killing her husband (Biank, 2006).

It was gripping, headline-provoking material, and Biank reported on those stories as well as the bigger picture that united them. While she dug deeper and deeper, she realized that there was a broader truth to tell – a tale that was buried in the turmoil of one tragic summer in Fayetteville. Even without scandalous murder, the lives of Army wives themselves are the stuff of drama. These women play roles attached to convention in conditions that are sometimes precarious, solid, and too often distressing (Rosen, Carpenter, and Moghadam 2018). Yet what life is really like for Army wives has never been precisely examined. Here in Biank's non-fiction work, we will see how sociological imagination works in novelistic sense.

Under the Sabers (Biank, 2006) is a thought-provoking narrative describing the complex personal and political challenges Army wives face, portraying a provocative new look at Army life. Biank goes beyond the snippets and portrayal of military life and shows what it is really like to be an Army wife, such as: carrying furniture off the rental truck by yourself at a new duty station when your husband is in the field and comforting your son who wants his dad home from Afghanistan for his fifth birthday. She takes readers into the hearts and homes of today's military wives.

By that autumn, Biank, an Army brat herself, realized the untold story of Army wives lay in the ashes of that tragic and dramatic summer. She knew the truth, wives were the backbone of the Army. They were strong, not helpless and deserved more than sugar-coating stuff that often attached to their stories in the media. Under the Sabers tells the story of four different Army wives, who find themselves severely dependent on circumstances that eagerly force them to redefine who they are as women and Army wives. In this intriguing and ambitious researched account, Biank takes the reader to pass the Army's gates; where everyone has a role to play, rules are strictly followed, discipline is expected, perfection praised, and perception often prevails reality. Biank (2006) explores what happens when real life collides with Army convention. Clearly, she explains what it means to be a wife and mother in a subculture and in constant situation of readiness for war. In this heart-breaking and influential book, she takes a close outlook at the other woman and the Army convention impact on wives emotion, marriages, and home life. This story of strength and perseverance is an eye-opener for those who have never experienced military life and everyday conducts of the women who each day live the "unwritten code."

Basically, their personalities and backgrounds vary significantly, but those things must be fitted to gender expectations and restrictions of the military. It is a world where wives carry the billets of their husbands, where class disparities determine whom they associate with and where and how they live – sometimes it is a world where poverty is common among the lower billets, such as enlisted. For much of the time that Biank was following these women, Fort Bragg was on high alert, with soldiers awaiting deployment. Stress levels intensify marital problems, but for either a man or his wife to seek counselling is perceived as a sign of weakness and bad for a man’s track record.

Even though Biank’s non-fiction work is sometimes thickset and some of the history feels a bit out-dated, Biank's novelistic sense in constructing social life and friction vividly explains how the Army could bring couples closer together, or it could tear the relationships apart. Army wives themselves are used to cope with unpredictable deployments and struggle to raise children alone, often on small pay checks, in a community both interrelated and severely judgmental. It is very relevant to say that Army wives serve, too. She makes sympathetic both for their pride and their tragedies.

Moreover, Rosen and Moghadam (2015) could clearly provide supportive argument to what Biank has stated. They examine socio-environmental aspects that affect the development of peer support among wives of combat arms soldiers in the U.S Army. The study is based on data from the evaluation of deployment new system which aims to keep soldiers and their leaders together for long periods of time in order to promote the development of solid military units, and to improve supportive relationships among military wives. They found that in all Army Units, both traditional and non-traditional, commissioned officers' wives enjoy much higher levels of support than enlisted wives. In non-traditional Army units which promote cohesion and bonding, they found that junior enlisted wives have developed higher levels of support than wives of Non-commissioned officers (NCOs). In addition, in these units, while there are increased friendships between officers' wives and enlisted wives, there is no improvement in friendships between junior enlisted and NCO wives. The marginality of the NCO position is one of the reasons referred to their failure to develop supports and to bond with more junior wives.

Unfortunately, the book is a bit confusing as the author skipped between telling the stories of each wife separately, then starts adding in her own personal jokes, opinions, and then there are parts where she no longer separates the wives' stories by chapter. The timeline bounce around a little bit and could be confusing too. It felt like it wasn't edited very well and it took the reader out of the book. However, the stories themselves basically were very touching and arise multitude of emotion. This book is relevant to researcher on gender studies to explore how situated knowledge of gender and sexuality are contested as political and cultural domains of representation as well as expression, how they are still interweaved in structures and practices of territoriality or class, and grasp through radical feminist anthem: the personal is political (Tong, 2009).

Reference:

Biank, Tanya. 2006. Under The Sabers: : The Unwritten Code of Army Wives. New York State: St. Martin Press.

Moelker, René, Manon Andres, and G. J. Poot. 2006. Supporting Military Families - A Comparative Study in Social Support Arrangements for Military Families (Theoretical Dimensions and Empirical Comparison between Countries).

Rosen, Leora and Linda Moghadam. 2015. "Impact of Military Organization on Social Support Patterns of Army Wives." Human Organization.

Rosen, Leora N., Constance J. Carpenter, and Linda Z. Moghadam. 2018. "Impact of Military Life Stress on the Quality of Life of Military Wives." Military Medicine.

Tong, Rosemarie. 2009. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. Colorado: Westview Press